

LAPORAN PEREKONOMIAN

**PROVINSI PAPUA, PAPUA SELATAN,
PAPUA TENGAH, & PAPUA PEGUNUNGAN**



AGUSTUS 2026

LAPORAN PEREKONOMIAN

**PROVINSI PAPUA, PAPUA SELATAN,
PAPUA TENGAH, & PAPUA PEGUNUNGAN**



AGUSTUS 2026

Visi Bank Indonesia

Menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara *emerging markets* untuk Indonesia Maju.

Misi Bank Indonesia

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
2. Memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
3. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah pusat dan daerah, otoritas atau lembaga terkait, dan/atau mitra strategis lain, serta kerja sama internasional;
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar valas, termasuk infrastrukturnya, untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional;
6. Turut meningkatkan inklusi ekonomi-keuangan, dan keuangan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta perlindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja Bank Indonesia; dan
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, yang mengutamakan Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional, melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya.

Visi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua

Menjadi Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang kredibel dalam mendukung kebijakan Bank Indonesia dan berkontribusi secara nyata bagi pembangunan ekonomi daerah dan nasional.

Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua

Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai Rupiah, stabilitas sistem keuangan, efektivitas pengelolaan uang rupiah dan kehandalan sistem pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan.

Laporan Perekonomian Provinsi Papua dipublikasikan secara triwulanan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua pada bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. Sebelum dipublikasikan, materi Kajian ini telah terlebih dahulu dikompilasi melalui mekanisme kerja internal Bank Indonesia untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta pengawasan perbankan dan sistem keuangan secara makroprudensial. Publikasi ini berfungsi sebagai media untuk menyampaikan penjelasan kepada para pemangku kepentingan dan publik di daerah mengenai perkembangan kondisi terkini, prospek perekonomian, serta isu yang berkembang dan perlu dicermati.

Tim Penyusun

Penanggung Jawab : Warsono
Pimpinan Redaksi : Yunianto
Koordinator Penulis : Refdamas Dwiaji Wisnumurti
Penulis : Muhammad Hafiz Sidik Pulungan
Adi Kurniawan
Ariel Danang Widhiatmoko
Muhamad Faliq Razaqa
Purwati Septianingsih
Rosa Kostantina Dominggas Sem
Anisah
Filia Meitri Alelo

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:

Tim Perumusan KEKDA Provinsi

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua

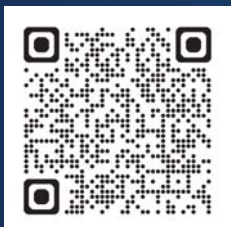
Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 9

Jayapura 99111

T +62 967 534 581

F +62 967 535 201

Unduh LPP Digital melalui scan QR di bawah





Kata Pengantar

Rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Perekonomian Provinsi Papua periode Agustus 2026 ini dapat terbit tepat waktu. Guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menjaga stabilitas makroekonomi, Bank Indonesia Provinsi Papua melakukan asesmen yang meliputi analisis ekonomi makro daerah, pembiayaan, sistem pembayaran, dan ketenagakerjaan yang ditujukan untuk pemerintah daerah, dunia usaha, kalangan akademisi, maupun masyarakat luas.

Perekonomian Papua dan DOB pada triwulan II 2026 mengalami kontraksi yang lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya. Kontraksi yang lebih dalam pada triwulan II 2026 disebabkan oleh *high base effect* kinerja lapangan usaha (LU) pertambangan meski terjadi peningkatan produksi selama *ramping up*. Di sisi lain, pertumbuhan sektor nontambang mengalami peningkatan sehingga menahan kontraksi kinerja perekonomian yang lebih dalam. Peningkatan kinerja sektor non-tambang bersumber dari LU konstruksi.

Inflasi di Papua dan DOB pada triwulan II 2026 secara umum meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan inflasi di Papua dan DOB terutama dipengaruhi oleh gejala geopolitik global yang mendorong kenaikan harga emas perhiasan dan kondisi cuaca yang kurang kondusif yang membatasi produksi dan pasokan pangan lokal. Sebagai bentuk mitigasi, penguatan kapasitas petani dalam menghadapi gangguan cuaca menjadi salah satu agenda prioritas TPID di Papua dan DOB, disertai upaya penguatan kemandirian pangan dan kelancaran distribusi untuk memastikan ketersediaan pangan lokal serta menjaga stabilitas harga.

Perekonomian Papua dan DOB pada tahun 2026 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2025. Peningkatan kinerja perekonomian disebabkan oleh output sektor tambang yang diperkirakan lebih tinggi dibandingkan output tahun 2025. Sejalan dengan hal tersebut, pertumbuhan sektor nontambang juga diperkirakan menyumbang pertumbuhan pada perekonomian. Perkembangan inflasi secara agregat di Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan pada tahun 2026 diperkirakan berada pada sasaran inflasi nasional yaitu $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Hal ini didorong oleh peningkatan produktivitas petani lokal seiring dengan semakin kuatnya sinergi dan intensitas pelaksanaan pengendalian inflasi melalui TPID dan GPIPS.

Penyusunan Laporan Perekonomian Provinsi Papua ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya laporan ini. Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dalam memahami kondisi perekonomian Papua terkini.

Jayapura, Agustus 2026
KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI PAPUA

Warsono

Daftar Isi



v	KATA PENGANTAR
vi	DAFTAR ISI
ix	DAFTAR GRAFIK
xi	DAFTAR TABEL
xii	TABEL INDIKATOR MAKROEKONOMI PROVINSI PAPUA
xxii	RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I ■ PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

2	1.1 Kondisi Umum Triwulan I 2026
2	1.1.1 Provinsi Papua
2	1.1.2 Provinsi Papua Tengah
3	1.1.3 Provinsi Papua Selatan
3	1.1.4 Provinsi Papua Pegunungan
3	1.2 Pertumbuhan Ekonomi Dari Sisi Permintaan
3	1.2.1 Konsumsi Rumah Tangga
4	1.2.2 Konsumsi Pemerintah
5	1.2.3 Total Ekspor dan Impor
6	1.2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto
7	1.3 Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Lapangan Usaha
8	1.3.1 Pertambangan dan Penggalian
9	1.3.2 Konstruksi
10	1.3.3 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
11	1.3.4 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
13	Boks 1 : Mendorong Investasi Berkelanjutan Di Papua Dan Dob Melalui Papua Economic And Investment Forum (PEIF)

BAB II • PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

16	2.1	Perkembangan Inflasi Papua & DOB
16	2.2	Perkembangan Inflasi Provinsi Papua
16	2.2.1	Realisasi Triwulan I 2026
16	2.2.2	Perkembangan Inflasi Berdasarkan Kelompok Komoditas
18	2.3	Perkembangan Inflasi Provinsi Papua Selatan
18	2.3.1	Realisasi Triwulan II 2026
18	2.3.2	Perkembangan Inflasi Berdasarkan Kelompok Komoditas
19	2.4	Perkembangan Inflasi Provinsi Papua Tengah
19	2.4.1	Realisasi Triwulan II 2026
19	2.4.2	Perkembangan Inflasi Berdasarkan Kelompok Komoditas
21	2.5	Perkembangan Inflasi Provinsi Papua Pegunungan
21	2.5.1	Realisasi Triwulan II 2026
21	2.5.2	Perkembangan Inflasi Berdasarkan Kelompok Komoditas
22	2.6	Pengendalian Inflasi Papua dan DOB
24	Boks 1	: Dinamika Perkembangan Inflasi Papua Pegunungan

BAB III • PEMBIAYAAN DAERAH

28	3.1	Perkembangan Kinerja Perbankan
28	3.1.1	Perkembangan Dana Pihak Ketiga
29	3.1.2	Perkembangan Kredit Bank Umum
31	3.2	Ketahanan Sektor Korporasi
31	3.2.1	Kinerja Korporasi
33	3.2.2	Sumber Kerentanan Korporasi
34	3.2.3	<i>Exposure</i> Perbankan Sektor Korporasi
35	3.3	Asesmen Sektor Rumah Tangga
35	3.3.1	Sumber Kerentanan Sektor Rumah Tangga
36	3.3.2	<i>Exposure</i> Perbankan dalam Rumah Tangga (RT)
37	3.4	Akses Keuangan UMKM
39	Boks 3	: Perkembangan Kredit Produktif Papua Dan Dob Ditopang Lapangan Usaha (LU) Pertanian

BAB IV • PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

42	4.1	Sistem Pembayaran Non Tunai
43	4.2	Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)
45	4.3	Digitalisasi Sistem Pembayaran
47	4.4	Pengelolaan Uang Rupiah
49	Boks 4	: Akselerasi Elektronifikasi Pemerintah Daerah Melalui Forum Strategic Advisory Terpadu

BAB V ▪ KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

52 5.1 Ketenagaakerjaan

53 5.2 Kesejahteraan

53 5.2.1 Ketimpangan Distribusi Pendapatan

54 5.2.2 Kesejahteraan Petani

56 Boks 5 : Dampak Perkembangan Investasi Lu
Pertanian Terhadap Indeks Nilai Tukar Petani (NTP)
Di Provinsi Papua

BAB VI ▪ PROSPEK EKONOMI DAERAH

58 6.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi

60 6.2. Prospek Inflasi Tahun 2026

63 DAFTAR ISTILAH

Daftar Grafik

02 Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Dengan dan Tanpa Tambang

04 Grafik 1.2 Perkembangan Survei Konsumen

04 Grafik 1.3 Perkembangan Kredit Konsumsi

05 Grafik 1.4 Ekspor Non Migas

05 Grafik 1.5 Tujuan Ekspor Non Migas

05 Grafik 1.6 Perkembangan Impor Nonmigas

06 Grafik 1.7 Impor Nonmigas Berdasarkan Jenis

06 Grafik 1.8 Negara Asal Impor Non Migas

06 Grafik 1.9 Perkembangan PDRB Investasi Papua

07 Grafik 1.10 Perkembangan PMA dan PMDN

07 Grafik 1.11 Perkembangan Nilai Tukar

07 Grafik 1.12 Perkembangan Kredit Investasi

08 Grafik 1.13 Perkembangan PDRB Sisi Lapangan Usaha

08 Grafik 1.14 Perkembangan Produksi Tembaga

08 Grafik 1.15 Perkembangan Produksi Emas

09 Grafik 1.16 Perkembangan Penjualan Tembaga

09 Grafik 1.17 Perkembangan Penjualan Emas

09 Grafik 1.18 Perkembangan Harga Tembaga dan Emas Dunia (dolar AS)

09 Grafik 1.19 Perkembangan PDRB Konstruksi

10 Grafik 1.20 Perkembangan Kredit Konstruksi Papua

10 Grafik 1.21 Perkembangan Penjualan Semen

11 Grafik 1.22 Luas Panen Padi di Papua

11 Grafik 1.23 Perkembangan PDRB Perdagangan

11 Grafik 1.24 Perkembangan Indeks Pembelian Barang Tahan Lama

11 Grafik 1.25 Perkembangan Kredit Sektor Perdagangan

16 Grafik 2.1 Inflasi Spasial Papua dan DOB Papua

28 Grafik 3.1 Aset Perbankan Papua

28 Grafik 3.2 Perkembangan DPK Papua

29 Grafik 3.3 Pertumbuhan Kredit Papua

30 Grafik 3.4 Perkembangan LDR dan NPL Papua

30 Grafik 3.5 Perkembangan Indikator Dunia Usaha Provinsi Papua

31 Grafik 3.6 Perkembangan LS Permintaan Domestik

31 Grafik 3.7 Perkembangan LS Utilisasi

32 Grafik 3.8 Perkembangan LS Investasi

32 Grafik 3.9 Perkembangan LS Biaya

32 Grafik 3.10 Perkembangan LS Margin dan harga Jual

32 Grafik 3.11 Akses Kredit, Likuiditas dan Rentabilitas Korporasi

33 Grafik 3.12 Perkembangan Likuiditas Berdasarkan Sektor

33 Grafik 3.13 Perkembangan Rentabilitas Berdasarkan Sektor

33 Grafik 3.14 *Exposure* Perbankan Pada Korporasi

33 Grafik 4.15 Perkembangan DPK Sektor Korporasi

34 Grafik 3.16 Kredit Korporasi Berdasarkan Sektor

34 Grafik 3.17 Pertumbuhan Kredit Korporasi Berdasarkan Sektor

34 Grafik 3.18 Kredit Korporasi Berdasarkan Penggunaan

34 Grafik 3.19 NPL Kredit Korporasi Berdasarkan Sektor

35 Grafik 3.20 IEK, IKK, dan IKE

35 Grafik 3.21 Indeks Kondisi Saat Ini

35 Grafik 3.22 Eksposur Perbankan Pada Rumah Tangga

35 Grafik 3.23 Perkembangan DPK Rumah Tangga

36 Grafik 3.24 Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Penggunaan

36 Grafik 3.25 NPL Rumah Tangga Berdasarkan Penggunaan

36 Grafik 3.26 Perkembangan Kredit UMKM dan Non UMKM

36 Grafik 3.27 Kredit UMKM Berdasarkan Penggunaan

37 Grafik 3.28a Kredit UMKM Berdasarkan Sektor

37 Grafik 3.28b Kredit UMKM Berdasarkan Sektor

38 Grafik 3.29a NPL Kredit Berdasarkan Sektor

38 Grafik 3.29b NPL Kredit UMKM Berdasarkan Sektor

42 Grafik 4.1 Perkembangan Nilai Transaksi BI-RTGS

42 Grafik 4.2 Perkembangan Volume Transaksi BI-RTGS

42 Grafik 4.3 Perkembangan Nilai Transaksi SKNBI

42 Grafik 4.4 Perkembangan Volume Transaksi SKNBI

43 Grafik 4.5 Perkembangan Transaksi ATM/Debet

43 Grafik 4.6 Proporsi Transaksi ATM/Debet

43	Grafik 4.7	Jumlah Mesin ATM
44	Grafik 4.8	Perkembangan Transaksi Kartu Kredit
44	Grafik 4.9	Pangsa Jenis Transaksi Kartu Kredit
45	Grafik 4.10	Nilai dan Volume Transaksi <i>E-Commerce</i>
45	Grafik 4.11	Metode Pembayaran Transaksi <i>E-Commerce</i>
46	Grafik 4.12	Perkembangan Volume Transaksi QRIS
46	Grafik 4.13	Perkembangan <i>Merchant</i> QRIS
46	Grafik 4.14	Perkembangan Pengguna QRIS
47	Grafik 4.15	Pangsa <i>Merchant</i> QRIS
47	Grafik 4.16	Pangsa <i>Merchant</i> QRIS - Spasial
47	Grafik 4.17	Aliran Uang Kartal di Wilayah Papua
48	Grafik 4.18	Perkembangan Pemusnahan UTLE

52	Grafik 5.1	Persebaran Penyerapan Tenaga Kerja menurut Lapangan Usaha
52	Grafik 5.2	Klasifikasi Status Pekerjaan
52	Grafik 5.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
53	Grafik 5.4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
54	Grafik 5.5	Indeks Gini Wilayah Papua Maret 2026
54	Grafik 5.7	GK Perkotaan berdasarkan Jenis Komoditas Maret 2026
54	Grafik 5.6	Profil Kemiskinan Wilayah Papua Maret 2026

54	Grafik 5.8	GK Perdesaan berdasarkan Jenis Komoditas Maret 2026
55	Grafik 5.9	Perkembangan NTP Provinsi Papua
55	Grafik 5.10	Perkembangan NTP Provinsi Papua Selatan
55	Grafik 5.11	Perkembangan NTP Provinsi Papua Tengah
55	Grafik 5.12	Perkembangan NTP Provinsi Papua Pegunungan
58	Grafik 6.1	Produksi Bijih yang Digiling per Hari
58	Grafik 6.2	Perkembangan Penjualan Pertambangan
60	Grafik 6.3	Perkembangan BI Rate



Daftar Tabel

02 Tabel 1.1 Perkembangan PDRB Papua dan DOB

16 Tabel 2.1 Perkembangan Inflasi di Provinsi Papua dan DOB Papua

17 Tabel 2.2 Perkembangan Inflasi Provinsi Papua berdasarkan Kelompok Komoditas

17 Tabel 2.3 Perkembangan Komoditas Inflasi Umum di Provinsi Papua

18 Tabel 2.4 Perkembangan Inflasi Provinsi Papua Selatan berdasarkan Kelompok Komoditas

19 Tabel 2.5 Perkembangan Komoditas Inflasi Umum di Provinsi Papua Selatan

20 Tabel 2.6 Perkembangan Inflasi Papua Tengah berdasarkan Kelompok Komoditas

20 Tabel 2.7 Perkembangan Komoditas Inflasi Umum di Provinsi Papua Tengah

21 Tabel 2.8 Perkembangan Inflasi Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan Kelompok Komoditas

22 Tabel 2.9 Perkembangan Inflasi Umum di Provinsi Papua Pegunungan

Tabel Indikator Ekonomi Makro Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, & Papua Pegunungan

PERTUMBUHAN EKONOMI PAPUA & DOB

PROVINSI PAPUA

Indikator	2023					2024					2025					2026	
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II
PDRB (% yoy)	4,45	4,54	3,54	4,37	4,22	5,44	4,34	4,04	2,73	4,11	3,91	3,55	4,21	4,20	3,97	4,96	4,49
PENGELUARAN (%yoy)																	
Konsumsi Rumah Tangga											3,46	3,66	3,84	4,02	3,75	3,99	2,91
Konsumsi LNPR											-6,18	5,96	-1,78	0,10	-0,66	2,06	3,14
Konsumsi Pemerintah											-0,60	-0,04	4,14	0,56	1,09	8,26	5,90
PMTB											1,48	1,22	2,01	1,55	1,57	4,65	6,34
Ekspor Barang dan Jasa											-5,24	10,11	7,38	0,16	3,05	6,41	-1,73
Dikurangi Impor Barang dan Jasa											-10,41	-0,07	-1,94	-2,15	-3,55	4,16	-0,64
LAPANGAN USAHA (%yoy)																	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,37	2,79	-0,56	-0,62	1,90	-0,45	-1,27	0,20	4,71	0,80	4,35	4,85	5,33	3,99	4,63	4,15	3,06
Pertambangan dan Penggalian	5,30	7,08	-0,03	-0,03	2,97	3,02	3,64	7,30	5,31	4,82	3,68	3,05	3,66	4,96	3,85	4,42	2,83
Industri Pengolahan	0,18	-3,84	2,59	6,61	1,34	6,67	7,19	4,45	2,94	5,26	4,27	2,43	4,12	3,94	3,69	4,18	2,60
Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es	7,49	6,83	-0,01	4,69	4,64	14,89	9,20	9,55	2,23	8,74	3,50	3,56	4,10	3,39	3,64	-0,63	4,37
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,45	3,92	-2,58	-2,40	0,06	1,66	-0,63	5,12	5,78	2,94	4,68	3,22	3,97	1,21	3,25	4,31	4,28
Konstruksi	0,66	6,04	3,48	2,98	3,25	2,49	3,33	3,32	-1,28	1,89	-0,62	-1,46	-0,08	-0,02	-0,54	4,43	7,94
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,22	3,33	5,89	9,04	5,93	8,30	7,70	5,00	3,08	5,91	5,67	3,79	4,33	3,51	4,31	4,55	4,10
Transportasi dan Pergudangan	9,67	9,81	8,15	8,88	9,11	6,78	6,76	7,16	6,27	6,73	3,53	2,11	3,95	0,76	2,55	5,89	2,93
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,56	4,30	2,67	2,14	3,15	1,03	3,54	6,03	7,12	4,47	3,66	2,52	1,82	2,56	2,62	6,39	3,29
Informasi dan Komunikasi	1,81	5,97	3,66	3,92	3,84	8,62	4,58	5,53	5,97	6,14	3,36	5,51	7,38	6,30	5,65	7,44	6,73
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,22	17,92	16,32	10,24	12,81	5,84	4,87	3,55	-3,60	2,55	3,68	-0,12	-4,83	1,89	0,08	-0,18	-1,78
Real Estate	3,51	4,09	7,71	7,97	5,83	5,21	5,91	2,48	4,38	4,47	3,87	5,81	8,26	7,40	6,35	6,93	3,23
Jasa Perusahaan	5,24	9,57	11,36	6,47	8,14	1,80	3,30	3,79	3,37	3,08	4,79	0,18	4,69	5,83	3,88	6,36	4,31
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,00	1,98	-1,36	0,01	1,51	14,48	6,18	5,33	3,36	7,20	8,14	8,74	6,66	9,59	8,28	4,55	4,79
Jasa Pendidikan	5,97	5,81	-0,06	6,20	4,45	1,92	0,72	7,32	2,56	3,10	3,37	5,22	7,49	6,12	5,58	6,58	4,11
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,14	-1,33	1,91	6,05	3,65	-0,08	8,73	5,53	0,06	3,46	2,69	5,30	5,39	7,05	5,14	5,68	2,80
Jasa lainnya	1,25	2,02	6,44	5,72	3,88	2,84	1,74	0,61	2,26	1,85	4,26	1,89	4,90	5,80	4,24	7,23	4,53

Sumber: BPS

PROVINSI PAPUA TENGAH

Indikator	2023					2024					2025					2026	
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II
PDRB (% yoy)	-7,70	3,24	12,22	15,59	5,95	28,27	3,98	-0,45	-8,98	4,36	-25,53	-9,93	-16,13	-35,59	-21,80	-8,38	-15,44
PENGLUARAN (%yoy)																	
Konsumsi Rumah Tangga											4,38	4,32	3,20	3,09	3,74	3,38	3,17
Konsumsi LNPRT											-10,53	4,90	0,26	-0,82	-1,86	1,16	2,73
Konsumsi Pemerintah											-1,75	-1,23	-1,65	3,82	0,07	6,08	2,51
PMTB											-1,81	2,81	0,03	-5,67	-1,33	-0,10	2,02
Ekspor Barang dan Jasa											-54,93	39,12	-31,75	-50,98	-29,81	-1,13	-25,69
Dikurangi Impor Barang dan Jasa											-19,70	-39,77	-33,06	-17,45	-28,24	-16,69	169,60
LAPANGAN USAHA (%yoy)																	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,38	1,94	-0,36	3,38	1,58	3,17	-0,20	2,41	-1,45	0,95	1,31	1,48	3,67	3,93	2,60	3,56	3,38
Pertambangan dan Penggalian	-11,19	2,96	15,24	19,65	6,75	37,00	3,80	-2,02	-12,20	4,44	-32,84	-13,54	-21,81	-47,97	-29,02	-13,62	-22,72
Industri Pengolahan	-0,26	-1,34	3,61	4,99	1,81	5,31	6,24	3,05	3,74	4,51	5,85	5,53	5,67	6,83	5,98	6,81	7,44
Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es	11,59	3,40	-0,09	-4,13	2,32	3,40	7,25	6,14	3,78	5,10	3,67	3,46	4,05	3,22	3,60	4,88	6,12
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-1,51	-1,79	7,62	-5,71	-0,38	2,43	0,01	-6,34	3,89	-0,18	4,87	4,42	3,83	5,51	4,66	4,94	3,49
Konstruksi	7,01	7,86	2,82	-2,62	3,35	-0,23	7,39	9,31	8,36	6,23	-0,11	0,47	0,05	-0,62	-0,06	-1,98	1,79
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,35	3,40	4,90	4,45	4,40	1,45	5,08	3,88	3,74	3,48	7,12	5,14	4,69	6,87	5,95	8,37	9,47
Transportasi dan Pergudangan	4,36	6,87	4,24	14,32	8,23	14,63	15,32	16,28	6,55	12,87	3,68	1,70	3,01	3,36	2,94	1,42	1,51
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,33	2,16	1,36	3,01	2,22	2,15	3,12	4,51	1,06	2,69	2,11	1,97	0,74	1,56	1,59	5,40	2,82
Informasi dan Komunikasi	2,64	3,09	-0,39	0,62	1,46	3,12	2,18	3,53	2,36	2,80	4,26	4,81	5,20	5,66	4,99	5,44	5,22
Jasa Keuangan dan Asuransi	8,66	16,27	17,03	9,06	12,61	8,95	8,65	3,64	-6,90	3,38	0,12	-3,03	-8,70	4,18	-1,98	-2,98	-2,75
Real Estate	1,97	1,26	2,35	2,75	2,08	2,76	6,83	5,99	5,63	5,31	3,29	2,39	2,46	6,01	3,55	5,62	5,90
Jasa Perusahaan	2,92	3,08	9,15	6,35	5,37	4,16	8,45	4,72	5,85	5,79	4,38	-0,10	0,23	1,14	1,37	4,11	4,09
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,92	2,90	0,30	0,21	2,02	4,08	0,10	0,57	0,53	1,29	0,02	2,32	7,12	12,49	5,48	14,21	12,14
Jasa Pendidikan	3,31	2,61	0,11	3,33	2,39	5,43	2,71	5,89	2,94	4,16	1,85	5,58	5,37	4,68	4,38	6,96	6,98
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,47	0,41	1,50	4,31	2,67	5,66	8,96	5,85	3,61	5,96	4,86	5,69	5,29	5,79	5,41	4,82	4,66
Jasa lainnya	2,05	1,68	6,76	8,55	4,79	7,86	6,10	5,54	2,57	5,44	3,83	3,08	1,41	4,20	3,13	4,47	6,56

Sumber: BPS

PROVINSI PAPUA SELATAN

Indikator	2023					2024					2025					2026	
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II
PDRB (% yoy)	2,83	3,21	3,68	7,05	4,23	7,10	6,15	5,35	2,04	5,09	3,86	3,08	3,25	3,35	3,39	3,93	5,51
PENGELUARAN (%yoy)																	
Konsumsi Rumah Tangga											3,31	3,50	3,32	3,20	3,33	3,42	3,35
Konsumsi LNPR											-6,53	6,43	-3,08	-1,40	-1,36	0,53	2,51
Konsumsi Pemerintah											-3,89	-0,32	0,42	-2,04	-1,45	4,41	5,06
PMTB											2,81	4,85	1,22	1,07	2,42	7,97	12,84
Ekspor Barang dan Jasa											5,58	-7,10	-19,14	-6,41	-6,82	-2,16	8,61
Dikurangi Impor Barang dan Jasa											10,28	-2,42	-10,65	-3,94	-2,11	0,03	4,79
LAPANGAN USAHA (%yoy)																	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,24	1,41	1,79	6,27	3,41	5,81	1,43	1,65	0,46	2,29	3,53	4,74	6,08	4,35	4,67	1,76	4,13
Pertambangan dan Penggalian	5,56	8,10	2,86	3,55	4,97	4,30	1,85	5,41	2,92	3,61	4,05	3,77	1,98	3,12	3,22	1,38	3,24
Industri Pengolahan	-0,85	-2,12	4,41	1,72	0,81	4,14	4,78	2,43	3,16	3,58	4,29	2,52	2,76	2,68	3,05	3,98	3,77
Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es	6,66	5,35	0,62	1,43	3,41	8,42	9,53	9,38	2,80	7,45	4,14	2,17	3,17	6,81	4,08	0,00	2,48
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,57	-3,23	1,04	-1,01	0,08	-3,11	3,26	1,07	0,63	0,41	-0,04	2,31	-0,48	-0,36	0,34	3,36	3,33
Konstruksi	-3,11	1,28	3,63	11,71	3,44	9,34	9,76	7,56	0,54	6,54	4,87	5,61	5,26	2,24	4,46	5,92	12,28
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,91	8,19	9,82	9,04	8,76	6,83	5,85	2,85	0,91	4,01	1,46	2,44	2,63	4,07	2,67	6,83	3,45
Transportasi dan Pergudangan	7,59	9,80	8,92	16,86	12,20	18,83	15,85	14,06	0,61	11,77	2,16	0,17	1,18	2,81	1,58	4,18	4,30
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,40	4,86	2,88	5,42	4,64	4,72	5,06	6,72	1,57	4,47	2,38	3,20	3,07	5,28	3,50	6,14	6,12
Informasi dan Komunikasi	2,30	4,34	-1,06	0,12	1,40	-0,27	1,10	4,91	5,41	2,78	7,02	1,31	-0,85	2,74	2,51	3,28	4,34
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,71	12,33	12,45	6,50	9,67	1,51	6,48	1,35	-7,21	0,43	-2,92	-6,39	-8,84	0,24	-4,58	-2,75	-4,17
Real Estate	4,12	3,48	6,39	5,55	4,89	3,94	5,20	3,81	4,56	4,37	4,51	3,27	1,66	3,97	3,34	4,89	5,61
Jasa Perusahaan	3,52	3,35	4,22	2,65	3,43	1,78	7,46	7,61	6,56	5,86	4,18	-0,35	2,22	2,10	2,01	3,28	0,65
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,88	3,56	0,24	0,56	2,09	9,86	9,23	9,60	8,55	9,45	4,89	-0,52	-0,03	4,24	2,10	2,40	3,62
Jasa Pendidikan	4,45	4,57	0,11	7,84	4,23	4,68	4,90	7,84	3,36	5,16	4,35	4,17	4,09	1,02	3,38	5,78	1,09
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,36	0,99	6,18	8,72	5,07	4,05	9,77	4,80	0,75	4,75	4,26	3,71	3,71	5,97	4,41	3,13	-0,29
Jasa lainnya	1,04	2,31	3,81	7,30	3,64	4,85	2,05	2,31	1,55	2,66	4,86	4,74	2,02	1,83	3,33	4,43	5,63

Sumber: BPS

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Indikator	2023					2024					2025					2026	
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II
PDRB (% yoy)	5,38	6,34	3,15	4,33	4,78	5,01	5,98	5,48	2,66	4,75	3,02	3,17	4,34	4,42	3,75	3,51	3,30
PENGELUARAN (%yoy)																	
Konsumsi Rumah Tangga											3,00	3,47	3,23	3,86	3,39	3,44	3,47
Konsumsi LNPRT											-8,31	6,87	0,27	0,43	-0,45	2,01	2,43
Konsumsi Pemerintah											-0,58	4,98	1,29	4,22	2,55	1,72	-0,47
PMTB											0,15	0,21	-0,48	1,22	0,29	1,61	6,42
Ekspor Barang dan Jasa											-0,29	1,32	4,49	-4,65	0,21	2,67	1,19
Dikurangi Impor Barang dan Jasa											4,05	1,77	-1,61	2,27	1,55	1,21	3,41
LAPANGAN USAHA (%yoy)																	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,38	2,15	-0,37	4,97	2,50	3,90	5,02	3,43	0,72	3,24	2,12	0,78	3,60	5,74	3,06	6,85	5,83
Pertambangan dan Penggalian	7,44	8,84	1,08	2,42	4,85	2,84	2,16	3,48	0,01	2,10	0,13	1,84	4,83	3,60	2,59	2,91	4,24
Industri Pengolahan	-0,55	-1,03	3,57	7,22	2,30	9,52	3,45	1,59	0,07	3,53	2,33	3,27	5,46	4,06	3,78	-0,01	0,26
Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es	1,58	3,50	3,83	10,45	4,91	11,51	8,20	4,05	-2,01	5,18	2,39	-0,57	2,78	1,85	1,61	0,24	3,46
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,78	2,41	0,75	-1,41	0,86	0,63	0,19	2,01	4,58	1,85	1,74	1,59	2,82	2,94	2,28	0,40	0,04
Konstruksi	3,88	8,15	3,90	0,40	3,97	0,23	5,81	8,40	7,72	5,57	-0,06	-0,82	-0,09	1,23	0,08	2,13	7,01
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,26	11,16	9,60	7,00	8,74	8,11	6,82	6,39	4,94	6,53	4,77	3,66	4,50	5,17	4,52	4,83	5,09
Transportasi dan Pergudangan	18,89	14,03	7,37	11,38	12,66	15,42	17,28	8,08	-1,90	9,22	0,06	0,21	7,54	2,86	2,60	2,86	-2,45
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,74	3,08	2,91	4,44	3,31	5,24	5,41	4,01	3,61	4,55	4,92	0,81	4,64	1,93	3,05	2,76	2,59
Informasi dan Komunikasi	3,40	4,53	2,35	2,68	3,23	5,82	4,35	5,20	-0,18	3,77	2,14	4,57	4,96	4,97	4,16	2,68	4,66
Jasa Keuangan dan Asuransi	10,20	16,01	13,55	8,43	11,93	4,29	8,67	3,21	-6,10	2,38	-0,03	-4,67	-9,17	0,47	-3,45	-2,79	-5,11
Real Estate	3,78	2,99	4,68	6,10	4,39	3,73	5,28	4,89	5,81	4,94	5,15	5,77	4,97	5,82	5,43	4,23	2,89
Jasa Perusahaan	3,07	3,10	4,99	4,63	3,95	5,33	7,49	2,09	3,16	4,49	0,93	1,21	5,59	2,93	2,64	3,31	3,40
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,15	5,24	-0,35	1,47	2,58	5,04	2,98	4,35	0,71	3,22	7,11	9,61	8,42	7,07	8,05	1,96	-0,87
Jasa Pendidikan	4,52	4,39	0,37	8,58	4,46	5,47	4,16	4,02	0,49	3,47	1,79	3,56	4,96	4,25	3,64	4,71	2,83
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,75	1,13	4,18	7,98	4,78	4,44	8,48	3,03	1,97	4,40	3,28	4,27	3,99	2,78	3,57	1,78	3,33
Jasa lainnya	3,59	3,19	6,52	7,37	5,18	5,77	4,39	3,28	0,86	3,52	4,23	5,70	5,99	4,65	5,14	2,25	4,32

Sumber: BPS

■ PERKEMBANGAN INDEKS HARGA KONSUMEN KOTA/KAB IHK DI PAPUA & DOB

Spasial Per Kota IHK

Indikator	2023				2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
INFLASI														
INDEKS HARGA KONSUMEN (IHK)														
JAYAPURA	110,59	113,64	113,05	113,87	104,12	103,60	103,91	105,66	105,10	106,24	104,94	108,34	108,78	110,19
MERAUKE	112,59	116,19	114,66	116,22	106,87	105,65	106,29	107,90	109,38	111,03	109,93	111,08	113,32	114,31
TIMIKA	115,25	118,64	119,00	119,96	107,64	105,29	109,29	110,53	111,66	112,40	111,44	112,77	113,75	116,06
NABIRE					110,83	105,72	109,77	110,85	110,81	113,05	112,94	117,29	115,14	118,07
JAYAWIJAYA					107,80	105,34	110,12	111,80	115,26	113,53	114,03	115,40	118,88	122,43
LAJU INFLASI BULANAN (%mtm)														
JAYAPURA	0,12	1,35	-0,23	0,78	1,19	-0,67	-0,41	0,05	0,29	-0,33	0,04	1,76	0,71	-1,00
MERAUKE	0,90	1,08	-1,05	0,78	0,33	-0,92	-0,74	1,24	0,64	1,44	-1,08	0,81	0,35	0,43
TIMIKA	0,64	0,76	-0,99	0,36	1,01	-0,27	0,15	0,29	-0,28	0,23	0,04	0,55	0,26	1,05
NABIRE					1,57	0,03	-1,58	0,09	0,59	1,56	-0,14	1,79	0,27	2,28
JAYAWIJAYA					1,06	-0,44	-0,60	2,39	0,91	1,65	-0,75	1,58	2,57	1,70
LAJU INFLASI TAHUNAN (%yoy)														
JAYAPURA	4,40	2,87	1,28	1,65	1,78	0,91	0,82	1,75	1,33	1,40	0,99	2,54	3,50	3,72
MERAUKE	3,16	5,91	4,72	4,67	3,04	1,20	1,60	1,78	2,20	5,45	3,42	2,95	3,60	2,95
TIMIKA	5,38	5,75	4,50	3,51	3,36	3,49	4,00	3,99	2,88	3,16	1,97	2,03	1,87	3,26
NABIRE					6,38	6,21	3,52	1,86	1,02	2,37	2,89	5,81	3,91	4,44
JAYAWIJAYA					2,71	5,09	4,14	5,36	5,75	4,15	3,55	3,23	3,14	7,84
LAJU INFLASI TAHUN KALENDER BERJALAN (%ytd)														
JAYAPURA	-1,27	1,45	0,92	1,65	0,27	0,56	0,07	1,75	0,45	0,21	-0,68	2,54	0,41	1,71
MERAUKE	1,40	4,65	3,27	4,67	0,82	0,75	0,26	1,78	3,24	4,38	1,88	2,95	2,02	2,91
TIMIKA	-0,55	2,37	2,68	3,51	1,27	2,51	2,82	3,99	1,70	1,92	0,82	2,03	0,86	2,92
NABIRE					1,83	3,17	0,86	1,86	2,30	3,58	1,89	5,81	-1,83	0,67
JAYAWIJAYA					1,59	4,42	3,78	5,36	3,10	3,22	1,99	3,23	3,01	6,09

Sumber: BPS

Spasial Per Provinsi

Indikator	2023				2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
INFLASI														
INDEKS HARGA KONSUMEN (IHK)														
PAPUA	110,59	113,64	113,05	113,87	104,12	103,60	103,91	105,66	105,10	106,24	104,94	108,34	108,78	108,75
PAPUA SELATAN	112,59	116,19	114,66	116,22	106,87	105,65	106,29	107,90	109,38	111,03	109,93	111,08	113,32	114,28
PAPUA TENGAH	115,25	118,64	119,00	119,96	107,41	110,06	109,45	110,64	111,38	112,62	111,94	114,27	114,21	116,73
PAPUA PEGUNUNGAN					107,80	105,34	110,12	111,80	115,26	113,53	114,03	115,40	118,88	120,75
LAJU INFLASI BULANAN (%mtm)														
PAPUA	0,12	1,35	-0,23	0,78	1,19	-0,67	-0,41	0,05	0,29	-0,33	0,04	1,76	0,71	-1,31
PAPUA SELATAN	0,90	1,08	-1,05	0,78	0,33	-0,92	-0,74	1,24	0,64	1,44	-1,08	0,81	0,35	-0,03
PAPUA TENGAH	0,64	0,76	-0,99	0,36	1,00	-0,17	-0,44	0,22	2,60	-0,11	-0,03	0,97	0,27	1,46
PAPUA PEGUNUNGAN					1,06	-0,44	-0,60	2,39	0,91	1,65	-0,75	1,58	2,57	-1,37
LAJU INFLASI TAHUNAN (%yoy)														
PAPUA	4,40	2,87	1,28	1,65	1,78	0,91	0,82	1,75	1,33	1,40	0,99	2,54	3,50	2,71
PAPUA SELATAN	3,16	5,91	4,72	4,67	3,04	1,20	1,60	1,78	2,20	5,45	3,42	2,95	3,60	1,46
PAPUA TENGAH	5,38	5,75	4,50	3,51	4,09	4,39	3,84	3,26	3,70	2,32	2,27	3,29	2,54	3,65
PAPUA PEGUNUNGAN					2,71	5,09	4,14	5,36	5,75	4,15	3,55	3,23	3,14	4,64
LAJU INFLASI TAHUN KALENDER BERJALAN (%ytd)														
PAPUA	-1,27	1,45	0,92	1,65	0,27	0,56	0,07	1,75	0,45	0,21	-0,68	2,54	0,41	0,38
PAPUA SELATAN	1,40	4,65	3,27	4,67	0,82	0,75	0,26	1,78	3,24	4,38	1,88	2,95	2,02	2,88
PAPUA TENGAH	-0,55	2,37	2,68	3,51	0,25	2,73	2,16	3,26	0,67	1,79	1,18	3,29	-0,06	2,15
PAPUA PEGUNUNGAN					1,59	4,42	3,78	5,36	3,10	3,22	1,99	3,23	3,01	4,64

Sumber: BPS

PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH PAPUA & DOB

Provinsi Papua

Indikator	2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Dana Pihak Ketiga (Rp Triliun)	22,61	23,15	22,94	24,05	22,17	22,19	22,72	22,80	21,85	21,60
Giro	4,27	4,90	4,91	4,26	3,44	3,83	3,89	3,57	3,58	3,45
Tabungan	13,26	13,21	13,07	14,84	13,98	13,75	13,41	14,95	14,09	14,02
Deposito	5,09	5,04	4,96	4,94	4,75	4,61	5,42	4,28	4,18	4,13
Kredit (Rp Triliun)	22,46	22,51	22,27	22,38	22,43	23,12	23,24	23,63	23,41	23,13
Modal Kerja	6,05	6,04	6,04	5,91	5,86	5,84	5,78	5,96	5,75	5,55
Investasi	4,74	4,52	3,99	3,91	3,73	4,19	4,07	3,91	3,90	3,63
Konsumsi	11,67	11,95	12,25	12,57	12,84	13,10	13,39	13,76	13,77	13,95
Loan to Deposit Ratio (%)	99,33	97,23	97,08	93,09	101,19	104,20	102,32	103,62	107,15	107,09
NPL Kredit (%)	3,00	2,85	2,98	2,58	2,46	2,88	2,88	2,52	3,58	3,59

Sumber : Laporan Bank Umum Terintegrasi Papua; Berdasarkan Lokasi Proyek

Provinsi Papua Selatan

Indikator	2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Dana Pihak Ketiga (Rp Triliun)	6,07	6,59	6,56	6,17	5,98	6,66	6,56	8,28	7,65	7,95
Giro	2,10	2,36	2,48	1,62	1,70	2,13	2,31	3,22	2,88	3,19
Tabungan	3,23	3,48	3,29	3,86	3,54	3,75	3,45	4,35	3,98	3,95
Deposito	0,74	0,75	0,79	0,69	0,74	0,77	0,80	0,71	0,79	0,81
Kredit (Rp Triliun)	8,01	8,12	8,57	8,57	8,50	8,81	9,57	10,53	10,88	14,36
Modal Kerja	2,28	2,37	2,75	2,69	2,64	2,73	2,69	2,64	2,60	3,06
Investasi	3,12	3,09	3,11	3,05	2,93	3,07	3,78	4,69	5,00	8,08
Konsumsi	2,61	2,66	2,72	2,83	2,93	3,01	3,09	3,20	3,28	3,23
Loan to Deposit Ratio (%)	132,14	123,29	130,71	138,82	142,11	132,39	145,83	127,16	142,22	180,56
NPL Kredit (%)	1,14	1,12	0,93	0,76	0,76	0,92	0,88	0,73	0,69	0,57

Sumber : Laporan Bank Umum Terintegrasi Papua; Berdasarkan Lokasi Proyek

Provinsi Papua Tengah

Indikator	2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Dana Pihak Ketiga (Rp Triliun)	13,98	17,15	16,29	14,74	14,67	19,51	19,86	16,92	17,15	19,31
Giro	5,60	8,63	7,81	4,96	5,50	9,74	9,80	6,08	6,90	8,25
Tabungan	6,69	6,90	6,83	8,01	7,34	7,59	7,76	8,83	8,23	8,27
Deposito	1,69	1,62	1,66	1,77	1,84	2,18	2,30	2,00	2,02	2,79
Kredit (Rp Triliun)	8,07	8,26	10,39	11,03	11,93	12,15	12,53	12,22	12,50	13,00
Modal Kerja	2,51	2,52	4,50	4,64	4,95	4,97	5,19	4,72	4,69	4,90
Investasi	1,40	1,40	1,40	1,73	2,11	2,09	2,09	2,09	2,26	2,36
Konsumsi	4,16	4,33	4,48	4,67	4,87	5,10	5,25	5,41	5,56	5,74
Loan to Deposit Ratio (%)	57,74	48,14	63,74	74,87	81,34	62,28	63,07	72,22	72,92	67,29
NPL Kredit (%)	3,39	3,15	2,29	2,19	2,14	2,25	2,32	2,39	2,34	2,36

Sumber : Laporan Bank Umum Terintegrasi Papua; Berdasarkan Lokasi Proyek

Provinsi Papua Pegunungan

Indikator	2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Dana Pihak Ketiga (Rp Triliun)	4,20	4,62	5,23	4,43	4,00	4,57	4,55	3,78	4,11	3,93
Giro	1,31	1,60	2,04	0,96	1,04	1,34	1,72	0,54	1,49	1,15
Tabungan	2,39	2,54	2,57	3,01	2,46	2,72	2,33	2,81	2,20	2,31
Deposito	0,50	0,48	0,61	0,46	0,50	0,51	0,49	0,43	0,43	0,46
Kredit (Rp Triliun)	2,93	3,02	3,11	3,19	3,15	3,25	3,32	3,36	3,28	3,30
Modal Kerja	0,95	0,93	0,99	1,11	1,02	1,02	1,01	1,01	0,89	0,83
Investasi	0,15	0,14	0,13	0,14	0,14	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17
Konsumsi	1,83	1,95	1,98	1,94	1,99	2,08	2,15	2,19	2,22	2,30
Loan to Deposit Ratio (%)	69,87	65,34	59,40	72,08	78,81	71,13	72,99	88,80	79,78	83,91
NPL Kredit (%)	2,52	4,75	4,54	1,85	1,99	2,53	4,53	4,09	4,12	3,09

Sumber : Laporan Bank Umum Terintegrasi Papua; Berdasarkan Lokasi Proyek

PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN PAPUA & DOB

Indikator	2023				2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Sistem Pembayaran Tunai (Rp Miliar)														
Inflow	5.568	1.618	1.493	818	5.331	2.352	2.079	810	5.095	2.092	1.288	548	5.218	1.635
Outflow	(913)	(2.887)	(2.377)	(7.190)	(1.448)	(2.686)	(2.222)	(7.748)	(864)	(1.350)	(2.652)	(6.985)	(1.001)	(1.506)
Netflow	4.656	(1.269)	(884)	(6.372)	3.883	(334)	(143)	(6.939)	4.231	741	(1.365)	(6.437)	4.217	129
Sistem Pembayaran Non Tunai														
SKNBI - Nominal (Rp Miliar)	2.375	2.119	2.577	2.786	2.329	1.972	2.358	2.693	2.058	1.811	2.241	2.622	2.062	1.828
SKNBI - Volume	52.413	47.665	55.422	58.375	47.373	41.189	52.000	54.678	41.185	37.947	48.017	56.242	39.259	38.084

Sumber : Bank Indonesia

PERKEMBANGAN TRANSAKSI E-COMMERCE MENURUT LOKASI PEMBELI

Indikator	2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II
Nominal (Rp Miliar)						
Papua		124,20	121,87	148,65	187,17	163,25
Papua Pegunungan		17,15	16,56	22,71	26,98	19,27
Papua Selatan		21,38	24,33	28,48	37,37	39,08
Papua Tengah		50,01	55,24	62,26	71,14	63,20
TOTAL		212,75	218,01	262,11	322,66	284,79

PERKEMBANGAN QRIS MENURUT PROVINSI

Indikator	2023				2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
NOMINAL (Rp Juta)														
Papua	64.546	76.083	115.503	208.932	307.487	458.583	402.173	695.316	836.715	942.650	984.456	754.171	797.344	794.313
Papua Pegunungan	7.820	5.980	8.017	14.410	11.215	13.416	17.534	46.363	36.140	16.406	20.079	26.018	31.120	35.516
Papua Selatan	14.924	12.439	19.704	36.262	20.272	46.502	198.052	123.807	111.225	107.265	146.513	177.684	117.679	169.996
Papua Tengah	17.737	20.346	32.235	61.631	73.698	93.441	112.001	149.363	172.758	197.090	230.272	249.800	315.161	348.953
TOTAL	105.026	114.848	175.458	321.235	412.672	611.941	729.760	1.014.849	1.156.839	1.263.411	1.381.320	1.207.673	1.261.305	1.348.777
VOLUME (Ribuan)														
Papua	287	318	526	906	1.997	3.467	2.240	5.254	7.274	8.558	7.565	5.269	5.771	6.254
Papua Pegunungan	18	19	26	61	36	41	52	369	259	55	72	104	165	327
Papua Selatan	48	51	78	139	76	198	859	525	1.723	1.508	2.149	2.352	816	1.366
Papua Tengah	75	113	139	252	356	488	518	675	999	1.296	1.361	1.367	2.051	2.376
TOTAL	428	501	769	1.358	2.465	4.194	3.670	6.822	10.255	11.417	11.146	9.091	8.804	10.323
MERCHANT (Ribuan)														
Papua	100	105	118	126	132	139	146	152	159	166	171	177	175	179
Papua Pegunungan	6	6	7	7	7	7	8	8	9	13	14	15	15	16
Papua Selatan	15	16	18	19	20	21	22	23	25	27	28	30	32	34
Papua Tengah	16	17	22	25	27	30	33	34	38	43	46	49	49	52
TOTAL	137	145	165	177	187	197	208	218	230	249	259	271	271	282

■ PERKEMBANGAN APMK

Nama Daerah	Triwulan / Tahun									
	TW I 2024	TW II 2024	TW III 2024	TW IV 2024	TW I 2025	TW II 2025	TW III 2025	TW IV 2025	TW I 2026	TW II 2026
Prov. Papua										
Jumlah Kartu ATM	2.042	2.838	3.262	3.559	3.807	4.117	4.782	5.827	6.115	6.483
Jumlah Kartu Debet	1.211.826	1.249.899	1.253.322	1.288.350	1.366.616	1.331.968	1.349.457	1.297.817	1.249.826	1.277.477
Jumlah Mesin ATM	608	623	621	505	505	502	500	510	508	501
Prov. Papua Pegunungan										
Jumlah Kartu ATM	234	76	142	182	204	290	393	552	579	518
Jumlah Kartu Debet	153.719	159.284	165.467	169.675	179.984	176.293	180.339	182.774	179.052	183.013
Jumlah Mesin ATM	68	69	70	53	53	53	53	55	55	55
Prov. Papua Selatan										
Jumlah Kartu ATM	146	142	249	312	378	491	696	918	1.109	797
Jumlah Kartu Debet	351.043	361.497	364.793	371.562	385.264	380.787	384.354	377.674	366.185	374.285
Jumlah Mesin ATM	122	128	129	123	123	124	125	127	127	128
Prov. Papua Tengah										
Jumlah Kartu ATM	1.338	1.046	1.060	1.103	1.153	1.254	1.420	1.755	1.826	1.959
Jumlah Kartu Debet	433.745	448.033	461.656	473.005	549.800	537.416	548.350	559.718	540.497	552.453
Jumlah Mesin ATM	248	255	256	203	204	206	206	210	210	210

■ PERKEMBANGAN SKNBI DAN RTGS MENURUT PROVINSI

Indikator	2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II
RTGS (Rp Miliar)						
Papua	3.175,39	4.817,41	7.394,36	8.351,28	2.566,00	4.129,06
Papua Pegunungan	40,06	66,48	295,17	644,51	97,33	108,32
Papua Selatan	1.623,39	1.760,26	1.521,99	1.785,05	2.030,55	1.694,38
Papua Tengah	298,15	173,07	212,33	228,56	402,43	327,97
Non-Wilker	87,26	91,77	53,42	153,86	104,39	129,46
TOTAL	5.224	6.909	9.477	11.163	5.201	6.389
KREDIT SKNBI (Rp Miliar)						
Papua	1.318,50	1.160,68	1.483,31	1.817,98	1.333,52	1.148,55
Papua Pegunungan	59,68	40,83	77,49	95,00	55,86	97,61
Papua Selatan	210,97	180,33	220,94	238,56	209,46	204,29
Papua Tengah	21,73	15,95	19,12	20,79	18,63	17,55
TOTAL	1.611	1.398	1.801	2.172	1.617	1.468
DEBIT SKNBI (Rp Miliar)						
Papua	461,72	420,84	446,95	453,34	455,16	366,39
RETURN SKNBI (Rp Miliar)						
Papua	14,73	7,58	8,40	3,31	10,87	6,17

■ PERKEMBANGAN INFLOW & OUTFLOW MENURUT WILAYAH KAS TITIPAN

Wilayah Kas	2024					2025					2026	
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II
NOMINAL (Rp Miliar)												
Wilayah Jayapura												
Infow	2.637,94	1.038,02	727,59	241,29	4.644,85	2.573,60	896,73	444,22	149,55	4.064,10	2.743,56	497,32
OutFlow	452,80	1.374,61	755,81	4.647,30	7.230,52	320,88	454,84	1.204,58	4.133,09	6.113,39	384,92	42,36
Net	2.185,14	-336,59	-28,21	-4.406,01	-2.585,68	2.252,72	441,89	-760,36	-3.983,54	-2.049,29	2.358,64	454,96
Wilayah Biak												
Infow	295,72	99,64	41,56	46,74	483,66	221,35	86,06	26,68	22,02	356,11	193,81	29,84
OutFlow	106,42	80,29	112,96	171,90	471,56	34,49	52,00	22,10	103,99	212,58	31,15	0,00
Net	189,30	19,35	-71,39	-125,16	12,10	186,86	34,06	4,58	-81,98	143,53	162,66	29,84
Wilayah Merauke												
Infow	408,82	223,31	279,59	100,35	1.012,07	399,38	227,50	194,15	69,17	890,20	417,56	67,48
OutFlow	153,69	360,29	321,19	596,98	1.432,13	155,21	257,03	318,03	599,41	1.329,68	170,50	30,15
Net	255,13	-136,97	-41,60	-496,62	-420,06	244,17	-29,53	-123,87	-530,24	-439,48	247,06	37,33
Wilayah Nabire												
Infow	594,18	233,77	307,19	82,48	1.217,63	496,38	239,97	144,35	77,19	957,89	475,32	47,91
OutFlow	251,60	243,53	270,40	665,38	1.430,91	129,94	178,94	426,17	831,39	1.566,44	51,13	35,20
Net	342,58	-9,76	36,79	-582,90	-213,28	366,44	61,03	-281,82	-754,20	-608,55	424,19	12,71
Wilayah Serui												
Infow	157,04	55,83	48,27	13,80	274,93	160,92	81,59	58,79	42,47	343,77	129,93	18,00
OutFlow	38,93	69,56	69,00	161,44	338,93	45,59	51,00	98,05	146,07	340,71	34,59	17,50
Net	118,11	-13,73	-20,73	-147,64	-64,00	115,33	30,59	-39,26	-103,60	3,06	95,34	0,50
Wilayah Timika												
Infow	558,93	285,46	212,53	117,24	1.174,16	569,42	211,63	228,09	161,75	1.170,88	524,19	79,94
OutFlow	159,84	247,35	292,87	460,58	1.160,64	123,30	170,08	253,60	384,76	931,74	76,17	31,50
Net	399,10	38,11	-80,34	-343,34	13,52	446,12	41,55	-25,51	-223,01	239,14	448,02	48,44
Wilayah Wamena												
Infow	216,14	140,26	100,16	107,54	564,11	280,98	48,09	49,89	3,65	382,61	215,29	51,87
OutFlow	182,24	192,88	159,18	484,27	1.018,57	50,26	121,53	183,47	345,87	701,13	102,45	11,41
Net	33,90	-52,62	-59,02	-376,73	-454,46	230,72	-73,44	-133,58	-342,22	-318,52	112,84	40,46
Total												
Infow	4.868,77	2.076,30	1.716,89	709,44	9.371,40	4.702,03	1.791,56	1.146,18	525,80	8.165,56	4.699,66	792,36
OutFlow	1.345,52	2.568,51	1.981,40	7.187,84	13.083,27	859,67	1.285,42	2.506,00	6.544,58	11.195,67	850,91	168,12
Net	3.523,25	-492,21	-264,51	-6.478,40	-3.711,87	3.842,36	506,14	-1.359,83	-6.018,78	-3.030,11	3.848,75	624,24

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Perekonomian Papua dan DOB pada triwulan II 2026 mayoritas melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Perlambatan tersebut disebabkan oleh perekonomian Papua Tengah yang masih mencatatkan kontraksi sebesar -15,44% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -8,38% (yoy).

Kontraksi yang lebih dalam pada triwulan II 2026 disebabkan oleh *high base effect* kinerja lapangan usaha (LU) pertambangan meski terjadi peningkatan produksi selama ramping up, pasca insiden bencana yang mengganggu mayoritas produksi. Di sisi lain, pertumbuhan sektor nontambang mengalami peningkatan sehingga menahan kontraksi kinerja perekonomian yang lebih dalam. Peningkatan kinerja sektor non-tambang bersumber dari LU konstruksi. Pada sisi pengeluaran, kontraksi perekonomian Papua disebabkan oleh kontraksi total ekspor LN dan antar daerah. Di sisi lain, peningkatan pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dibandingkan triwulan sebelumnya mendukung kinerja perekonomian.

Perkembangan Inflasi Daerah

Inflasi di Papua dan DOB pada triwulan II 2026 secara umum meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, kecuali Papua Selatan yang mencatat penurunan inflasi seiring kondisi cuaca yang lebih kondusif dan terjaganya pasokan pangan. Peningkatan inflasi tertinggi tercatat di Papua Pegunungan sebesar 7,84% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,14% (yoy). Peningkatan inflasi di Papua dan DOB terutama dipengaruhi oleh gejolak geopolitik global yang mendorong kenaikan harga emas perhiasan dan kondisi cuaca yang kurang kondusif yang membatasi produksi dan pasokan pangan lokal. Perkembangan tersebut tercermin pada peningkatan harga komoditas emas perhiasan dan sejumlah komoditas pangan hortikultura.

Sebagai bentuk mitigasi, penguatan kapasitas petani dalam menghadapi gangguan cuaca menjadi salah satu agenda prioritas TPID di Papua dan DOB, disertai upaya penguatan kemandirian pangan dan kelancaran distribusi untuk memastikan ketersediaan pangan lokal serta menjaga stabilitas harga.

Pembiayaan Daerah

Stabilitas Keuangan Daerah di Papua dan DOB pada triwulan II 2026 tetap terjaga tercermin dari NPL sebesar 2,45%, di bawah batas psikologis aman 5%. Sementara itu, penyaluran kredit perbankan pada triwulan laporan tumbuh sebesar 13,63% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 8,83% (yoy). Pertumbuhan kredit pada triwulan II 2026 didorong oleh pertumbuhan kredit investasi dan konsumsi yang masing-masing tumbuh sebesar 49,93% (yoy) dan 8,30% (yoy). Penyaluran kredit investasi utamanya didukung oleh kredit LU pertanian, perburuan, dan kehutanan yang tumbuh 89,62% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 57,76% (yoy).

Penghimpunan DPK pada triwulan II 2026 terkontraksi sebesar -0,24% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,42% (yoy). Kontraksi DPK utamanya didorong oleh terkontraksinya komponen giro sebesar -5,85% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 27,13% (yoy).

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Transaksi BI-RTGS di Papua dan DOB pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp6,4 triliun atau terkontraksi -7,52% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -0,45% (yoy). Sedangkan transaksi SKNBI tercatat sebesar Rp1,83 triliun atau

tumbuh sebesar 0,95% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,19% (yoy).

Penggunaan kartu debit di Papua dan DOB pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp19,13 triliun atau tumbuh 2,44% (yoy), berbalik arah dibandingkan dengan angka triwulan sebelumnya yang berkontraksi -1,68% (yoy). Selain itu, penggunaan kartu kredit tercatat sebesar Rp157 miliar atau tumbuh sebesar 11,42% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan angka triwulan sebelumnya yang tumbuh 50,22% (yoy).

Transaksi *e-commerce* di Papua dan DOB pada triwulan II 2026 tercatat Rp228,91 miliar atau tumbuh sebesar 5,00% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 33,86% (yoy). Sedangkan transaksi QRIS tercatat sebesar Rp1,35 triliun atau tumbuh 6,76% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,03% (yoy). Hal ini sejalan dengan jumlah merchant QRIS dan jumlah total pengguna QRIS yang tumbuh masing-masing sebesar 12,98% (yoy) dan 10,77% (yoy).

Aliran uang kartal melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua triwulan II 2026 menunjukkan posisi net inflow sebesar Rp129 miliar, di mana pada triwulan sebelumnya mengalami net inflow sebesar Rp4,21 triliun. Hal ini sejalan dengan normalisasi permintaan uang kartal pada triwulan II 2026 pasca periode HBKN Idul Fitri di triwulan I 2026.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Ketenagakerjaan wilayah Papua pada Mei 2026 masih didominasi oleh Lapangan Usaha (LU) Pertanian, terutama di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah dengan porsi masing-masing sebesar 91,62% dan 75,71% dari total tenaga kerja. Tingginya ketergantungan pada sektor pertanian tersebut sejalan dengan dominasi pekerja informal, khususnya di Papua Pegunungan yang mencapai 94,75%. Meskipun demikian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Papua Pegunungan tercatat paling rendah sebesar 1,86%, jauh di bawah Provinsi Papua yang mencatat TPT tertinggi sebesar 7,08%. Rendahnya TPT di wilayah Papua Pegunungan belum sepenuhnya mencerminkan kualitas pasar kerja yang memadai,

mengingat sebagian besar tenaga kerja masih bekerja pada sektor informal dengan produktivitas relatif rendah.

Berdasarkan data BPS Maret 2026, persentase penduduk miskin di wilayah Papua masih jauh lebih tinggi dibandingkan Nasional 8,07%. Provinsi Papua mencatat angka kemiskinan sebesar 18,39%, diikuti oleh Provinsi Papua Selatan dengan 18,54%, Provinsi Papua Pegunungan sebesar 26,24%, dan Provinsi Papua Tengah sebesar 30,41%. Rata-rata garis kemiskinan di provinsi Papua dan DOB berada relatif jauh di atas garis kemiskinan nasional, di mana garis kemiskinan makanan menjadi faktor pendorong utama.

Prospek Ekonomi Daerah

Perekonomian Papua dan DOB pada tahun 2026 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2025. Peningkatan kinerja perekonomian disebabkan oleh output sektor tambang yang diperkirakan lebih tinggi dibandingkan output tahun 2025, sejalan dengan perbaikan perekonomian Papua Tengah yang diperkirakan pada kisaran -3,4 s.d. -2,6% (yoy) membaik dibandingkan tahun 2025 yang mengalami kontraksi sebesar -21,80% (yoy). Pada tahun 2026, Provinsi Papua dan Papua Selatan juga diperkirakan akan tumbuh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sejalan dengan hal tersebut, pertumbuhan sektor nontambang juga diperkirakan menyumbang pertumbuhan pada perekonomian.

Pada sisi pengeluaran, ekspor Papua dan DOB diperkirakan masih tertahan seiring belum optimalnya salah satu blok tambang yang terdampak bencana. Aktivitas ekonomi masyarakat juga diperkirakan akan tumbuh seiring dengan diperolehnya stimulus melalui peningkatan UMP pada tahun 2026 sebagai salah satu faktor yang menopang konsumsi masyarakat.

Perkembangan inflasi secara agregat di Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan pada tahun 2026 diperkirakan berada pada sasaran inflasi nasional yaitu $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Hal ini didorong oleh peningkatan produktivitas petani lokal seiring dengan semakin kuatnya sinergi dan intensitas pelaksanaan pengendalian inflasi melalui TPID dan GPIPS.



BAB I

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

Perekonomian Papua dan DOB pada triwulan II 2026 mayoritas melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Perlambatan tersebut disebabkan oleh perekonomian Papua Tengah yang masih mencatatkan kontraksi sebesar -15,44% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -8,38% (yoy).

Kontraksi yang lebih dalam pada triwulan II 2026 disebabkan oleh *high base effect* kinerja lapangan usaha (LU) pertambangan meski terjadi peningkatan produksi selama *ramping up*, pasca insiden bencana yang mengganggu mayoritas produksi. Di sisi lain, pertumbuhan sektor nontambang mengalami peningkatan sehingga menahan kontraksi kinerja perekonomian yang lebih dalam. Peningkatan kinerja sektor non-tambang bersumber dari LU konstruksi. Pada sisi pengeluaran, kontraksi perekonomian Papua disebabkan oleh kontraksi total ekspor LN dan antar daerah. Di sisi lain, peningkatan pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dibandingkan triwulan sebelumnya mendukung kinerja perekonomian.

Tabel 1.1 Perkembangan PDRB Papua dan DOB

No	Rincian PDRB Tiap Provinsi	2023					2024					2025					2026	
		I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II
A.	PROVINSI PAPUA																	
	PDRB ADHK (Rp Miliar)	11.939	12.274	12.408	12.930	49.550	12.588	12.807	12.909	13.283	51.587	13.080	13.262	13.452	13.840	53.635	13.729	13.858
	Pertumbuhan PDRB (%yoy)	4,45	4,54	3,54	4,37	4,22	5,44	4,34	4,04	2,73	4,11	3,91	3,55	4,21	4,20	3,97	4,96	4,49
	Pertumbuhan PDRB (%qtq)	-3,63	2,81	1,09	4,21	n/a	-2,64	1,74	0,80	2,89	n/a	-1,53	1,39	1,44	2,88	n/a	-0,80	0,94
B.	PROVINSI PAPUA TENGAH																	
	PDRB ADHK (Rp Miliar)	21.474	24.975	26.351	28.267	101.066	27.544	25.968	26.231	25.729	105.472	20.513	23.390	22.000	16.572	82.475	18.794	19.779
	Pertumbuhan PDRB (%yoy)	-7,70	3,24	12,22	15,59	5,95	28,27	3,98	-0,45	-8,98	4,36	-25,53	-9,93	-16,13	-35,59	-21,80	-8,38	-15,44
	Pertumbuhan PDRB (%qtq)	-3,18	2,03	0,48	3,07	n/a	-2,38	3,44	1,14	1,20	n/a	-3,28	3,40	1,89	2,73	n/a	-3,22	5,24
C.	PROVINSI PAPUA SELATAN																	
	PDRB ADHK (Rp Miliar)	4.343	4.456	4.541	4.798	18.138	4.651	4.730	4.784	4.896	19.062	4.831	4.876	4.940	5.060	19.707	5.021	5.145
	Pertumbuhan PDRB (%yoy)	2,83	3,21	3,68	7,05	4,23	7,10	6,15	5,35	2,04	5,09	3,86	3,08	3,25	3,35	3,39	3,93	5,51
	Pertumbuhan PDRB (%qtq)	-3,11	2,61	1,91	5,66	n/a	-3,07	1,70	1,14	2,34	n/a	-1,34	0,94	1,30	2,45	n/a	-0,79	2,47
D.	PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN																	
	PDRB ADHK (Rp Miliar)	3.194	3.268	3.271	3.440	13.173	3.353	3.464	3.450	3.531	13.799	3.455	3.573	3.600	3.688	14.316	3.576	3.692
	Pertumbuhan PDRB (%yoy)	5,38	6,34	3,15	4,33	4,78	5,01	5,98	5,48	2,66	4,75	3,02	3,17	4,34	4,42	3,75	3,51	3,30
	Pertumbuhan PDRB (%qtq)	-3,14	2,34	0,07	5,17	n/a	-2,51	3,29	-0,40	2,36	n/a	-2,17	3,44	0,74	2,44	n/a	-3,03	3,22

Sumber : BPS, diolah

1.1 KONDISI UMUM TRIWULAN II 2026

1.1.1 Provinsi Papua

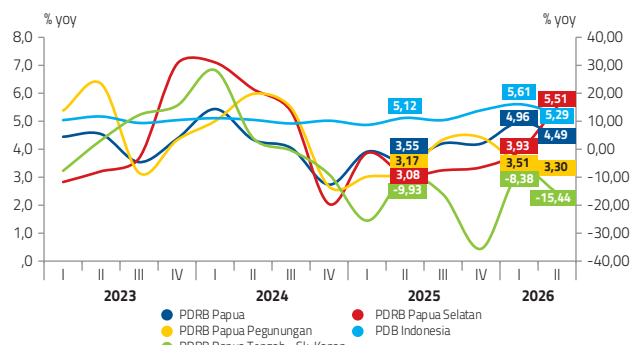
Perekonomian Provinsi Papua pada Triwulan II 2026 tumbuh sebesar 4,49% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,96% (yoy). Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut terutama disebabkan oleh perlambatan kinerja Lapangan Usaha (LU) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, serta Perdagangan Besar dan Eceran. Perlambatan LU pertanian disebabkan oleh peningkatan intensitas El Nino menjadi kuat dari moderat (BMKG) yang menyebabkan menurunnya produksi tanaman pangan. Sementara itu, melambatnya LU perdagangan Besar dan Eceran disebabkan oleh normalisasi konsumsi masyarakat setelah konsumsi yang tinggi pada triwulan sebelumnya seiring adanya HBKN.

Pada sisi pengeluaran, perlambatan ekonomi Papua pada triwulan II 2026 terutama disebabkan oleh perlambatan konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Konsumsi rumah tangga melambat antara lain sejalan dengan meningkatnya DPK khususnya pada komponen tabungan yang menunjukkan kecenderungan rumah tangga untuk mengurangi porsi konsumsi. Di sisi lain, perbaikan PMTB menahan perlambatan pertumbuhan ekonomi lebih dalam. Perbaikan PMTB antara lain sejalan

dengan terus berlangsungnya program pemerintah seperti pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di beberapa titik di Provinsi Papua.

1.1.2 Provinsi Papua Tengah

Perekonomian Papua Tengah mengalami kontraksi yang lebih dalam pada triwulan II 2026. Perekonomian Papua Tengah pada triwulan II 2026 berkontraksi sebesar -15,44% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar -8,38% (yoy). Perekonomian Papua Tengah pada triwulan II 2026 lebih rendah dibandingkan nasional yang tumbuh sebesar



Sumber : BPS, diolah.

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Dengan dan Tanpa Tambang

5,29% (yoy). (Grafik 1.1). Perlambatan perekonomian pada triwulan II 2026 utamanya disebabkan oleh LU pertambangan dan penggalian yang belum sepenuhnya pulih pasca gangguan produksi akibat insiden *wet mud rush* pada awal September 2025, hal ini menyebabkan LU pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi -22,72% (yoy). Gangguan produksi terjadi di blok tambang Grasberg Block Cave (GBC) yang secara rata – rata berkontribusi sekitar 65% dari total produksi. Pada triwulan II 2026, tingkat penggilingan bijih mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya meskipun masih lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan triwulan, produksi tembaga dan emas masing-masing terkontraksi sebesar -42,90 % (yoy) dan -40,84% (yoy).

Perlambatan kinerja ekonomi Provinsi Papua Tengah lebih lanjut disebabkan oleh perlambatan LU Administrasi Pemerintah, serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Hal ini sejalan dengan perlambatan realisasi belanja daerah dan menurunnya pertumbuhan hasil produksi padi di triwulan II menjadi 19,50% (yoy) dari 53,60% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

Pada sisi pengeluaran, perlambatan ekonomi Papua Tengah bersumber dari perlambatan ekspor, konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Perlambatan ekspor sejalan dengan *high base effect* sehingga pertumbuhan ekspor melambat. Konsumsi rumah tangga melambat antara lain sejalan dengan meningkatnya DPK khususnya pada komponen tabungan yang menunjukkan kecenderungan rumah tangga untuk mengurangi porsi konsumsi. Di sisi lain, perbaikan PMTB menahan perlambatan ekonomi lebih dalam. Perbaikan PMTB sejalan dengan proses perbaikan produksi pada sektor tambang yang terus berlangsung.

1.1.3 Provinsi Papua Selatan

Perekonomian Provinsi Papua Selatan pada Triwulan II 2026 tumbuh sebesar 5,51% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,93% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Papua Selatan terutama didorong oleh kinerja LU Konstruksi, Pertanian, serta Administrasi Pemerintahan. LU konstruksi masih menjadi kontributor utama perekonomian Papua

Selatan yang ditopang pembangunan dan perluasan perkebunan tebu, pembangunan jalan dan jembatan di Merauke, serta pembangunan hotel. Sementara itu, LU pertanian tetap tumbuh secara tahunan meskipun menghadapi tantangan berupa gagal panen akibat serangan hama maupun naiknya intensitas El Nino.

Pada sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Papua Selatan didukung oleh peningkatan PMTB, konsumsi rumah tangga, dan konsumsi pemerintah. PMTB meningkat seiring terakselerasinya pembangunan dan perluasan perkebunan tebu. Sejalan dengan hal tersebut, konsumsi rumah tangga meningkat sejalan dengan meningkatnya aktivitas Pertanian yang merupakan pekerjaan mayoritas masyarakat.

1.1.4 Provinsi Papua Pegunungan

Perekonomian Provinsi Papua Pegunungan pada Triwulan II 2026 tumbuh sebesar 3,30% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,51% (yoy). Perlambatan Pertumbuhan ekonomi Papua Pegunungan terutama disebabkan oleh kinerja LU Pertanian dan LU Administrasi Pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh melambatnya realisasi belanja daerah dan menurunnya hasil panen yang disebabkan oleh peningkatan intensitas El Nino menjadi kuat dari moderat yang menyebabkan menurunnya produksi tanaman pangan.

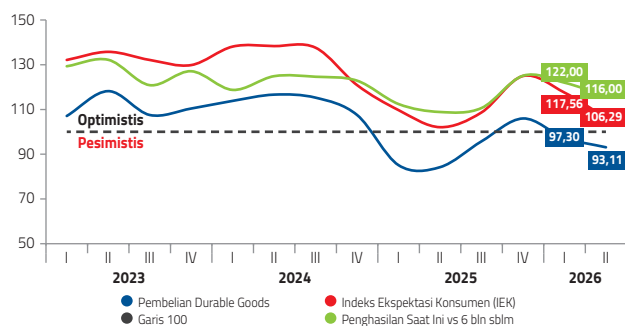
Pada sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Papua Pegunungan yang melambat disebabkan oleh melambatnya realisasi belanja dari pemerintah daerah pada triwulan II 2026. Di sisi lain, PMTB meningkat seiring pembangunan fasilitas pemerintahan dan pembangunan infrastruktur jalan yang terus berlangsung di wilayah Papua Pegunungan.

1.2 PERTUMBUHAN EKONOMI DARI SISI PERMINTAAN

1.2.1 Konsumsi Rumah Tangga

Realisasi Triwulan II 2026

Konsumsi RT pada triwulan II 2026 tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Provinsi Papua Pegunungan

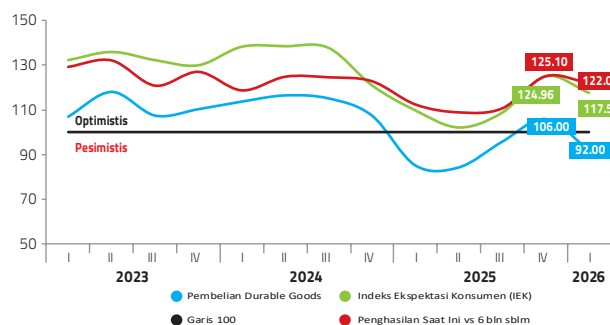


Sumber : Survei Konsumen, Bank Indonesia, diolah.

Grafik 1.2 Perkembangan Survei Konsumen

sebesar 3,47% (yoy), diikuti Provinsi Papua Selatan sebesar 3,35% (yoy), Provinsi Papua Tengah sebesar 3,17% (yoy), dan Provinsi Papua sebesar 2,91% (yoy). Laju pertumbuhan yang melambat selaras dengan sentimen konsumsi masyarakat yang melambat meskipun masih di tingkat optimis; perlambatan konsumsi masyarakat disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) Rumah Tangga, utamanya komponen tabungan yang menunjukkan kecenderungan RT untuk mengurangi porsi konsumsi.

Laju perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga sejalan dengan hasil Survei Konsumen (SK), di mana Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat sebesar 104,59 yang menurun dari 113,41, indeks kondisi ekonomi saat ini (IKE) tercatat sebesar 102,89 yang menurun dari 109,26 dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) sebesar 106,29 yang menurun dari 117,56 meskipun ketiganya masih berada di atas 100 yang menunjukkan optimisme terhadap kondisi perekonomian.



Sumber : Survei Konsumen, Bank Indonesia, diolah.

Grafik 1.3 Perkembangan Kredit Konsumsi

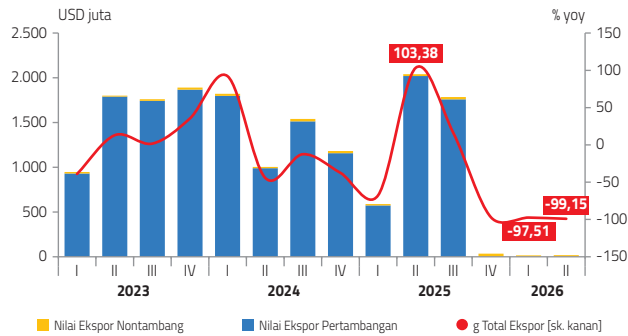
Perlambatan konsumsi rumah tangga terindikasi melalui perlambatan pertumbuhan nominal dan volume penggunaan kartu kredit pada triwulan II 2026. Nilai transaksi penggunaan kartu kredit tumbuh 11,42% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 50,22% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, secara volume transaksi penggunaan kartu kredit tumbuh 30,31% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 47,00% (yoy). Sekitar Rp154,92 miliar atau 98,26% dari nilai nominal transaksi penggunaan kartu kredit merupakan transaksi belanja.

1.2.2 Konsumsi Pemerintah

Realisasi Triwulan II 2026

Konsumsi pemerintah pada triwulan II 2026 tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan konsumsi pemerintah tertinggi dicapai oleh Provinsi Papua sebesar 5,90% (yoy), diikuti Provinsi Papua Selatan sebesar 5,06% (yoy), Provinsi Papua Tengah sebesar 2,51% (yoy), dan Provinsi Papua Pegunungan sebesar -0,47% (yoy). Secara agregat empat provinsi, konsumsi pemerintah pada triwulan II 2026 tumbuh 4,08% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,97% (yoy). Hal ini antara lain disebabkan oleh lebih rendahnya pagu anggaran dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Di sisi lain, pertumbuhan konsumsi pemerintah yang tetap positif pada triwulan II 2026 sejalan dengan realisasi belanja APBN lingkup Papua dan DOB yang tumbuh sebesar 4,96% (yoy) dengan realisasi mencapai Rp24,51 triliun pada triwulan II 2026. Realisasi belanja APBN telah mencapai 41,54% dari pagu tahun 2026 lebih tinggi dibandingkan tahun 2025 yang hanya sebesar 36,24% dari pagu. Pertumbuhan belanja APBN terutama bersumber dari belanja pegawai yang tumbuh sebesar 29,14% (yoy) dengan total realisasi Rp3.674,43 miliar. Penyerapan realisasi belanja pegawai mencapai 64,32% dari pagu dan lebih tinggi dibandingkan penyerapan tahun sebelumnya sebesar 49,41% dari pagu. Sejalan dengan itu, belanja barang tumbuh sebesar 49,60% (yoy). Realisasi belanja barang pada periode laporan mencapai Rp2.462,99 miliar. Serapan belanja modal pada triwulan II 2026 mencapai 30,21% dari pagu,



Sumber: Bea dan Cukai, diolah.

Grafik 1.4 Ekspor Non Migas

meningkat dibandingkan serapan tahun sebelumnya sebesar 19,05% dari pagu.

1.2.3 Total Ekspor dan Impor

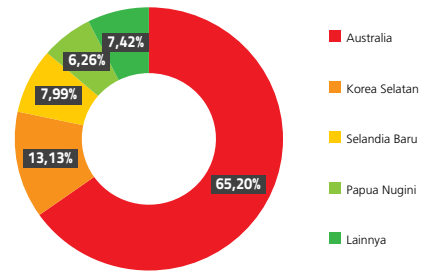
Realisasi Triwulan II 2026

Total ekspor pada triwulan II 2026 tercatat berkontraksi dan berbalik arah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Secara spasial, pertumbuhan ekspor tertinggi dicapai oleh Provinsi Papua Selatan sebesar 8,61% (yoy), diikuti Provinsi Papua Pegunungan sebesar 1,19% (yoy), Provinsi Papua yang berkontraksi sebesar -1,73% (yoy), dan Provinsi Papua Tengah yang berkontraksi sebesar -25,69% (yoy).

Secara agregat empat provinsi, penurunan ekspor luar negeri tercermin pada Ekspor luar negeri wilayah Papua pada triwulan II 2026 yang mengalami kontraksi sebesar -96,98% (yoy) disebabkan oleh berakhirnya kebijakan relaksasi ekspor konsentrat tembaga pada awal September 2025 dan tidak mengalami perpanjangan (Grafik 1.4).

Tingkat penggilingan pada triwulan II 2026 mengalami peningkatan hingga berada di level 131.100 metrik ton per hari, membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berada di level 66.800 metrik ton per hari, kondisi ini turut mendukung kinerja ekspor antar daerah sehingga menahan kontraksi total ekspor lebih lanjut.

Sementara itu, nilai ekspor nontambang Papua dan DOB pada triwulan II 2026 mencapai 17,44 juta dolar

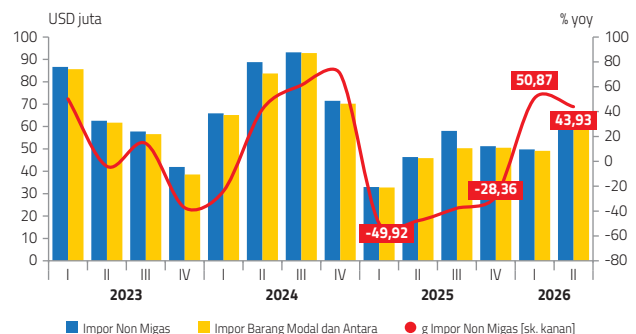


Sumber: Bea dan Cukai, diolah.

Grafik 1.5 Tujuan Ekspor Non Migas

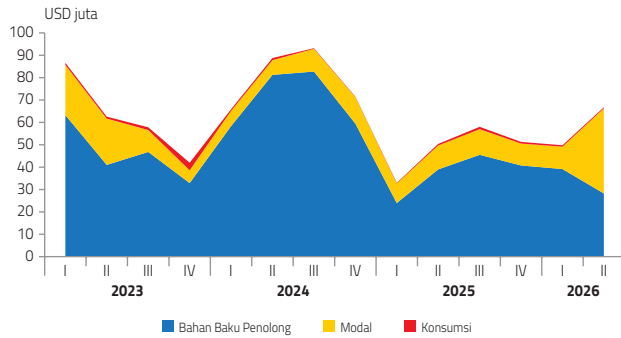
AS, berkontraksi sebesar -16,43% (yoy) lebih dalam dibanding triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar -3,64%(yoy). Ekspor nontambang Papua dengan pangsa terbesar (91,14%) merupakan komoditas kayu olahan (kode HS 44). Negara tujuan utama ekspor komoditas kayu olahan adalah Australia, Korea Selatan, dan Arab Saudi dengan pangsa masing-masing sebesar 70,55%, 14,41%, dan 3,34% dari total ekspor kayu olahan triwulan II 2026.

Sementara itu, total impor pada triwulan II 2026 tumbuh melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Secara spasial, pertumbuhan impor tertinggi dicapai oleh Provinsi Papua Tengah sebesar 169,60% (yoy), diikuti Provinsi Papua Selatan sebesar 4,79% (yoy), Provinsi Papua Pegunungan sebesar 3,41% (yoy), dan Provinsi Papua yang berkontraksi sebesar -0,64% (yoy).



Sumber: Bea dan Cukai, diolah.

Grafik 1.6 Perkembangan Impor Nonmigas



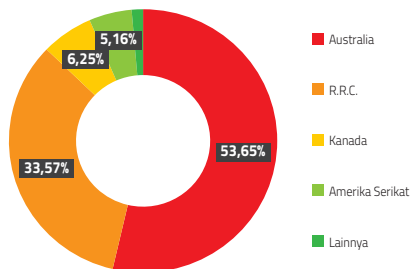
Sumber: Bea dan Cukai, diolah.

Grafik 1.7 Import Nonmigas Berdasarkan Jenis

Kinerja komponen PDRB impor luar negeri pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 18,38% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 33,46% (yoy) yang disebabkan oleh *highbase effect*. Sementara itu, data Bea Cukai menunjukkan nilai impor nonmigas pada triwulan II 2026 mencapai 66,73 juta dolar AS, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 49,79 juta dolar AS (Grafik 1.6).

Impor luar negeri Papua dan DOB pada triwulan II 2026 didominasi oleh impor barang modal, dengan kontribusi mencapai 56,96%, diikuti dengan impor bahan baku yang mencapai 42,31% terhadap total impor nonmigas (Gambar 1.7). Berdasarkan asal negaranya, impor Papua didominasi dari Australia dan Tiongkok dengan pangsa masing – masing sebesar 53,65% dan 33,57% (Grafik 1.8).

Impor nonmigas Papua dan DOB yang terkonsentrasi di Pelabuhan Amamapare Timika (98% dari total impor



Sumber: Bea dan Cukai, diolah.

Grafik 1.8 Negara Asal Impor Non Migas

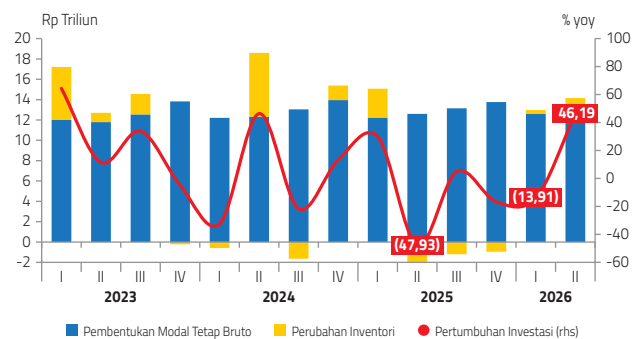
Papua dan DOB) sebagian besar berupa mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (kode HS 85); mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya (kode HS 84); bahan peledak, korek api dan kembang api (kode HS 36) dan barang dari besi dan baja (kode HS 73). Impor tersebut terutama digunakan dalam proses produksi dan kegiatan pertambangan bijih tembaga serta kegiatan eksplorasi perusahaan tambang di Timika.

1.2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Realisasi Triwulan II 2026

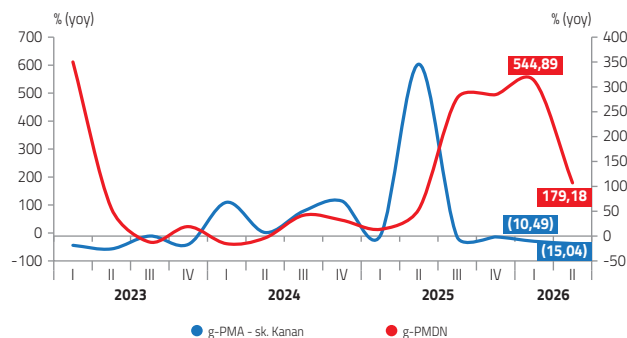
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) agregat Papua dan DOB pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 5,55% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,94% (yoy) (Grafik 1.9). **Pertumbuhan PMTB tertinggi dicapai oleh Provinsi Papua Selatan sebesar 12,84% (yoy), diikuti Provinsi Papua Pegunungan sebesar 6,42% (yoy), Provinsi Papua sebesar 6,34% (yoy), dan Provinsi Papua Tengah yang sebesar 2,02% (yoy).**

Secara agregat, laju PMTB yang meningkat sejalan dengan pertumbuhan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 179,18% (yoy), sementara Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya dengan mencatatkan kontraksi sebesar -15,04% (yoy) (Grafik 1.10). Realisasi PMA pada triwulan II 2026 mencapai 400,06 juta dolar AS, sekitar 383,33 juta dolar AS atau 95,58% dari total PMA di Papua dan DOB direalisasikan di Papua Tengah utamanya pada LU pertambangan dan penggalian. Realisasi investasi pada



Sumber: BPS, diolah.

Grafik 1.9 Perkembangan PDRB Investasi Papua

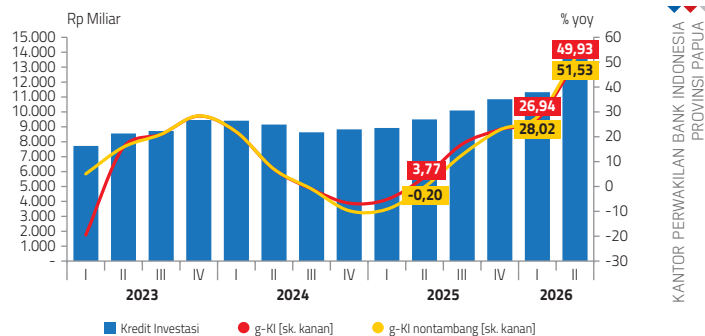


Sumber: BKPM, diolah.

Grafik 1.10 Perkembangan PMA dan PMDN

LU pertambangan dan penggalian berkaitan dengan pengembangan tambang bawah tanah di Tembagapura yang terus berlangsung. Sementara itu, realisasi investasi sektor sekunder PMA pada triwulan II 2026 didominasi LU industri pengolahan mencapai 2,30 juta dolar AS. PMA umumnya berkaitan dengan industri perkebunan tebu dan industri gula di Papua Selatan. Realisasi PMA untuk sektor sekunder dan tersier sepanjang triwulan II 2026 mencapai 3,18 juta dolar AS dan 6,08 juta dolar AS.

Secara agregat, realisasi investasi PMDN pada triwulan II 2026 mencapai Rp3,89 triliun meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp2,75 triliun. PMDN terkonsentrasi pada LU Pertanian, kehutanan, dan perikanan, dengan nilai investasi sebesar Rp 1,84 triliun. Proyek perkebunan kelapa sawit dan bioetanol di Provinsi Papua Selatan merupakan beberapa proyek yang memiliki andil investasi tertinggi dalam PMDN sektor primer tersebut.



Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia, diolah.

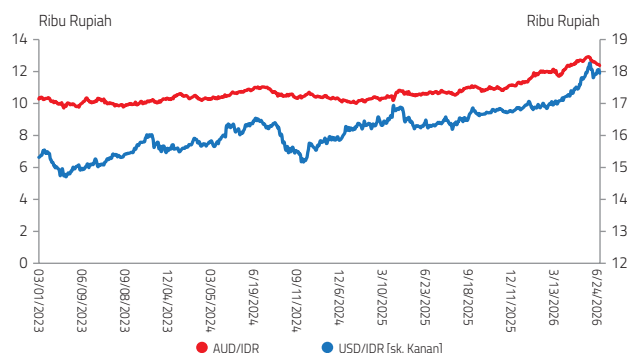
Grafik 1.12 Perkembangan Kredit Investasi

Secara spasial, PMDN tersebar di empat provinsi, dengan jumlah investasi terbesar di Provinsi Papua Selatan mencapai Rp3,71 triliun dengan pangsa 95,57% dan Provinsi Papua sebesar Rp121,90 miliar dengan pangsa 3,14%. LU dengan penyaluran investasi PMDN terbesar di Provinsi Papua Selatan adalah LU pertanian, kehutanan, dan perikanan, dengan pangsa 48,68% atau sebesar Rp1,81 triliun. PMDN Provinsi Papua didominasi LU pertanian, kehutanan, dan perikanan serta LU perdagangan dengan pangsa masing – masing sebesar 26,89% dan 26,58%.

Laju PMTB yang meningkat selaras dengan perkembangan kredit investasi. Penyaluran kredit investasi Papua dan DOB pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 49,93% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 26,94% (yoy) (Grafik 1.12).

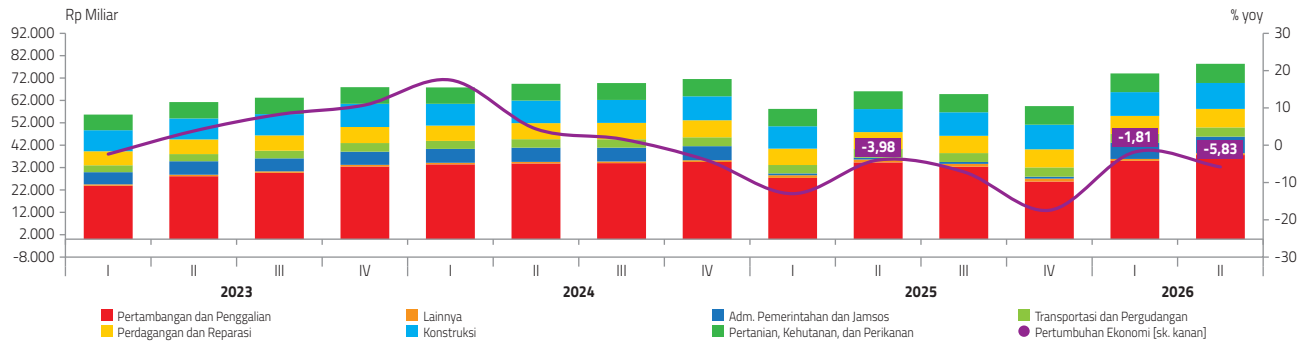
1.3 PERTUMBUHAN EKONOMI DARI SISI LAPANGAN USAHA

Kontraksi perekonomian Papua dan DOB pada triwulan II 2026 disebabkan oleh kinerja sektor utama yang memiliki kontribusi terbesar, yaitu LU pertambangan dan penggalian yang masih mengalami kontraksi, serta LU perdagangan besar dan eceran yang menunjukkan perlambatan laju pertumbuhan. Di sisi lain, peningkatan laju pertumbuhan LU konstruksi didukung oleh realisasi investasi di beberapa daerah mampu menahan kontraksi perekonomian yang lebih dalam. Pembahasan lebih lanjut akan difokuskan pada empat LU dengan andil perekonomian terbesar yaitu LU pertambangan, LU konstruksi, LU pertanian dan LU perdagangan.



Sumber: JISDOR, Bank Indonesia.

Grafik 1.11 Perkembangan Nilai Tukar



Sumber : BPS, diolah.

Grafik 1.13 Perkembangan PDRB Sisi Lapangan Usaha

1.3.1 Pertambangan dan Penggalian

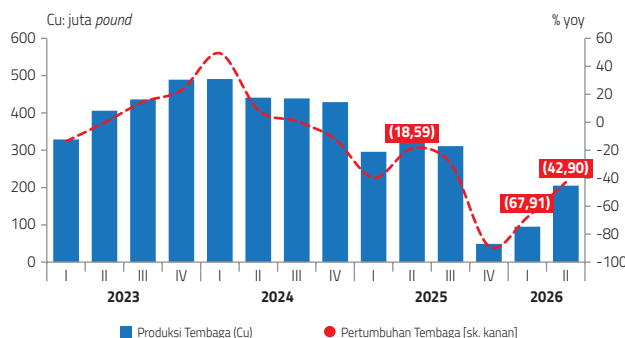
Realisasi Triwulan II 2026

LU pertambangan dan penggalian masih mengalami kontraksi akibat gangguan produksi pada perusahaan tambang. Secara spasial, kontraksi terdalam terjadi di Provinsi Papua Tengah sebesar -22,72% (yoy), sedangkan Provinsi Papua Pegunungan mengalami pertumbuhan 4,24% (yoy), diikuti Provinsi Papua Selatan sebesar 3,24% (yoy) dan Provinsi Papua sebesar 2,83% (yoy). Secara agregat, LU pertambangan terkontraksi sebesar -22,38% (yoy), lebih dalam dari kontraksi triwulan sebelumnya sebesar -13,36% (yoy).

Terkontraksinya kinerja LU pertambangan triwulan II 2026 merupakan dampak lanjutan bencana *wet mud rush* yang menyebabkan kontraksi produksi tembaga dan emas. Berdasarkan laporan resmi perusahaan tambang, tingkat penggilingan bijih pada

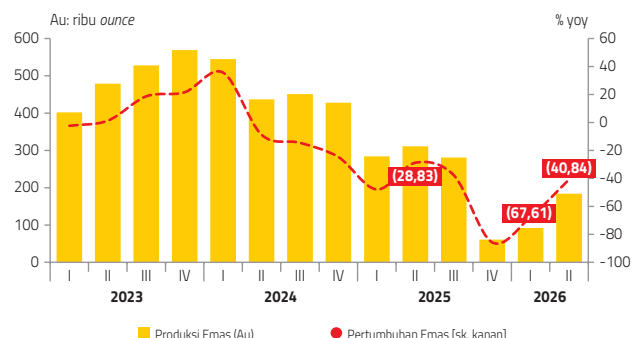
triwulan II 2026 mencapai 131,1 ribu metrik ton bijih tembaga per hari, atau mengalami kontraksi -28,16% (yoy), yang membaik dari kontraksi triwulan sebelumnya sebesar -58,66% (yoy). Di sisi lain, *ore grade* emas dan tembaga mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. *Ore grade* emas pada triwulan II 2026 sebesar 0,62 gram/metrik ton meningkat dari 0,48 gram/metrik ton pada triwulan sebelumnya. *Ore grade* emas di bawah level 1 gram/metrik ton berlangsung sejak triwulan II 2024.

Terus berlanjutnya *ramping up* mendukung perbaikan produksi tembaga dan emas dibandingkan periode sebelumnya di tengah kadar bijih yang masih rendah. Produksi tembaga pada triwulan II 2026 mencapai 205 juta pound, terkontraksi hingga -42,90% (yoy), membaik dibandingkan produksi triwulan sebelumnya sebesar 95 juta pound (Grafik 1.14). Demikian juga produksi emas pada triwulan II 2026 mencapai 184 ribu ons atau terkontraksi



Sumber : Freeport-McMoRan, diolah.

Grafik 1.14 Perkembangan Produksi Tembaga



Sumber : Freeport-McMoRan, diolah.

Grafik 1.15 Perkembangan Produksi Emas



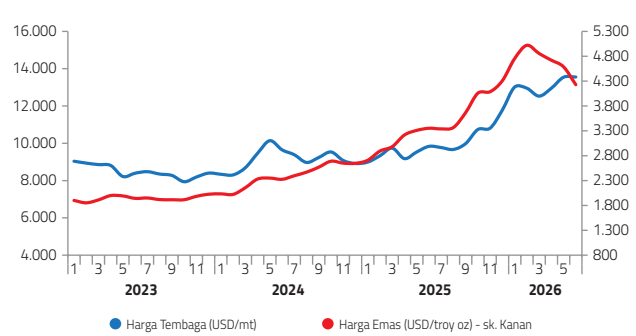
Sumber : Freeport-McMoRan, diolah.

Grafik 1.16 Perkembangan Penjualan Tembaga

-40,84% (yoy), lebih tinggi dibandingkan produksi triwulan sebelumnya sebesar 92 ribu ons (Grafik 1.15).

Selaras dengan peningkatan produksi, kinerja penjualan tembaga juga mengalami peningkatan pada triwulan II 2026. Perusahaan tambang membukukan penjualan tembaga sebesar 153 juta ons, atau berkontraksi -65,46% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar -71,72% (yoy) (Grafik 1.16). Di sisi lain, penjualan emas tercatat mencapai 118 ribu ons atau berkontraksi -77,22% (yoy), lebih dalam dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar -7,20% (yoy) (Grafik 1.17). Hal ini disebabkan oleh hasil produksi masih dalam tahap pengolahan dan belum terjual.

Di sisi lain, harga rata-rata tembaga dunia pada triwulan II 2026 mencapai 13,349 ribu dollar AS, meningkat dibandingkan harga triwulan sebelumnya sebesar 12,831 ribu dollar AS. Jika dibandingkan



Sumber : World Bank, diolah.

Grafik 1.18 Perkembangan Harga Tembaga dan Emas Dunia (dolar AS)

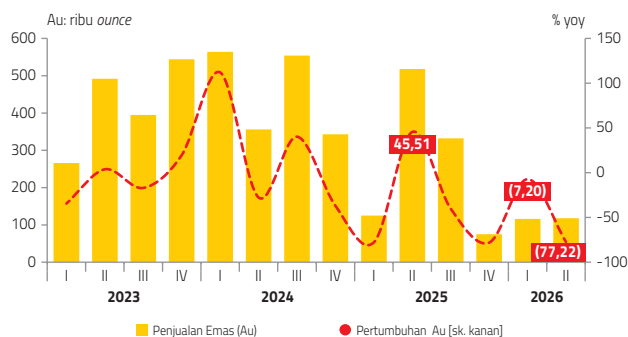
dengan periode yang sama pada tahun 2025, harga rata-rata tembaga meningkat sebesar 40,29% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 37,17% (yoy) (Grafik 1.18). Kenaikan signifikan harga tembaga global turut dipengaruhi oleh belum optimalnya produksi di perusahaan tambang di Papua Tengah.

Di sisi lain, harga emas global terkoreksi menjadi 4,512 ribu dollar AS per oz atau 37,01% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya pada harga 4,876 ribu dollar AS per oz dengan pertumbuhan sebesar 70,34% (yoy).

1.3.2 Konstruksi

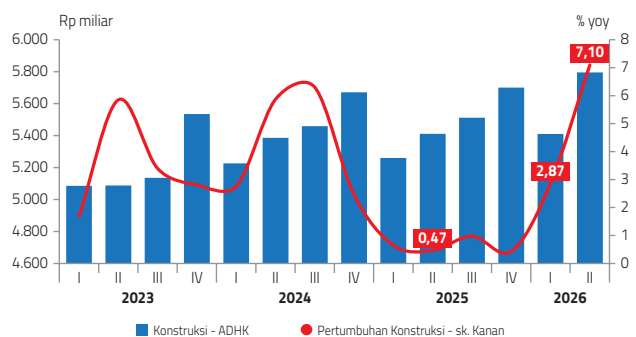
Realisasi Triwulan II 2026

LU konstruksi mencatatkan laju pertumbuhan yang lebih tinggi pada triwulan II 2026. Secara agregat, LU



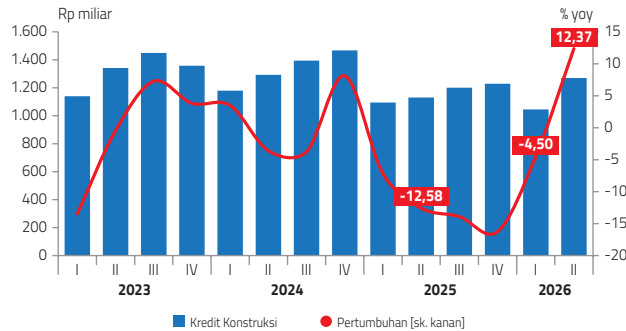
Sumber : Freeport-McMoRan, diolah.

Grafik 1.17 Perkembangan Penjualan Emas



Sumber : BPS, diolah.

Grafik 1.19 Perkembangan PDRB Konstruksi

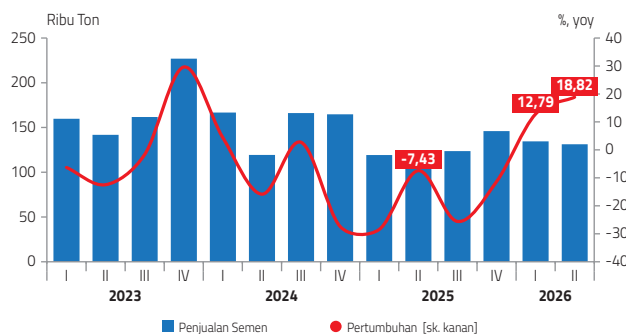


Sumber : Laporan Bank Umum, Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.20 Perkembangan Kredit Konstruksi Papua

konstruksi tumbuh 7,10% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,87% (yoy). Secara spasial, meningkatnya pertumbuhan LU konstruksi didukung oleh peningkatan pertumbuhan LU konstruksi Provinsi Papua Selatan yang tumbuh sebesar 12,28% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya; diikuti Provinsi Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah yang mengalami peningkatan pertumbuhan masing-masing sebesar 7,94% (yoy), 7,01% (yoy), dan 1,79% (yoy). Pada triwulan II 2026, penjualan semen di Papua dan DOB tumbuh 18,82% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,79% (yoy) (Grafik 1.21).

Adapun sarana dan prasarana yang terus dibangun di DOB Papua antara lain pembangunan kawasan sentra produksi pertanian, perumahan ASN, rumah sakit, serta infrastruktur dasar lainnya. Pada Provinsi Papua Tengah terdapat proyek pengembangan tambang bawah tanah,



Sumber : BPS, diolah

Grafik 1.21 Perkembangan Penjualan Semen

sementara Papua Selatan terdapat pembangunan pabrik gula dan bioetanol di Merauke serta kawasan sentra produksi pangan, terus berlangsungnya pembangunan Jalan Trans Papua untuk mendorong peningkatan akses dan mobilitas di Papua dan Papua Pegunungan serta konstruksi untuk pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan.

Di sisi lain, kredit LU konstruksi di Papua dan DOB pada triwulan II 2026 tercatat tumbuh sebesar 12,37% (yoy) berbalik arah dibandingkan konstruksi pada triwulan sebelumnya sebesar -4,50% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, Kredit Investasi konstruksi pada triwulan II 2026 tercatat tumbuh sebesar 39,75% (yoy) berbalik arah dibandingkan periode sebelumnya yang terkontraksi sebesar -21,26% (yoy).

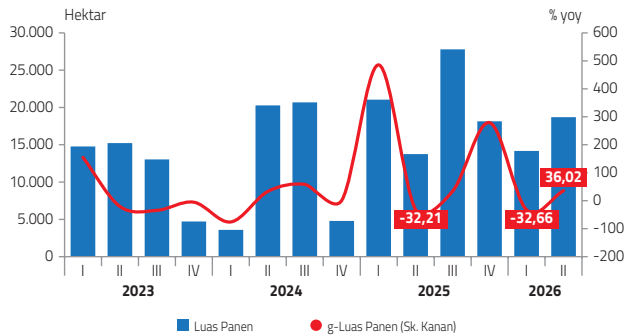
1.3.3 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Realisasi Triwulan II 2026

LU pertanian, kehutanan, dan perikanan agregat Papua dan DOB pada triwulan II 2026 tetap stabil.

LU pertanian, kehutanan, dan perikanan agregat Papua dan DOB tumbuh sebesar 3,77% (yoy), relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,78% (yoy). Kinerja pada triwulan II 2026 tersebut masih tertahan oleh kondisi cuaca yang kurang kondusif di Papua dan DOB sehingga memengaruhi produktivitas pertanian, khususnya komoditas padi dan sayuran. Secara spasial, perlambatan pertumbuhan terutama disebabkan oleh Provinsi Papua sebagai salah satu sentra pertanian yang mengalami penurunan laju pertumbuhan di triwulan II 2026 sebesar 3,06% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,15% (yoy); diikuti Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan yang mengalami perlambatan pertumbuhan masing-masing sebesar 3,38% (yoy) dan 5,83% (yoy). Sementara itu Papua Tengah justru mencatat pertumbuhan sebesar 4,13% (yoy) yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,76% (yoy).

Hal ini sejalan dengan data luas panen padi Provinsi Papua yang mengalami kontraksi sebesar -10,35% (yoy), selaras dengan produksi padi yang mengalami kontraksi sebesar -10,15% (yoy), namun secara agregat luas panen padi tumbuh sebesar 36,02% (yoy) didukung oleh luas panen



Sumber: BPS, diolah

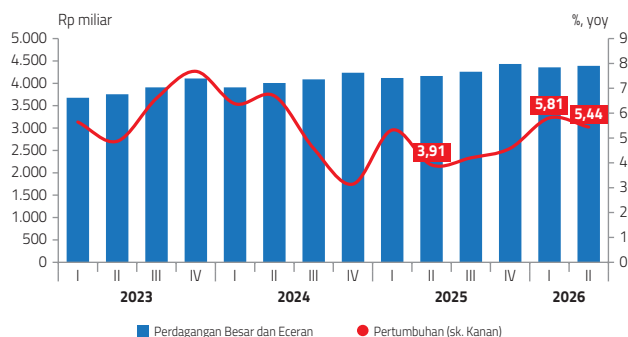
Grafik 1.22 Luas Panen Padi di Papua

padi Provinsi Papua Selatan yang tumbuh sebesar 36,76% (yoy) berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi -34,04% (yoy) (Grafik 1.22).

1.3.4 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

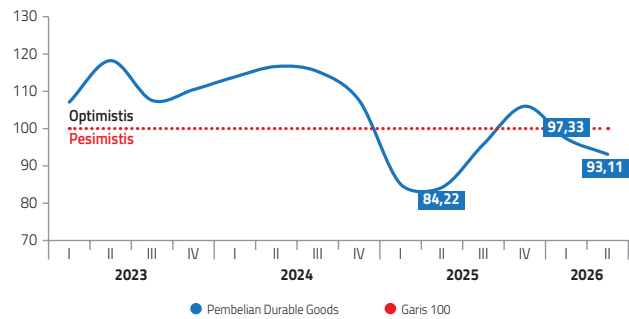
Realisasi Triwulan II 2026

Kinerja LU perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor agregat Papua dan DOB pada triwulan II 2026 melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan LU pada triwulan II 2026 sebesar 5,44% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,81% (yoy) (Grafik 1.23). Secara spasial, Provinsi Papua dan Provinsi Selatan menunjukkan kinerja sektoral pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi terjadi di Provinsi Papua Tengah sebesar 9,47% (yoy), diikuti Provinsi Papua Pegunungan sebesar 5,09%



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.23 Perkembangan PDRB Perdagangan

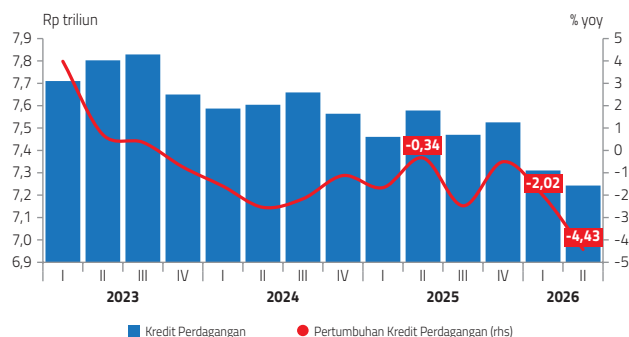


Sumber: SK, Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.24 Perkembangan Indeks Pembelian Barang Tahan Lama

(yoy), Provinsi Papua sebesar 4,10% (yoy), dan Provinsi Papua Selatan sebesar 3,45% (yoy). Kinerja sektoral sejalan dengan lebih rendahnya optimisme ekspektasi konsumen pada triwulan II 2026 dan tingginya kinerja pada triwulan I 2026 akibat adanya HBKN.

Perlambatan kinerja LU pada triwulan II 2026 tercermin pada indeks pembelian *durable goods* yang menunjukkan penurunan menjadi 93,11, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 97,33 mencerminkan kecenderungan konsumen untuk menahan konsumsi barang tahan lama. Sejalan dengan hal tersebut, hasil liaison pada triwulan II 2026 menunjukkan adanya perlambatan permintaan domestik pada LU perdagangan yang selaras dengan kinerja penjualan, salah satunya contact perdagangan kendaraan yang menyampaikan penurunan permintaan seiring pelemahan konsumsi masyarakat.



Sumber: Laporan BU, Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.25 Perkembangan Kredit Sektor Perdagangan

Berdasarkan penyaluran kredit, sektor perdagangan Papua dan DOB pada triwulan II 2026 tercatat mengalami kontraksi sebesar -4,43% (yoy) lebih dalam jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar -2,02% (yoy). Kontraksi penyaluran kredit LU sejalan

dengan arah kredit modal kerja yang menjadi kontributor utama kredit sektor perdagangan besar dan eceran. Adapun pada triwulan II 2026 KMK berkontraksi sebesar -4,06% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar -1,50% (yoy).

Boks 1: MENDORONG INVESTASI BERKELANJUTAN DI PAPUA DAN DOB MELALUI PAPUA ECONOMIC AND INVESTMENT FORUM (PEIF)

Berdasarkan hasil analisis karakteristik perekonomian, struktur lapangan usaha, dinamika pertumbuhan ekonomi, serta perkembangan investasi pada masing-masing provinsi, terlihat bahwa setiap wilayah memiliki Lapangan Usaha (LU) yang berperan sebagai penggerak utama perekonomian dengan karakteristik yang berbeda. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa arah pengembangan investasi perlu disesuaikan dengan potensi unggulan yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Selanjutnya, hasil analisis LU unggulan menjadi dasar dalam mengidentifikasi potensi investasi unggulan pada masing-masing provinsi. Identifikasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai LU yang memiliki prospek pengembangan dan berpotensi menjadi prioritas dalam penyusunan portofolio investasi daerah.

Provinsi Papua

Pasca-pemekaran wilayah (2023–2025), struktur ekonomi Provinsi Papua bertransformasi dari LU ekstraktif pertambangan menuju diversifikasi LU non-ekstraktif. Berdasarkan analisis *Static Location Quotient* (SLQ), *Dynamic Location Quotient* (DLQ), dan *Shift Share*, LU pertanian, perdagangan, real estat, jasa pendidikan, kesehatan, serta administrasi pemerintahan berkembang menjadi LU basis dan prospektif. LU administrasi pemerintahan dan real estat mencatatkan keunggulan kompetitif tertinggi, sedangkan LU pertanian dan perdagangan masih memiliki daya saing negatif terhadap wilayah acuan. Oleh karena itu, arah kebijakan investasi kini difokuskan pada penguatan LU non-ekstraktif potensial melalui peningkatan produktivitas, pengembangan rantai nilai, dan penguatan daya saing secara berkelanjutan.

Provinsi Papua Tengah

Perekonomian Provinsi Papua Tengah masih bertumpu pada LU pertambangan dan penggalian sebagai basis

utama. Kendati demikian, hasil analisis SLQ, DLQ, dan *Shift Share* tahun 2025 menunjukkan LU tersebut bertransisi menjadi basis non-prospektif dengan keunggulan kompetitif serta pergeseran struktur yang menurun. Sebaliknya, LU administrasi pemerintahan konsisten menjadi basis prospektif dengan daya saing tertinggi pascapembentukan daerah otonom baru. Di sisi lain, LU perdagangan, industri pengolahan, dan aneka jasa mulai menunjukkan pergeseran struktur dan daya saing yang positif. Dinamika ini menegaskan pentingnya diversifikasi struktur ekonomi daerah menuju LU non-pertambangan potensial guna memperluas basis perekonomian dan meminimalkan ketergantungan pada aktivitas ekstraktif.

Provinsi Papua Selatan

Struktur ekonomi Provinsi Papua Selatan didukung beragam LU basis yang relatif terdiversifikasi, meliputi LU pertanian, administrasi pemerintahan, dan jasa pendidikan yang konsisten berstatus basis prospektif. Didorong pembangunan daerah otonom baru, LU konstruksi berkembang menjadi basis prospektif dengan keunggulan kompetitif dan pergeseran struktur positif. Hasil *Shift Share* 2025 mencatat LU administrasi pemerintahan memiliki daya saing tertinggi, disusul konstruksi. Kendati daya saing kompetitif LU pertanian dan aneka jasa masih negatif terhadap wilayah acuan, perannya tetap vital. Hal ini menunjukkan arah investasi Papua Selatan terbuka luas pada penguatan LU primer serta infrastruktur dan layanan pendukung pembangunan wilayah.

Provinsi Papua Pegunungan

Struktur perekonomian Provinsi Papua Pegunungan bertumpu pada keberagaman LU non-ekstraktif, terutama perdagangan, konstruksi, real estat, administrasi pemerintahan, dan aneka jasa. Berdasarkan analisis SLQ dan DLQ, LU perdagangan, real estat, serta jasa pendidikan konsisten menjadi basis prospektif.

Hasil analisis *Shift Share* 2025 mencatat LU administrasi pemerintahan memiliki keunggulan kompetitif tertinggi, disusul real estat. Kendati LU perdagangan, pertanian, dan pendidikan masih mencatatkan daya saing negatif terhadap wilayah acuan, pergeseran struktur ekonominya tetap positif. Dinamika ini menegaskan potensi investasi Papua Pegunungan berpusat pada penguatan LU non-ekstraktif, khususnya perdagangan, layanan publik, infrastruktur, dan jasa guna memacu produktivitas serta daya saing daerah.

Papua Economic and Investment Forum (PEIF)

Forum ini merupakan wadah diseminasi dan diskusi perekonomian daerah terkini serta forum penyusunan investasi strategis di daerah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua dan DOB. PEIF

sudah dilaksanakan 2 (dua) kali, di mana PEIF-1 diadakan di Merauke – Papua Selatan pada 10-11 Maret 2026 dan dilanjutkan dengan PEIF-2 di Mimika – Papua Tengah pada 4-5 Juni 2026. Forum ini selama setahun direncanakan akan diadakan sebanyak 4 (empat) kali pada tiap triwulan. Pada Triwulan III, PEIF akan dilaksanakan di Wamena pada 2-3 September 2026. Selanjutnya pada Triwulan IV, PEIF akan diadakan di Jayapura, Papua.

Seiring peningkatan pemahaman, kapasitas, dan kemampuan Pemerintah Daerah akan pentingnya penyusunan portofolio investasi daerah baik oleh Pemda Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Ke depan, diharapkan PEIF dapat terus berkembang dan menjadi forum promosi investasi dan *business matching* bersama calon investor di Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.



Gambar 1.
Papua Economic and
Investment Forum
(PEIF) ke-1 Merauke



Gambar 2.
Papua Economic and
Investment Forum
(PEIF ke-2 Mimika)



BAB II

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

Inflasi di Papua dan DOB pada triwulan II 2026 secara umum meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, kecuali Papua Selatan yang mencatat penurunan inflasi seiring kondisi cuaca yang lebih kondusif dan terjaganya pasokan pangan. Peningkatan inflasi tertinggi tercatat di Papua Pegunungan sebesar 7,84% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,14% (yoy). Peningkatan inflasi di Papua dan DOB terutama dipengaruhi oleh gejolak geopolitik global yang mendorong kenaikan harga emas perhiasan dan kondisi cuaca yang kurang kondusif yang membatasi produksi dan pasokan pangan lokal. Perkembangan tersebut tercermin pada peningkatan harga komoditas emas perhiasan dan sejumlah komoditas pangan hortikultura.

Sebagai bentuk mitigasi, penguatan kapasitas petani dalam menghadapi gangguan cuaca menjadi salah satu agenda prioritas TPID di Papua dan DOB, disertai upaya penguatan kemandirian pangan dan kelancaran distribusi untuk memastikan ketersediaan pangan lokal serta menjaga stabilitas harga.

Tabel 2.1 Perkembangan Inflasi di Provinsi Papua dan DOB Papua

Inflasi (%yoy)	2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Nasional	3,05	2,51	1,84	1,57	1,03	1,87	2,65	2,92	3,48	3,34
Jayapura	1,98	1,47	0,82	1,75	2,15	1,07	0,99	2,54	3,50	3,72
Merauke	3,70	2,04	1,60	1,78	2,68	3,00	3,42	2,95	3,60	2,95
Timika	3,46	3,49	4,00	3,99	4,79	3,16	1,97	2,03	1,87	3,26
Nabire	5,36	6,21	3,52	1,86	1,56	0,69	2,89	5,81	3,91	4,44
Jayawijaya	2,37	5,65	4,14	5,36	8,05	2,01	3,55	3,22	3,14	7,84

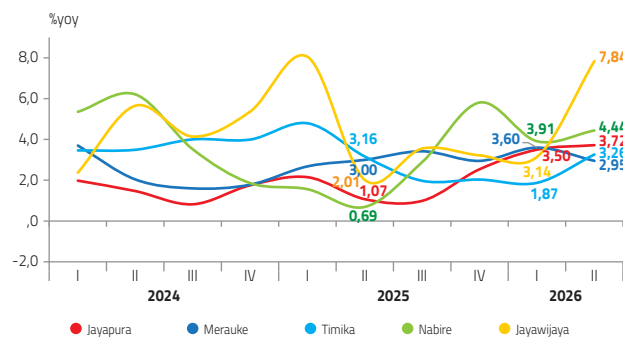
Sumber: BPS, diolah

2.1 PERKEMBANGAN INFLASI PROVINSI PAPUA DAN DOB PAPUA

Inflasi triwulan II 2026 Papua dan DOB lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, kecuali inflasi di Papua Selatan yang mencatat inflasi lebih rendah seiring kondisi cuaca yang kondusif sehingga meningkatkan hasil panen dan pasokan tercukupi. Namun demikian, apabila dilihat pada tiap kabupaten/kota IHK, tercatat bahwa inflasi Kabupaten Jayawijaya merupakan yang tertinggi yaitu sebesar 7,84% (yoy) pada akhir Triwulan II 2026.

2.2 PERKEMBANGAN INFLASI PROVINSI PAPUA

Inflasi Provinsi Papua yang diukur melalui kota Jayapura tercatat mengalami inflasi pada triwulan II 2026 yang meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.



Sumber: BPS, diolah.

Grafik 2.1 Inflasi Spasial Papua dan DOB Papua

2.2.1 Realisasi Triwulan II 2026

Inflasi Provinsi Papua pada akhir triwulan II 2026 sebesar 3,72% (yoy), lebih tinggi dibandingkan akhir triwulan I 2026 sebesar 3,50% (yoy) (Tabel 2.1). Peningkatan inflasi terutama didorong oleh peningkatan harga emas perhiasan seiring dengan meningkatnya harga emas global. Selain itu, peningkatan harga pangan bergejolak turut memberikan tekanan terhadap inflasi seiring kondisi cuaca yang kurang kondusif sehingga menyebabkan keterbatasan pasokan komoditas.

2.2.2 Perkembangan Inflasi Berdasarkan Kelompok Komoditas

Inflasi di Provinsi Papua utamanya didorong oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau serta kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya.

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mengalami inflasi sebesar 6,34% (yoy) dengan andil inflasi sebesar 2,12% (yoy), yang mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,65% (yoy) dengan andil inflasi 1,59% (yoy). Inflasi pada kelompok ini utamanya didorong oleh komoditas tomat, cabai rawit, beras, dan bawang merah dengan andil masing-masing sebesar 0,59% (yoy), 0,28% (yoy), 0,22% (yoy) dan 0,22%.

Tabel 2.2 Perkembangan Inflasi Provinsi Papua berdasarkan Kelompok Komoditas

KELOMPOK KOMODITAS	2024 (%yoy)				2025 (%yoy)				2026 (%yoy)	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Makanan, Minuman dan Tembakau	3,10	3,07	2,42	4,76	7,23	1,60	2,60	3,99	4,65	6,34
Pakaian dan Alas Kaki	-0,78	1,23	-0,70	-0,45	-0,27	-2,67	-1,09	-2,19	-1,62	-2,04
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	-0,55	-0,49	-0,47	0,17	-3,98	0,46	0,51	0,46	4,99	0,68
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin RT	0,91	-0,33	-0,52	0,80	0,45	0,67	-0,03	-2,04	-1,85	-0,92
Kesehatan	1,66	1,42	0,46	-0,06	1,48	2,74	1,86	2,45	0,88	0,09
Transportasi	3,02	-0,57	-1,62	-1,01	-0,63	0,62	-4,11	-0,50	-1,52	2,39
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-0,18	-0,22	-1,27	-1,62	-2,01	-1,97	-0,59	-0,27	-0,10	1,07
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	-0,35	-0,35	0,42	0,14	0,41	0,44	0,51	4,41	2,74	5,51
Pendidikan	7,49	7,49	0,10	0,10	0,10	0,10	2,27	2,27	2,27	2,58
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,27	1,32	1,26	0,59	0,40	0,12	0,33	0,54	1,50	3,43
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	3,55	2,78	5,15	4,72	7,97	6,60	7,29	14,95	16,08	10,06
UMUM	1,98	1,47	0,82	1,75	2,15	1,07	0,99	2,54	3,50	3,72

Sumber : BPS, diolah

Tabel 2.3 Perkembangan Komoditas Inflasi Umum di Provinsi Papua

Umum					
April		Mei		Juni	
%, yoy		%, yoy		%, yoy	
3,80		3,72		2,79	
INFLASI					
Komoditas	Andil	Komoditas	Andil	Komoditas	Andil
EMAS PERHIASAN	0,84%	EMAS PERHIASAN	0,76%	EMAS PERHIASAN	0,74%
IKAN TUNA	0,70%	TOMAT	0,50%	TOMAT	0,59%
TOMAT	0,31%	BERAS	0,24%	CABAI RAWIT	0,28%
ANGKUTAN UDARA	0,26%	DAGING AYAM RAS	0,22%	BERAS	0,22%
DAGING AYAM RAS	0,24%	ANGKUTAN UDARA	0,15%	BAWANG MERAH	0,22%
DEFLASI					
Komoditas	Andil	Komoditas	Andil	Komoditas	Andil
IKAN MUMAR	-0,09%	SEKOLAH MENENGAH ATAS	-0,08%	IKAN KEMBUNG/IKAN GEMBUNG/ IKAN BANYAR/IKAN GEMBOLO/ IKAN ASO-ASO	-0,08%
SEKOLAH MENENGAH ATAS	-0,08%	BUAH PINANG	-0,08%	SEKOLAH MENENGAH ATAS	-0,08%
BAWANG PUTIH	-0,08%	IKAN KEMBUNG/IKAN GEMBUNG/ IKAN BANYAR/IKAN GEMBOLO/ IKAN ASO-ASO	-0,08%	ANGKUTAN UDARA	-0,06%
BAYAM	-0,06%	BAWANG PUTIH	-0,08%	BLUS WANITA	-0,04%
BUAH PINANG	-0,05%	CABAI RAWIT	-0,07%	SEPATU ANAK	-0,04%

Sumber : BPS, diolah

Peningkatan harga pada komoditas pangan tersebut sejalan dengan kondisi cuaca yang kurang kondusif. Berdasarkan prakiraan curah hujan BMKG, sejumlah wilayah Papua selama April–Juni 2026 diperkirakan mengalami curah hujan pada kategori menengah hingga tinggi, dengan kisaran 200–400 mm/bulan. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi ketersediaan komoditas hortikultura, khususnya tomat, cabai rawit, dan bawang merah.

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya merupakan kelompok dengan andil inflasi terbesar kedua di Provinsi Papua, yang mengalami inflasi sebesar 10,06% (yoy), dengan andil 0,78%. Tekanan inflasi kelompok ini melandai dibandingkan dengan triwulan I 2026 yang mengalami inflasi sebesar 16,08% (yoy) dengan andil 1,24% (yoy).

Melandainya tekanan inflasi pada kelompok ini sejalan dengan meredahnya tekanan harga komoditas emas perhiasan sepanjang triwulan II 2026. Hal tersebut tercermin dari penurunan andil inflasi komoditas emas perhiasan dari April – Juni. Meskipun demikian, komoditas emas perhiasan masih menjadi penyumbang utama inflasi pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya.

2.3 PERKEMBANGAN INFLASI PROVINSI PAPUA SELATAN

Provinsi Papua Selatan diwakili oleh Kabupaten Merauke mengalami inflasi lebih terjaga dibandingkan triwulan sebelumnya.

2.3.1 Realisasi Triwulan II 2026

Inflasi Provinsi Papua Selatan pada akhir triwulan II 2026 sebesar 2,95% (yoy), lebih terjaga dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,60% (yoy) (Tabel 2.4). Lebih terkendalinya inflasi tersebut terutama dipengaruhi oleh perkembangan harga komoditas pangan yang lebih terjaga seiring kondisi cuaca yang semakin kondusif dan pasokan yang tercukupi. Kondisi tersebut turut menahan tekanan inflasi secara keseluruhan, di tengah peningkatan tekanan harga pada kelompok pengeluaran lainnya.

2.3.2 Perkembangan Inflasi Berdasarkan Kelompok Komoditas

Kelompok inflasi yang memberikan tekanan terbesar pada akhir triwulan II 2026 terjadi pada kelompok Transportasi, serta kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya.

Kelompok Transportasi

Pada akhir triwulan II 2026, kelompok transportasi mengalami inflasi sebesar 10,40% (yoy) dengan andil 1,18% (yoy), lebih tinggi dibandingkan akhir triwulan I 2026 sebesar 2,65% (yoy).

Peningkatan inflasi pada kelompok ini berasal dari peningkatan tarif angkutan udara akibat meningkatnya harga avtur dan peningkatan mobilitas selama musim liburan sekolah. Hal ini tercermin terutama pada komoditas angkutan udara dengan andil inflasi sebesar 0,80% (yoy).

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya mengalami inflasi sebesar 11,49% (yoy) dengan andil inflasi sebesar 0,87% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya dengan tingkat inflasi sebesar 17,82% (yoy) dengan andil inflasi sebesar 1,32% (yoy). Tekanan inflasi

Tabel 2.4 Perkembangan Inflasi Provinsi Papua Selatan berdasarkan Kelompok Komoditas

KELOMPOK KOMODITAS	2024 (%yoy)				2025 (%yoy)				2026 (%yoy)	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Makanan, Minuman dan Tembakau	5,59	3,10	2,67	3,87	5,52	5,80	6,58	2,39	3,79	1,30
Pakaian dan Alas Kaki	3,76	0,12	0,10	0,08	0,19	0,33	0,43	0,44	-0,12	0,02
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	1,21	0,29	0,16	-0,23	-1,39	0,03	1,12	1,33	2,63	1,22
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin RT	-0,61	-1,24	-0,38	-1,08	-0,65	-0,09	-0,23	-0,04	-0,27	0,21
Kesehatan	8,65	5,55	1,53	1,44	1,48	3,32	3,30	2,37	2,78	1,58
Transportasi	1,81	2,94	1,64	0,75	2,48	-0,49	-1,15	4,85	2,65	10,40
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-0,83	-0,74	-0,71	-0,69	-0,54	-0,65	-0,26	-0,27	-0,15	0,70
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	2,94	-2,61	-2,94	-2,01	-0,73	0,56	0,77	0,23	0,12	-0,38
Pendidikan	2,78	2,03	-2,36	-2,36	-2,17	-2,17	-1,62	-1,62	-1,22	-1,18
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	8,06	4,65	5,50	3,87	3,43	3,97	3,17	3,35	2,24	2,91
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	6,11	2,63	3,56	3,86	7,44	10,05	10,88	14,81	17,82	11,49
UMUM	3,70	2,04	1,60	1,78	2,68	3,00	3,42	2,95	3,60	2,95

Sumber : BPS, diolah

Tabel 2.5 Perkembangan Komoditas Inflasi Umum di Provinsi Papua Selatan

Umum					
April		Mei		Juni	
%, yoy		%, yoy		%, yoy	
3,34		2,95		2,17	
INFLASI					
Komoditas	Andil	Komoditas	Andil	Komoditas	Andil
EMAS PERHIASAN	0,95%	EMAS PERHIASAN	0,85%	EMAS PERHIASAN	0,84%
ANGKUTAN UDARA	0,70%	ANGKUTAN UDARA	0,72%	ANGKUTAN UDARA	0,80%
BERAS	0,26%	BERAS	0,26%	DAGING AYAM RAS	0,27%
IKAN LAYANG/ IKAN BENGOL	0,24%	DAGING AYAM RAS	0,20%	BERAS	0,26%
SIGARET KRETEK MESIN (SKM)	0,16%	SIGARET KRETEK MESIN (SKM)	0,15%	BENSIN	0,21%
DEFLASI					
Komoditas	Andil	Komoditas	Andil	Komoditas	Andil
SAWI HIJAU	-0,26%	CABAI RAWIT	-0,28%	UDANG BASAH	-0,15%
BAWANG PUTIH	-0,18%	IKAN MUJAIR	-0,18%	BAYAM	-0,14%
MINYAK GORENG	-0,15%	BAWANG PUTIH	-0,16%	SAWI HIJAU	-0,13%
SEKOLAH MENENGAH ATAS	-0,12%	UDANG BASAH	-0,16%	SEKOLAH MENENGAH ATAS	-0,12%
BAYAM	-0,08%	SAWI HIJAU	-0,16%	MINYAK GORENG	-0,12%

Sumber : BPS, diolah

pada kelompok ini terutama berasal dari komoditas emas perhiasan seiring meningkatnya permintaan emas sebagai instrumen *safe haven* di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global. Komoditas emas perhiasan tercatat memberikan andil inflasi sebesar 0,84% (yoy).

2.4 PERKEMBANGAN INFLASI PROVINSI PAPUA TENGAH

Inflasi Papua Tengah diperoleh dari perhitungan inflasi Kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire. Provinsi Papua Tengah mengalami peningkatan inflasi dibandingkan triwulan sebelumnya.

2.4.1 Realisasi Triwulan II 2026

Inflasi Provinsi Papua Tengah pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 3,65% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,54% (yoy). Secara spasial pada akhir triwulan II 2026, inflasi Kabupaten Mimika sebesar 3,26% (yoy), sedangkan pada Kabupaten Nabire sebesar 4,44% (yoy). Peningkatan inflasi di Papua Tengah

didorong oleh peningkatan harga emas perhiasan, tarif angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, serta bensin seiring meningkatnya harga energi dunia akibat gejolak geopolitik.

2.4.2 Perkembangan Inflasi Berdasarkan Kelompok Komoditas

Inflasi Papua Tengah utamanya didorong oleh tekanan harga pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau serta kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya.

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mengalami inflasi sebesar 3,07% (yoy) dengan andil sebesar 1,39% (yoy), mengalami kenaikan dibandingkan triwulan sebelumnya dengan tingkat inflasi sebesar 1,67% (yoy) dengan andil sebesar 0,75% (yoy).

Komoditas utama pendorong inflasi pada kelompok ini adalah komoditas beras dengan andil inflasi sebesar 0,26% (yoy).

Tabel 2.6 Perkembangan Inflasi Papua Tengah berdasarkan Kelompok Komoditas

KELOMPOK KOMODITAS	2024 (%yoy)				2025 (%yoy)				2026 (%yoy)	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Makanan, Minuman dan Tembakau	6,63	6,98	5,38	5,13	5,99	2,90	3,79	4,35	1,67	3,07
Pakaian dan Alas Kaki	0,17	-0,12	0,33	-0,62	-0,49	-0,28	-0,80	-0,19	-0,80	-0,70
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	2,47	2,19	2,05	0,00	-0,89	0,49	0,40	0,84	2,26	2,02
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin RT	2,75	3,19	1,16	1,33	0,46	-0,24	0,16	-0,27	-0,11	-0,98
Kesehatan	1,08	2,79	6,40	7,33	6,02	6,22	3,28	2,10	1,04	1,17
Transportasi	0,73	0,20	0,52	0,83	0,66	-0,28	-2,72	0,63	1,10	8,58
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-0,07	1,19	0,95	0,93	1,00	-0,26	0,00	0,00	0,23	0,23
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	2,50	1,71	1,89	0,64	-0,41	-0,12	1,01	2,16	3,36	3,10
Pendidikan	0,06	0,68	1,35	1,35	1,45	0,82	-2,28	-2,28	-2,28	-2,28
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	7,31	5,76	5,66	3,51	4,93	5,10	4,41	2,64	1,02	3,61
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	5,93	7,46	8,54	6,66	10,02	9,33	9,64	16,77	20,78	16,01
UMUM	4,10	4,39	3,83	3,27	3,70	2,33	2,28	3,28	2,54	3,65

Sumber : BPS, diolah

Tekanan inflasi pada komoditas beras utamanya dipengaruhi oleh kenaikan harga dasar di daerah asal serta meningkatnya biaya distribusi seiring kenaikan harga energi. Peningkatan biaya logistik turut memberikan tekanan terhadap harga beras di tingkat konsumen, sejalan dengan informasi yang diperoleh dari survei internal Bank Indonesia.

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya pada akhir triwulan II 2026 mengalami inflasi sebesar 16,01%

(yoy) dengan andil inflasi sebesar 1,06% (yoy), menurun dibandingkan inflasi pada triwulan I 2026 dengan tingkat inflasi sebesar 20,78% (yoy) dengan andil 1,36% (yoy).

Tekanan inflasi pada kelompok ini terutama dipengaruhi oleh geopolitik global yang mendorong peningkatan permintaan komoditas emas sebagai instrumen *safe haven*. Hal ini tercermin pada komoditas emas perhiasan, dengan andil inflasi 1,00% (yoy).

Tabel 2.7 Perkembangan Komoditas Inflasi Umum di Provinsi Papua Tengah

Umum					
April		Mei		Juni	
%, yoy		%, yoy		%, yoy	
1,53		3,65		2,05	
INFLASI					
Komoditas	Andil	Komoditas	Andil	Komoditas	Andil
EMAS PERHIASAN	1,08%	EMAS PERHIASAN	1,05%	EMAS PERHIASAN	1,00%
BERAS	0,24%	BERAS	0,31%	ANGKUTAN UDARA	0,33%
ANGKUTAN UDARA	0,20%	ANGKUTAN UDARA	0,31%	BERAS	0,26%
BAWANG MERAH	0,16%	BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	0,20%	BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	0,23%
MINYAK GORENG	0,14%	MINYAK GORENG	0,18%	BENSIN	0,17%
DEFLASI					
Komoditas	Andil	Komoditas	Andil	Komoditas	Andil
CABAI RAWIT	-0,64%	CABAI RAWIT	-0,77%	DAGING BABI	-0,40%
DAGING BABI	-0,38%	DAGING BABI	-0,38%	CABAI RAWIT	-0,10%
BAWANG PUTIH	-0,14%	BAWANG PUTIH	-0,15%	SEKOLAH MENENGAH ATAS	-0,06%
TAHU MENTAH	-0,10%	CABAI MERAH	-0,13%	BAWANG PUTIH	-0,06%
CABAI MERAH	-0,06%	SEKOLAH MENENGAH ATAS	-0,06%	SABUN DETERGEN BUBUK	-0,04%

Sumber : BPS, diolah

Tabel 2.8 Perkembangan Inflasi Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan Kelompok Komoditas

KELOMPOK KOMODITAS	2024 (%yoy)				2025 (%yoy)				2026 (%yoy)	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Makanan, Minuman dan Tembakau	5,44	11,33	8,21	11,20	14,65	4,99	7,91	6,76	6,35	11,72
Pakaian dan Alas Kaki	2,08	2,44	2,45	2,22	-0,67	-0,98	-0,99	-0,81	1,51	1,79
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	-1,60	-2,13	-2,36	-2,98	-0,58	-0,58	-0,46	0,14	0,83	3,62
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin RT	-1,52	-1,60	-0,78	-0,96	1,17	1,07	0,72	1,28	0,60	1,09
Kesehatan	-1,53	-2,66	-1,97	-2,45	2,63	3,83	0,91	0,91	-8,51	-8,51
Transportasi	-3,02	1,02	0,80	-2,09	3,10	-9,33	-8,50	-8,43	-9,34	8,94
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-1,19	-1,18	-1,10	0,02	-0,21	-0,44	-0,58	-0,58	-0,69	-0,06
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	1,43	0,00	4,36	5,24	7,95	7,95	3,84	2,98	2,36	4,20
Pendidikan	0,00	0,00	1,82	1,82	3,15	3,15	-0,55	-0,55	-2,49	-2,49
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	2,83	0,40	0,77	0,77	0,37	0,37	0,00	0,00	0,64	1,93
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	-0,29	0,44	-0,15	-0,59	0,32	-0,10	1,38	3,36	3,76	2,55
UMUM	2,37	5,65	4,14	5,36	8,05	2,01	3,55	3,22	3,14	7,84

Sumber : BPS, diolah

2.5 PERKEMBANGAN INFLASI PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Inflasi Papua Pegunungan direpresentasikan oleh Kabupaten Jayawijaya. Inflasi Provinsi Papua Pegunungan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.

2.5.1 Realisasi Triwulan II 2026

Inflasi Provinsi Papua Pegunungan pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 7,84% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 3,14% (yoy). Hal ini terjadi seiring belum masuknya periode panen lokal serta kondisi cuaca yang kurang kondusif sehingga pasokan komoditas pangan menjadi terbatas.

2.5.2 Perkembangan Inflasi Berdasarkan Kelompok Komoditas

Inflasi Papua Pegunungan utamanya disebabkan oleh peningkatan harga pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau serta kelompok Transportasi.

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mengalami inflasi sebesar 11,72% (yoy) dengan andil sebesar 6,49% (yoy) pada triwulan II 2026, lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2026 dengan tingkat inflasi 6,35% (yoy) dengan andil sebesar 3,52% (yoy).

Komoditas utama yang menyebabkan kenaikan inflasi pada kelompok ini adalah komoditas tomat, cabai rawit, dan sigaret kretek tangan (SKT) dengan andil inflasi masing-masing sebesar 1,12% (yoy), 0,92% (yoy), dan 0,88% (yoy).

Kenaikan harga pada komoditas tersebut disebabkan oleh kondisi cuaca yang kurang kondusif sehingga pasokan komoditas pangan terbatas.

Spesifik terkait komoditas aneka rokok, masih tercatat masuk sebagai komoditas dengan andil inflasi tahunan tertinggi disebabkan oleh tingkat konsumsi rokok yang tinggi di masyarakat Jayawijaya dan ditambah dengan peningkatan komponen biaya logistik.

Kelompok Transportasi

Pada akhir triwulan II 2026, kelompok transportasi mengalami inflasi sebesar 8,94% (yoy) dengan andil 0,66% (yoy), lebih tinggi dibandingkan akhir triwulan I 2026 sebesar -9,34% (yoy) dengan andil -0,74% (yoy).

Peningkatan tekanan inflasi pada kelompok ini disebabkan risiko yang berasal dari peningkatan tarif angkutan udara akibat meningkatnya harga avtur dan peningkatan mobilitas selama musim liburan sekolah.

Tabel 2.9 Perkembangan Inflasi Umum di Provinsi Papua Pegunungan

Umum					
April		Mei		Juni	
%, yoy		%, yoy		%, yoy	
4,89		7,84		4,44	
INFLASI					
Komoditas	Andil	Komoditas	Andil	Komoditas	Andil
CABAI RAWIT	1,33%	SIGARET KRETEK TANGAN (SKT)	0,87%	TOMAT	1,12%
SIGARET KRETEK TANGAN (SKT)	0,77%	TOMAT	0,69%	CABAI RAWIT	0,92%
BAYAM	0,58%	ANGKUTAN UDARA	0,44%	SIGARET KRETEK TANGAN (SKT)	0,88%
TOMAT	0,53%	DAGING AYAM RAS	0,39%	BAYAM	0,61%
SAWI PUTIH/PECAY/PITSAI	0,31%	BISKUIT	0,28%	ANGKUTAN UDARA	0,51%
DEFLASI					
Komoditas	Andil	Komoditas	Andil	Komoditas	Andil
TALAS/KELADI	-0,58%	PISANG	-0,32%	PISANG	-0,19%
PISANG	-0,27%	TALAS/KELADI	-0,18%	TALAS/KELADI	-0,10%
KETELA RAMBAT	-0,19%	SEMANGKA	-0,08%	SEMANGKA	-0,07%
AIR KEMASAN	-0,17%	TISSU	-0,05%	TISSU	-0,05%
SEMANGKA	-0,08%	OBAT GOSOK	-0,05%	OBAT GOSOK	-0,05%

Sumber : BPS, diolah

2.6 PENGENDALIAN INFLASI PAPUA DAN DOB

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua bersama Tim Pengendalian inflasi Daerah (TPID), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, termasuk UMKM, petani, hingga Pelaku Usaha se-Provinsi Papua dan DOB terus melakukan penguatan sinergi pengendalian inflasi di Papua dan DOB. Secara umum TPID telah melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi melalui kerangka 4K dengan rincian sebagai berikut:

K1 – Keterjangkauan Harga

- Sinergi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan seluruh Pemda se- Papua dan DOB telah dilaksanakan lebih dari 240 kali selama periode triwulan II 2026. Kegiatan ini turut melibatkan OPD setempat, kelompok tani, pelaku usaha, masyarakat, hingga rumah ibadah seperti masjid dan gereja.
- Pelaksanaan sidak pasar di pasar tradisional besar di kabupaten/kota IHK guna memastikan ketersediaan stok dan harga komoditas yang wajar.

Penerbitan SK Gubernur, Walikota, maupun Kepala Dinas perihal HET terutama komoditas aneka cabai dan ikan TCT (Tuna, Cakalang, Tongkol).

Penerapan inovasi *early warning system* sebagai *reminder* mitigasi indeks kenaikan harga komoditas tertentu sebagai pendukung pengambilan keputusan penentuan komoditas dan waktu pelaksanaan GPM.

K2 – Ketersediaan Pasokan

- Pelaksanaan survei kelompok petani potensial penerima bantuan sarana prasarana pendukung pertanian dan potensi menjadi Poktan Binaan.

Penyaluran bantuan sarpras pendukung pertanian dan *monitoring* pemberian bantuan secara berkala untuk melihat perkembangan pasca penyaluran bantuan.

Dorongan pelaksanaan KAD skema B2B dan G2G melalui fasilitasi distribusi pangan untuk menjamin ketersediaan pasokan di pasaran.

K3 – Kelancaran Distribusi

- Penyaluran bantuan alat atau kendaraan pendukung kelancaran distribusi bagi kelompok tani potensial.
- Penjajakan dan pelaksanaan fasilitasi distribusi pangan inter dan intra Papua dan DOB dalam mendukung ketahanan pangan lokal di tanah Papua.

K4 – Komunikasi Efektif

- Pelaksanaan sinergi *capacity building* TPID terkait penguatan peran TPID dalam pengendalian inflasi daerah dan pelatihan penulisan laporan TPID Awards.

Pelaksanaan *courtesy* audiensi dengan pejabat pimpinan daerah (Gubernur) tiap Provinsi dan DOB dalam membahas isu strategis terkait pengendalian inflasi, perkembangan inflasi daerah, rekomendasi serta langkah sinergi pengendalian inflasi daerah.

- Intensifikasi edukasi stabilisasi harga dan pengendalian inflasi bagi akademisi hingga pelajar secara luring. Sinergi kegiatan ini melibatkan berbagai kampus dan SMA yang tersebar di Papua dan DOB, Forum BMPD, hingga masyarakat umum sekalipun dengan lebih dari 3.000+ total penerima manfaat edukasi terkait inflasi.

Pelaksanaan penguatan komunikasi strategis melalui *High Level Meeting* dan Rapat Koordinasi se-Papua dan DOB guna merumuskan arah strategis dan komitmen pengendalian inflasi ke depan.

Boks 2 : DINAMIKA PERKEMBANGAN INFLASI PAPUA PEGUNUNGAN

Berdasarkan rilis BPS periode Juli 2026, tercatat inflasi Papua Pegunungan mencapai 4,64% (yoy) atau tertinggi ke-3 Nasional. Sehingga inflasi Papua Pegunungan telah keluar dari sasaran inflasi $2,5 \pm 1\%$ (yoy) sebanyak 4 (empat) kali selama 2026.

Inflasi Papua Pegunungan yang diwakili oleh Kabupaten Jayawijaya sejak Januari 2024 menjadi landasan dalam menjaga daya beli masyarakat. Namun demikian, tantangan dalam mengendalikan inflasi cukup beragam dari yang bersifat insidental hingga struktural.

Berdasarkan rilis BPS, terlihat bahwa peningkatan inflasi bulanan Papua Pegunungan tidak diimbangi dengan kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP), justru terus berada di bawah batas nilai 100 sejak Maret 2025. Hal ini mencerminkan adanya penurunan kesejahteraan petani Papua Pegunungan yang belum kunjung membaik, sementara laju inflasi Papua Pegunungan terus meningkat dan bergejolak.

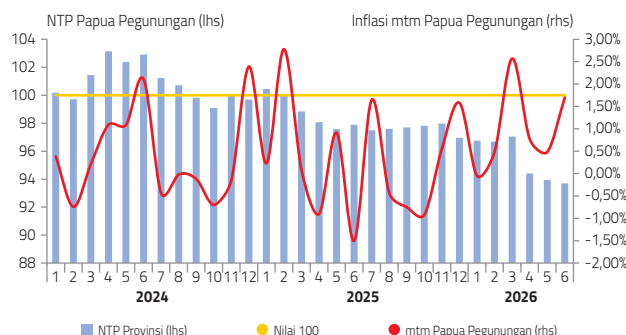
Selanjutnya berdasarkan pengamatan, terlihat adanya hubungan tidak langsung antara curah hujan yang relatif meningkat dengan kenaikan risiko inflasi. Apabila ditinjau lebih dalam, rata-rata fenomena tersebut memiliki lag 1 bulan, yang berarti curah hujan bulan ini berpengaruh terhadap tingkat inflasi di bulan berikutnya. Sebagai contoh, curah hujan di Mei 2026 sebesar 262,4 mm akan secara tidak langsung berdampak terhadap inflasi Juni 2026 Papua Pegunungan yang mencapai 7,84% (yoy). Hal ini disebabkan oleh lokasi pertanian lokal yang berada di lembah dan lereng gunung seringkali terdampak banjir ketika curah hujan meningkat, sehingga merusak hasil panen maupun kualitas bibit saat proses penanaman.

Dalam merespon hal tersebut, Bank Indonesia Papua bersama TPID terus memperkuat koordinasi melalui HLM dan peningkatan kapasitas TPID se-Papua Pegunungan, selain itu turut menyerahkan bantuan pada kelompok tani potensial dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian lokal.

Tabel 1. Perkembangan Curah Hujan Kabupaten Jayawijaya

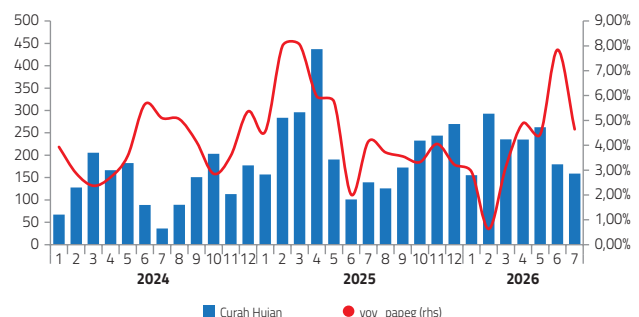
Curah Hujan	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Curah Hujan	Avg yoy
2024	67,3	127,7	205,5	166,5	182,6	88,8	36,3	89,1	150,9	203,2	113,3	177,4	134,05	3,93%
2025	156,8	283,5	296	437	190,3	101	139,6	125,7	172,4	232,7	243,8	269,7	220,71	4,69%
2026	155,2	292,9	235,6	235	262,4	179,8	162						217,56	4,07%

Sumber: BMKG, diolah



Sumber: BRS BPS Papua, diolah

Grafik 1. Inflasi mtm terhadap NTP Papua Pegunungan



Sumber: BMKG dan BPS, diolah

Grafik 2. Inflasi yoy terhadap Curah Hujan Jayawijaya

Secara khusus, tantangan geografis yang dihadapi Papua Pegunungan yaitu pertanian di lembah dan lereng gunung. Hal ini dapat diatasi melalui implementasi pertanian terasering dan pompanisasi untuk membuat jalur drainase yang lebih baik (Wang et al., 2022). Selain itu, curah hujan yang tinggi dengan durasi yang panjang

berisiko menimbulkan banjir dan erosi. (Zhang et al., 2025). Namun demikian, fenomena El Nino pada semester II 2026 diperkirakan dapat menekan risiko banjir. Hal ini dapat mengurangi risiko inflasi seiring pasokan pangan lokal dapat optimal.





BAB III

PEMBIAYAAN DAERAH

Stabilitas Keuangan Daerah di Papua dan DOB pada triwulan II 2026 tetap terjaga tercermin dari NPL sebesar 2,45%, di bawah batas psikologis aman 5%. Sementara itu, penyaluran kredit perbankan pada triwulan laporan tumbuh sebesar 13,63% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 8,83% (yoy). Pertumbuhan kredit pada triwulan II 2026 didorong oleh pertumbuhan kredit investasi dan konsumsi yang masing-masing tumbuh sebesar 49,93% (yoy) dan 8,30% (yoy). Penyaluran kredit investasi utamanya didukung oleh kredit LU pertanian, perburuan, dan kehutanan yang tumbuh 89,62% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 57,76% (yoy).

Penghimpunan DPK pada triwulan II 2026 berkontraksi sebesar -0,24% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,42% (yoy). Kontraksi DPK utamanya didorong oleh berkontraksinya komponen giro sebesar -5,85% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 27,13% (yoy).

3.1 PERKEMBANGAN KINERJA PERBANKAN

Aset bank umum di Papua dan DOB pada triwulan II 2026 tumbuh melambat dibandingkan triwulan I 2026. Nilai aset bank umum di Papua dan DOB pada triwulan II 2026 mencapai Rp42,97 triliun atau tumbuh sebesar 4,47% (yoy), sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,61% (yoy). Secara spasial, pertumbuhan aset bank umum tertinggi terjadi di Provinsi Papua Tengah sebesar 12,38% (yoy), diikuti Provinsi Papua Selatan sebesar 6,04% (yoy), Provinsi Papua sebesar 2,33% (yoy), dan Provinsi Papua Pegunungan sebesar 0,03% (yoy).

Aset kelompok bank persero tercatat tumbuh sebesar 4,96% (yoy) pada triwulan II 2026, meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 4,41% (yoy). Aset kelompok bank swasta nasional tumbuh sebesar 4,99% (yoy) melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 10,02% (yoy). Kelompok bank pemerintah daerah tumbuh sebesar 3,12% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,10% (yoy).

Struktur aset perbankan pada triwulan II 2026 didominasi oleh Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Kedua kelompok ini memiliki pangsa aset sebesar 89,66% dari seluruh aset bank umum di Papua. Sementara itu, Bank Swasta Nasional memiliki pangsa aset sebesar 10,34% (Grafik 3.1). Komposisi ini relatif stabil selama 4 tahun terakhir (Grafik 3.1).

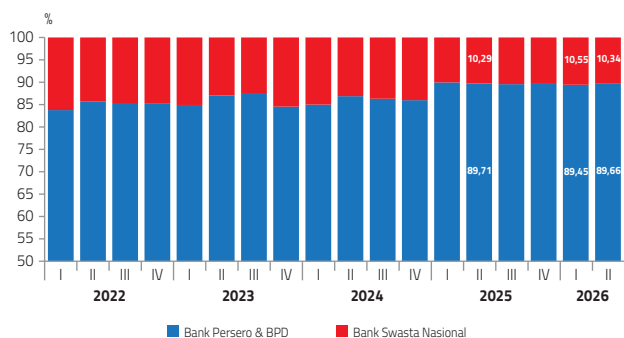
Intermediasi perbankan pada triwulan II 2026 lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini tercermin

dari *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebesar 101,87%, lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2026 sebesar 98,66%. Peningkatan LDR ini disebabkan peningkatan kredit terutama sektor pertanian, perburuan dan kehutanan seiring dengan semakin masifnya pengembangan perkebunan tebu di Papua Selatan, di tengah menurunnya DPK. Peningkatan jumlah kredit mendorong peningkatan angka rasio intermediasi.

3.1.1 Perkembangan Dana Pihak Ketiga

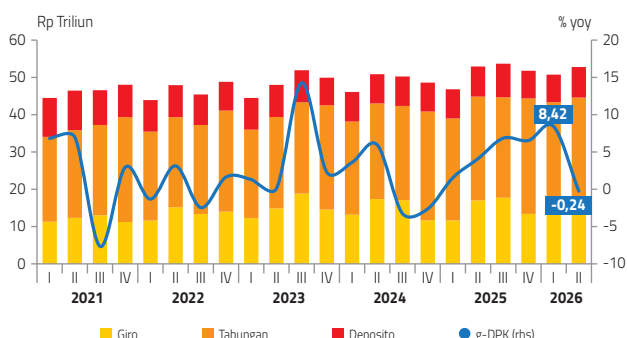
Dana Pihak Ketiga (DPK) Papua dan DOB pada triwulan II 2026 terkontraksi dibandingkan triwulan sebelumnya. DPK yang terhimpun pada triwulan II 2026 mencapai Rp52,79 triliun atau terkontraksi -0,24% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,42% (yoy). Secara spasial, pertumbuhan tertinggi tercatat di Provinsi Papua Selatan sebesar 19,50% (yoy). Di sisi lain, 3 (tiga) provinsi lainnya mengalami kontraksi, yaitu Provinsi Papua Tengah sebesar -1,04% (yoy), Provinsi Papua sebesar -2,66% (yoy), serta Provinsi Papua Pegunungan sebesar -13,90% (yoy).

Terkontraksinya DPK utamanya didorong oleh terkontraksinya DPK sektor pemerintah sebesar -12,37% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 36,33% (yoy). Kontraksi ini selaras dengan penurunan pendapatan daerah serta komponen transfer oleh pemerintah pusat. Di sisi lain, DPK Korporasi tumbuh sebesar 9,41% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 22,64% (yoy). DPK RT turut tumbuh



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.1 Aset Perbankan Papua



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.2 Perkembangan DPK Papua

sebesar 0,60% (yoy), berbalik arah dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar -1,24% (yoy).

Komponen Tabungan mengalami pertumbuhan pada triwulan II 2026 sebesar 2,66% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,34% (yoy). Secara spasial, pertumbuhan tabungan tertinggi terjadi pada Provinsi Papua Tengah yang tumbuh sebesar 8,91% (yoy), diikuti oleh Provinsi Papua Selatan sebesar 5,35% (yoy), serta Provinsi Papua sebesar 1,94% (yoy). Di sisi lain, Provinsi Papua Pegunungan mengalami kontraksi sebesar -14,91% (yoy). Tabungan RT tumbuh 3,68% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,58% (yoy). Di sisi lain, tabungan korporasi turut mengalami pelambatan sebesar -2,01% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 44,15% (yoy) pada triwulan I 2026. Sejalan dengan itu pertumbuhan tabungan pada sektor pemerintah berkontraksi -9,40% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 40,20% (yoy).

Di sisi lain, komponen deposito mencatatkan pertumbuhan yang mendorong pertumbuhan DPK Papua dan DOB. Deposito tumbuh sebesar 1,62% (yoy) lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar -5,25% (yoy). Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan deposito pemerintah dan korporasi yang masing-masing tumbuh sebesar 36,63% (yoy) dan 32,84% (yoy) pada triwulan II 2026 dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh masing-masing 6,86% (yoy) dan 3,59% (yoy). Di sisi lain, deposito RT tercatat mengalami kontraksi sebesar -8,48% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi -7,82% (yoy). Secara spasial, pertumbuhan deposito tertinggi tercatat pada Provinsi Tengah yang tumbuh sebesar 27,85% (yoy) diikuti oleh Provinsi Papua Selatan sebesar 5,52% (yoy). Di sisi lain, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Pegunungan mengalami kontraksi masing-masing sebesar -10,28% (yoy) dan -9,10% (yoy).

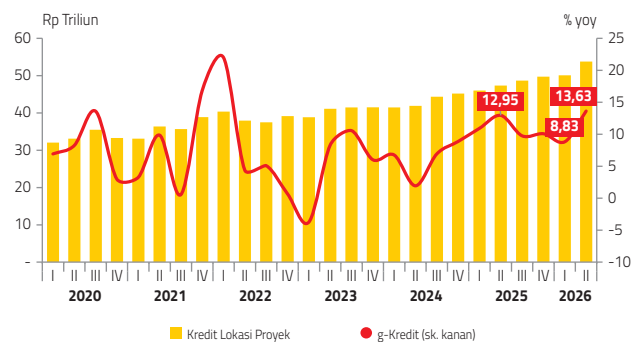
Di sisi lain, komponen giro berkontraksi pada triwulan II 2026. Giro tumbuh berkontraksi sebesar -5,86% (yoy), berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 27,13% (yoy). Kontraksi terbesar terjadi pada giro sektor RT yang berkontraksi sebesar -27,37% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan

sebelumnya yang berkontraksi sebesar -11,40% (yoy). Sejalan dengan itu, giro pemerintah turut mengalami kontraksi sebesar -15,99% (yoy), berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 38,38% (yoy). Di sisi lain, giro sektor korporasi tumbuh sebesar 11,16% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 18,29% (yoy). Kontraksi pada giro pemerintah sejalan dengan penurunan pendapatan daerah, sementara pertumbuhan giro korporasi menandakan peralihan penempatan dana sejalan dengan situasi dan kondisi usaha.

Secara spasial, kontraksi giro terdalam tercatat pada Provinsi Papua Tengah yaitu sebesar -15,27% (yoy), diikuti oleh Provinsi Papua Pegunungan sebesar -13,68% (yoy) dan Provinsi Papua sebesar -10,01% (yoy). Di sisi lain, Giro Provinsi Papua Selatan tumbuh sebesar 49,40% (yoy).

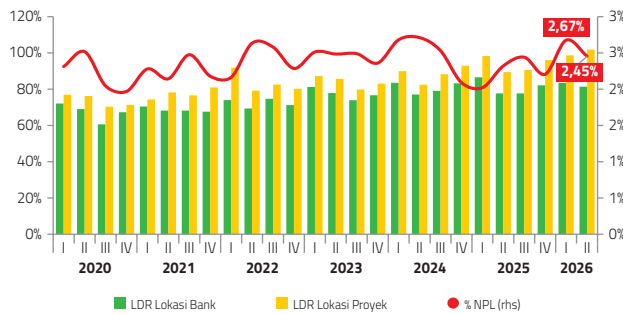
3.1.2 Perkembangan Kredit Bank Umum

Penyaluran kredit di Papua dan DOB pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 13,63% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 8,83% (yoy). Pertumbuhan tersebut didorong oleh pertumbuhan kredit pada LU pertanian, perburuan, dan kehutanan selaras dengan semakin masifnya pengembangan perkebunan tebu di Papua Selatan. (Grafik 3.3). Secara spasial, pertumbuhan tertinggi terdapat pada Provinsi Papua Selatan yang tumbuh 14,22% (yoy), diikuti oleh Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua yang masing-masing tumbuh sebesar 9,13% (yoy), 1,57%



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.3 Pertumbuhan Kredit Papua



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.4 Perkembangan LDR dan NPL Papua

(yoy), dan 0,05% (yoy).

Kredit menurut LU di Papua dan DOB didominasi oleh kredit LU pertanian, kehutanan dan perikanan; LU perdagangan besar dan eceran; serta LU pertambangan dengan pangsa masing-masing sebesar 19,78%; 13,47%; dan 4,99%. Pertumbuhan terbesar kredit terjadi pada LU pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 70,26% (yoy). Kredit pada LU tersebut setara dengan Rp10,64 triliun. Pertumbuhan tersebut sejalan dengan penyaluran kredit perkebunan tebu di Provinsi Papua Selatan.

Sementara itu, LU perdagangan besar dan eceran mengalami kontraksi sebesar -4,43% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya -2,02% (yoy). Penyaluran kredit pada LU pertambangan turut berkontraksi -3,79% (yoy), melandai jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi -10,37% (yoy). Kontraksi LU pertambangan disebabkan oleh dampak lanjutan insiden longsor di perusahaan tambang pada akhir 2025.

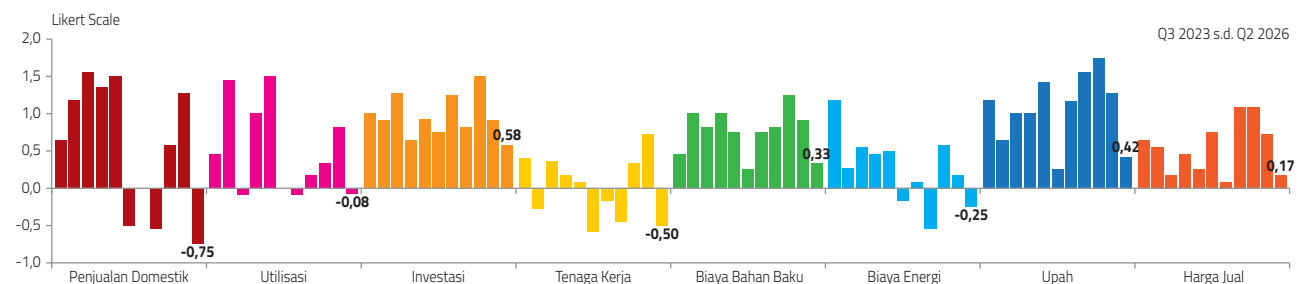
Berdasarkan jenis penggunaan, kredit konsumsi dan kredit investasi tetap tumbuh pada triwulan II 2026,

sementara kredit modal kerja mengalami kontraksi. Kredit Investasi mencatatkan pertumbuhan tertinggi di antara jenis kredit lainnya sebesar 49,93% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 26,94% (yoy). Pertumbuhan kredit investasi secara sektoral didorong oleh LU pertanian, perburuan, dan kehutanan yang tumbuh 89,62% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 57,76% (yoy). Kredit konsumsi pada triwulan laporan tumbuh sebesar 8,30% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 9,71% (yoy). Di sisi lain, Kredit Modal Kerja (KMK) berkontraksi sebesar -1,51% (yoy), melandai dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar -3,71% (yoy).

Nilai kredit Papua dan DOB pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp53,78 triliun. Kredit dengan proporsi terbesar adalah kredit konsumsi dengan nilai Rp25,21 triliun atau mencapai 46,88% dari total kredit. Selanjutnya, kredit modal kerja dan investasi dengan nilai masing-masing sebesar Rp14,34 triliun dan Rp14,24 triliun, atau setara proporsi 26,65% dan 26,47% dari total kredit.

Sementara itu, secara spasial nilai kredit terbesar tercatat pada Provinsi Papua dengan nilai Rp23,13 Triliun atau mencapai 43,01% dari total kredit. Selanjutnya, Provinsi Papua Selatan dengan nilai Rp14,36 Triliun atau 26,70% dari total kredit diikuti Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan dengan masing-masing nilai kredit Rp12,99 Triliun (24,15% dari total kredit) serta Rp3,27 Triliun (6,13% dari total kredit).

Kualitas penyaluran kredit di Papua dan DOB pada triwulan II 2026 tetap terjaga. Rasio NPL pada triwulan laporan mencapai 2,45%, lebih rendah dibandingkan



Sumber: Liaison Bank Indonesia

Grafik 3.5 Perkembangan Indikator Dunia Usaha Provinsi Papua

triwulan sebelumnya sebesar 2,67% (Grafik 3.4). Secara spasial, Rasio NPL terendah terdapat pada Provinsi Papua Selatan dengan rasio 0,57%, diikuti oleh Provinsi Papua Tengah dengan rasio 2,36%, Provinsi Papua Pegunungan dengan rasio 3,09%, dan Provinsi Papua dengan rasio 3,59%. Secara keseluruhan, nilai NPL masih di bawah batas aman yang ditetapkan oleh OJK sebesar 5%.

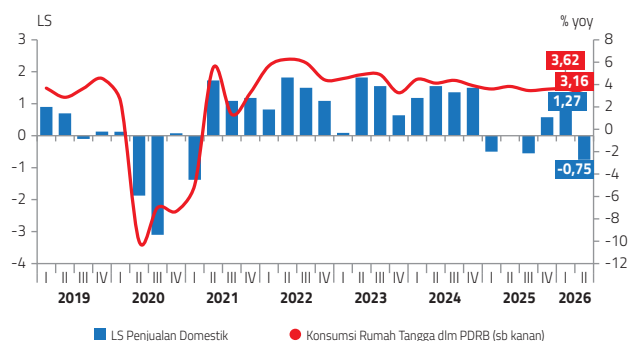
3.2 KETAHANAN SEKTOR KORPORASI

3.2.1 Kinerja Korporasi

Pertumbuhan tahunan *output* korporasi di Papua dan DOB pada triwulan II 2026 menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini diindikasikan oleh hasil *liaison* yang menunjukkan penurunan permintaan domestik pada triwulan II dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan penurunan tingkat utilisasi. Pelaksanaan *liaison* pada triwulan II 2026 dilakukan pada korporasi yang bergerak di LU Pertambangan dan Penggalan; LU Perdagangan Besar dan Eceran; LU Konstruksi; LU Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum; LU Pengadaan Listrik dan Gas; LU Administrasi Pemerintahan; LU Industri Pengolahan dan LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Penurunan output korporasi menunjukkan dampak penurunan pada tingkat permintaan masyarakat.

Permintaan Domestik

Selaras dengan kinerja output, permintaan domestik output korporasi di Papua dan DOB pada triwulan II 2026 menurun dibandingkan triwulan I 2026. Hal ini ditunjukkan oleh skala likert (*likert scale* - LS) permintaan domestik pada



Sumber: Liaison Bank Indonesia

Grafik 3.6 Perkembangan LS Permintaan Domestik

triwulan II sebesar -0,75, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,27 (Grafik 3.6).

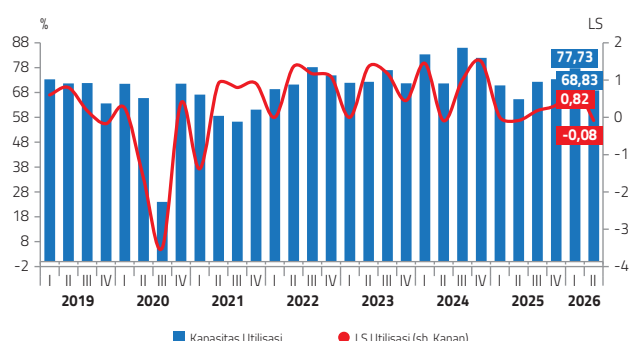
Sejalan dengan itu, konsumsi rumah tangga di triwulan II 2026 tumbuh melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya serta Survei Konsumen (SK) yang menunjukkan Indeks Konsumsi Barang Tahan Lama sebesar 93,1 pada triwulan II 2026, menurun dari triwulan sebelumnya sebesar 97,3.

Kapasitas Utilisasi

Kapasitas utilisasi korporasi pada triwulan II 2026 menurun sejalan dengan perlambatan konsumsi RT dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kapasitas utilisasi pada triwulan II 2026 sebesar 68,83%, menurun dari triwulan sebelumnya sebesar 77,73%. Sejalan dengan penurunan kapasitas utilisasi, LS kapasitas utilisasi pada triwulan II 2026 sebesar -0,08, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,83 (Grafik 3.7). Tingkat utilisasi yang relatif menurun tercatat pada mayoritas *contact*. *Contact* LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menunjukkan utilisasi yang relatif menurun dibandingkan dengan triwulan I 2026 dan triwulan II 2025 seiring penurunan produktivitas perkebunan.

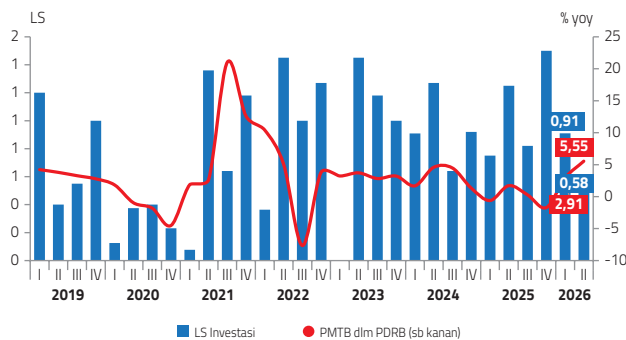
Investasi

Investasi korporasi pada triwulan II 2026 menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini tercermin melalui LS investasi hasil *liaison* pada triwulan laporan yang bernilai 0,58, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,91 (Grafik 3.8). Skala *likert*



Sumber: Liaison Bank Indonesia

Grafik 3.7 Perkembangan LS Utilisasi



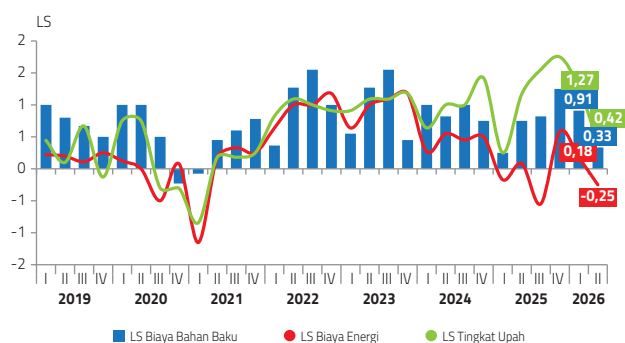
Sumber: Liaison Bank Indonesia

Grafik 3.8 Perkembangan LS Investasi

yang bernilai positif menunjukkan pelaku usaha masih optimis terhadap rencana perkembangan investasi ke depan. Sejalan dengan itu, pertumbuhan kredit investasi sebesar 49,93% (yoy) pada triwulan II 2026 menunjukkan kecenderungan korporasi untuk melakukan investasi pada periode mendatang.

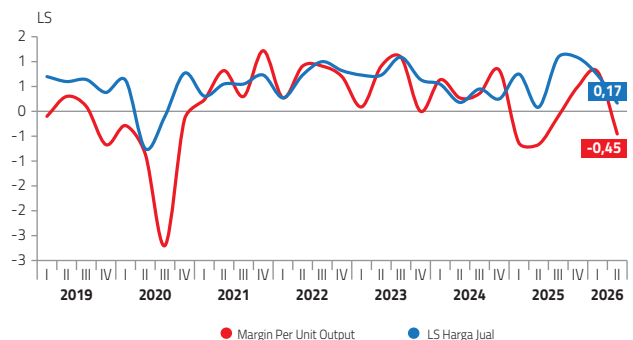
Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja oleh korporasi pada triwulan II 2026 menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Nilai LS tenaga kerja yang bernilai -0,50 lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,73. Penurunan ini menunjukkan penyerapan jumlah tenaga kerja yang berada di bawah 0,00 yang mengindikasikan upaya pelaku usaha untuk menekan biaya operasional perusahaan di tengah ketidakpastian ekonomi.



Sumber: Liaison Bank Indonesia

Grafik 3.9 Perkembangan LS Biaya



Sumber: Liaison Bank Indonesia

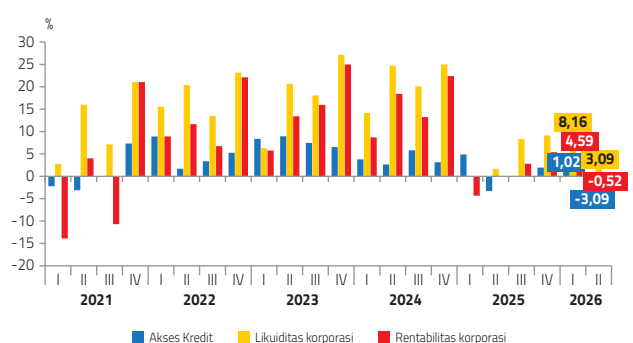
Grafik 3.10 Perkembangan LS Margin dan harga Jual

Biaya dan Harga Jual

Biaya produksi pada triwulan II 2026 mengalami penurunan dibandingkan triwulan I 2026. *Contact* LU Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan melaporkan penurunan biaya operasional akibat penurunan utilisasi mesin produksi.

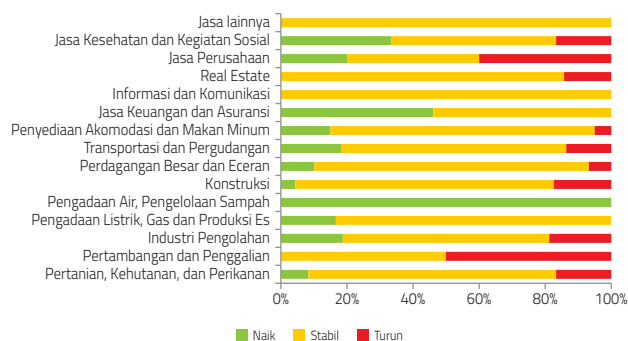
Biaya energi pada triwulan II 2026 mengalami penurunan dibandingkan triwulan I 2026. Penurunan ini terjadi terutama pada *Contact* LU Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan seiring dengan penurunan utilisasi mesin produksi.

Harga jual barang dan jasa yang diproduksi korporasi pada triwulan II 2026 relatif lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 3.10). *Contact* LU Perdagangan Besar dan Eceran menyatakan penurunan



Sumber: SKDU Bank Indonesia

Grafik 3.11 Akses Kredit, Likuiditas dan Rentabilitas Korporasi



Sumber: SKDU Bank Indonesia

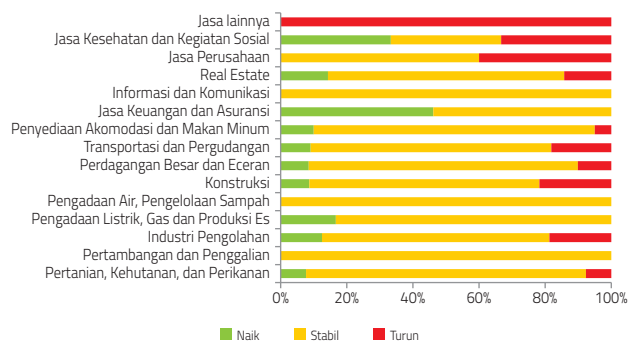
Grafik 3.12 Perkembangan Likuiditas Berdasarkan Sektor

harga disebabkan oleh promo yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan daya beli konsumen.

Kondisi Keuangan

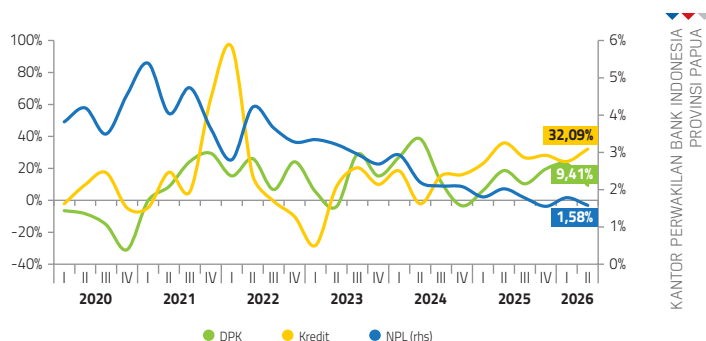
Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua menunjukkan bahwa kondisi keuangan korporasi di Papua dan DOB pada triwulan II 2026 dalam kondisi yang relatif terbatas dari triwulan sebelumnya.

Saldo bersih tertimbang (SBT) rentabilitas korporasi pada triwulan II 2026 tercatat sebesar -0,52%, lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 4,59%. Selaras dengan SBT rentabilitas, SBT likuiditas mengalami penurunan. Likuiditas tercatat sebesar 3,09% pada triwulan II 2026, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 8,16% (Grafik 3.11).



Sumber: SKDU Bank Indonesia

Grafik 3.13 Perkembangan Rentabilitas Berdasarkan Sektor



Sumber: Bank Indonesia

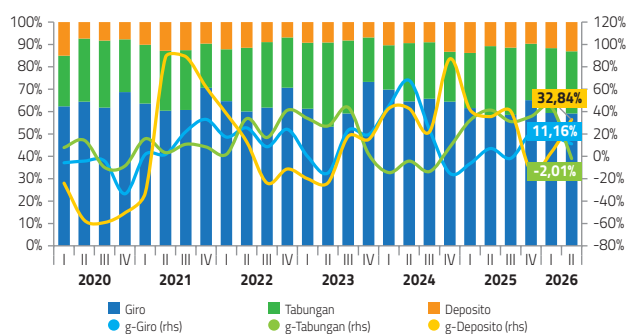
Grafik 3.14 Exposure Perbankan Pada Korporasi

Akses kredit korporasi turut menurun dibandingkan triwulan sebelumnya, akses kredit tercatat sebesar -3,09% menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,02%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perbankan masih berhati – hati dalam menyalurkan pinjaman, di tengah ketidakpastian ekonomi global.

3.2.2 Sumber Kerentanan Korporasi

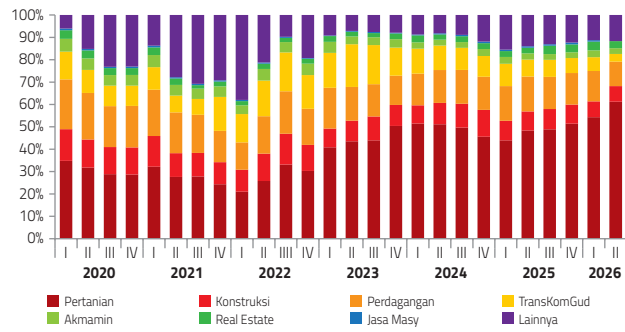
Secara umum, faktor yang mempengaruhi kerentanan korporasi di Papua dan DOB pada triwulan II 2026 adalah volatilitas kondisi ekonomi akibat gejolak geopolitik global.

Strategi diversifikasi diperlukan untuk menghasilkan produk yang lebih beragam, perusahaan juga perlu lebih adaptif terhadap dinamika konsumsi masyarakat. Melalui diversifikasi, perusahaan dapat menjangkau berbagai kelompok konsumen dan meminimalkan risiko penurunan permintaan pada produk tertentu.

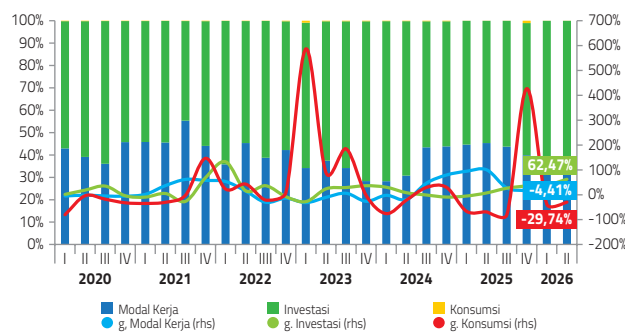


Sumber: Bank Indonesia

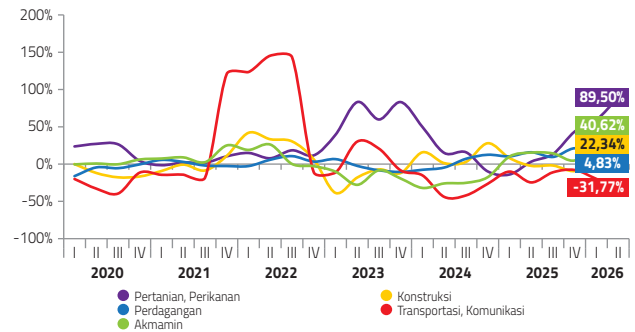
Grafik 4.15 Perkembangan DPK Sektor Korporasi



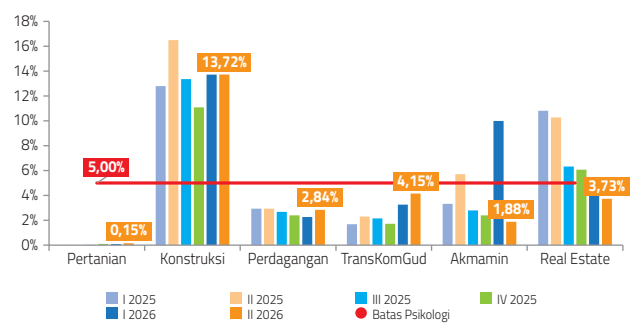
Grafik 3.16 Kredit Korporasi Berdasarkan Sektor



Grafik 3.18 Kredit Korporasi Berdasarkan Penggunaan



Grafik 3.17 Pertumbuhan Kredit Korporasi Berdasarkan Sektor



Grafik 3.19 NPL Kredit Korporasi Berdasarkan Sektor

3.2.3 Exposure Perbankan Sektor Korporasi Penyaluran Kredit Perbankan

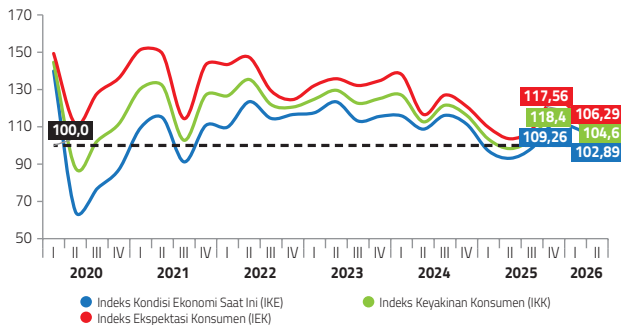
Penyaluran kredit perbankan sektor korporasi di Papua dan DOB pada triwulan II 2026 tumbuh 32,09% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 24,29% (yoy). Penyaluran kredit sektor korporasi di Papua dan DOB pada triwulan II 2026 mencapai Rp16,89 triliun (Grafik 3.16). Secara spasial, pertumbuhan penyaluran kredit korporasi tertinggi terjadi di Provinsi Papua Selatan sebesar 133,57% (yoy). Sementara itu, 3 (tiga) provinsi lainnya mengalami kontraksi, yaitu Provinsi Papua Pegunungan sebesar -2,11% (yoy), Provinsi Papua sebesar -9,02% (yoy), dan Provinsi Papua Tengah, sebesar -19,06% (yoy).

Penyaluran kredit kepada korporasi memiliki pangsa 31,42% terhadap total penyaluran kredit di Papua dan DOB. Pertumbuhan penyaluran kredit korporasi secara sektoral terutama didorong oleh pertumbuhan kredit pada LU Pertanian dan Perikanan sebesar 89,50% (yoy)

dan LU Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum sebesar 40,62% (yoy) (Grafik 3.17).

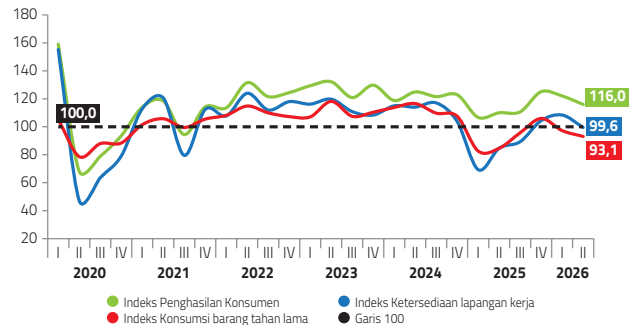
Kualitas penyaluran kredit korporasi di Papua dan DOB pada triwulan II 2026 tetap terjaga. Hal ini tercermin pada rasio NPL korporasi sebesar 1,58%, lebih baik dibandingkan triwulan I 2026 sebelumnya sebesar 1,79%. Penurunan rasio NPL disebabkan oleh menurunnya NPL pada LU Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum dan LU Real Estate. Secara spasial, rasio NPL korporasi tertinggi tercatat pada Provinsi Papua Pegunungan sebesar 23,78%, yang berada di atas batas aman yang ditetapkan oleh OJK sebesar 5%. Sementara itu, kualitas penyaluran kredit korporasi di 3 (tiga) provinsi lain tetap terjaga yaitu Provinsi Papua dengan rasio NPL sebesar 2,28%, Provinsi Papua Selatan dengan rasio NPL sebesar 0,02%, dan Provinsi Papua Tengah dengan rasio NPL sebesar 4,24%.

DPK Korporasi di Papua dan DOB pada triwulan laporan tumbuh 9,41% (yoy), melambat dibandingkan triwulan



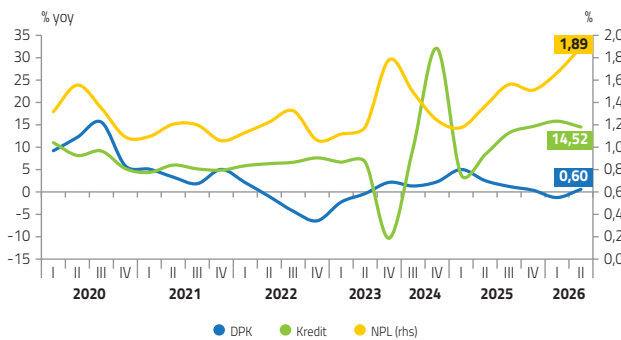
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.20 IEK, IKK, dan IKE



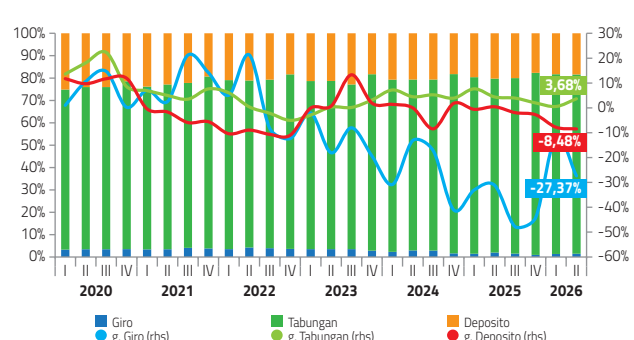
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.21 Indeks Kondisi Saat Ini



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.22 Eksposur Perbankan Pada Rumah Tangga



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.23 Perkembangan DPK Rumah Tangga

sebelumnya yang tumbuh sebesar 22,64% (yoy). Penurunan ini didorong oleh melambatnya pertumbuhan komponen giro yaitu sebesar 11,16% (yoy) serta berkontraksinya pertumbuhan komponen tabungan sebesar -2,01% (yoy). Secara spasial, pertumbuhan DPK korporasi tertinggi tercatat di Provinsi Papua Selatan sebesar 122,64% (yoy). Sementara itu, 3 (tiga) provinsi lainnya mengalami kontraksi, yaitu Provinsi Papua Tengah sebesar -1,53% (yoy), Provinsi Papua sebesar -2,64% (yoy), serta Provinsi Pegunungan sebesar -39,16% (yoy).

DPK korporasi yang tumbuh ini sejalan dengan terbatasnya penggunaan dana untuk ekspansi bisnis, selaras dengan perilaku *wait and see* di tengah ketidakpastian.

DPK sektor korporasi tercatat sebesar Rp12,41 triliun atau sekitar 23,51% dari total DPK Papua dan DOB. Komposisi DPK sektor korporasi terdiri dari 59,17% giro, 27,77% tabungan, dan 13,06% deposito.

3.3 ASESMEN SEKTOR RUMAH TANGGA

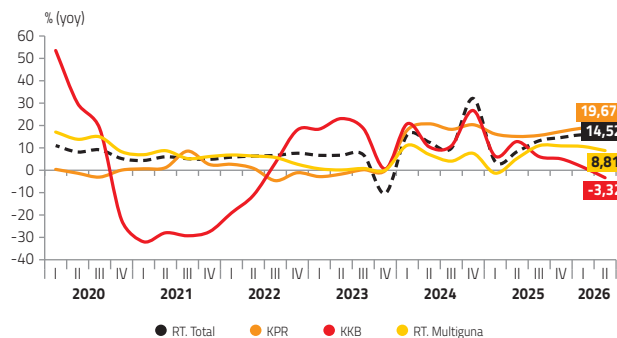
3.3.1 Sumber Kerentanan Sektor Rumah Tangga

Secara umum, faktor yang mempengaruhi kerentanan RT di Papua dan DOB pada triwulan II 2026 adalah volatilitas harga komoditas terutama disebabkan oleh peningkatan harga energi dunia yang mendorong kenaikan harga BBM Non-Subsidi dan LPG Non-Subsidi. Hal ini tercermin pada hasil Survei Konsumen (SK) triwulan laporan untuk indikator perkiraan penghasilan 6 bulan mendatang dibandingkan saat ini, yang menunjukkan penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Begitu juga untuk indikator penghasilan saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu menunjukkan indeks yang lebih rendah.

Hasil survei konsumen (SK) pada triwulan II 2026 menunjukkan bahwa tingkat keyakinan masyarakat terhadap kondisi perekonomian masih berada pada level optimis namun cenderung terbatas. Indeks keyakinan

konsumen (IKK) pada triwulan II 2026 berada pada level optimis 104,6 (lebih dari 100), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 118,4. Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) berada di level optimis sebesar 102,89, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 109,26. Optimisme konsumen sejalan dengan indeks penghasilan yang berada pada level optimis sebesar 116,00 di tengah ketersediaan lapangan kerja yang berada pada level 99,6.

Ekspektasi konsumen terhadap kondisi perekonomian pada masa mendatang tetap kuat. Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) pada triwulan laporan lebih rendah namun masih tetap pada level optimis sebesar 106,29 (Grafik 3.20). Keyakinan konsumen ini mengindikasikan perilaku *wait and see* dalam mencermati perkembangan kondisi perekonomian dan kebijakan pemerintah di masa mendatang.



Sumber: Bank Indonesia

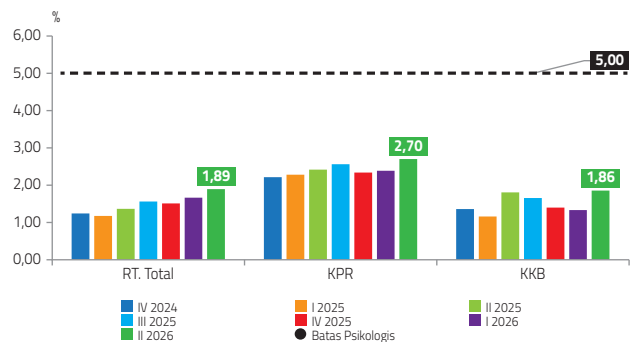
Grafik 3.24 Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Penggunaan

3.3.2 Exposure Perbankan dalam Rumah Tangga (RT)

Kredit RT tetap tumbuh pada triwulan II 2026 di tengah daya beli masyarakat yang tetap terjaga.

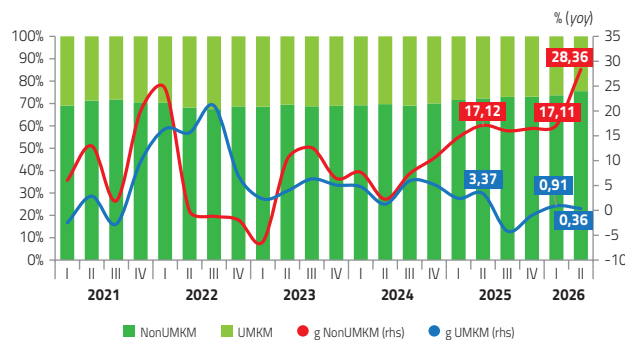
Kredit RT di Papua dan DOB pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 14,52% (yoy) melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 15,83% (yoy) (Grafik 3.22). Secara spasial, pertumbuhan kredit RT tertinggi tercatat di Provinsi Papua Tengah sebesar 8,96% (yoy), diikuti Provinsi Papua Pegunungan sebesar 5,20% (yoy), Provinsi Papua Selatan sebesar 4,52% (yoy), dan Provinsi Papua sebesar 2,67% (yoy).

Pertumbuhan penyaluran kredit RT didorong oleh pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang tumbuh sebesar 19,67% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 18,92% (yoy) (Grafik 3.24). Pertumbuhan KPR selaras dengan terus berlangsungnya



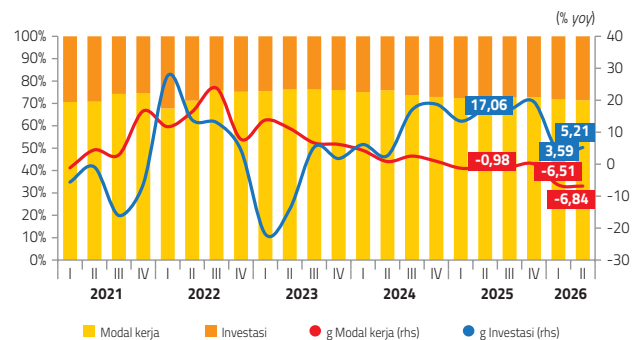
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.25 NPL Rumah Tangga Berdasarkan Penggunaan



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.26 Perkembangan Kredit UMKM dan Non UMKM



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.27 Kredit UMKM Berdasarkan Penggunaan

penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) perbankan. KPR memiliki pangsa sebesar 18,08% dari kredit konsumsi.

Di sisi lain, Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) terkontraksi sebesar -3,32% (yoy), berbalik arah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,38% (yoy). Komponen KKB memiliki pangsa 1,65% dari kredit konsumsi. Nilai kredit yang disalurkan pada RT tercatat mencapai Rp35,40 triliun atau 70,68% dari total kredit di Papua dan DOB.

NPL kredit RT pada triwulan II 2026 lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Rasio NPL kredit RT pada triwulan II 2026 sebesar 1,89%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,66%. Secara spasial, rasio NPL tertinggi tercatat pada Provinsi Papua sebesar 2,22%, diikuti oleh Provinsi Papua Tengah sebesar 1,81%, Provinsi Papua Pegunungan sebesar 1,25%, dan Provinsi Papua Selatan sebesar 1,08%. Rasio tersebut masih berada di bawah level psikologis 5%. Rasio NPL untuk KPR pada triwulan laporan turut terjaga meski meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 2,70%. Sejalan dengan itu, NPL kredit KKB sebesar 1,86% pada triwulan II 2026 meningkat dibandingkan 1,33% pada triwulan sebelumnya.

Dana Pihak Ketiga Rumah Tangga (DPK RT)

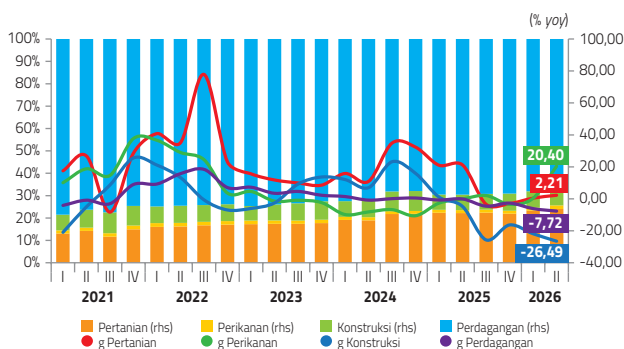
DPK RT pada triwulan II 2026 mencapai Rp30,61 triliun. Komposisi DPK RT tetap didominasi oleh tabungan dengan pangsa mencapai 80,16%, sementara sisanya terbagi menjadi deposito dan giro dengan pangsa

masing-masing sebesar 18,41% dan 1,42%. DPK rumah tangga (RT) di wilayah Papua pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 0,60% (yoy), berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi -1,24% (yoy). Secara spasial, pertumbuhan DPK RT tertinggi tercatat di Provinsi Papua Tengah sebesar 6,96% (yoy), diikuti Provinsi Selatan sebesar 0,50% (yoy). Sementara itu, Provinsi Papua mengalami kontraksi sebesar -1,02% (yoy), diikuti Provinsi Papua Pegunungan yang turut mengalami kontraksi -8,63% (yoy).

Komponen tabungan merupakan komponen DPK RT yang mencatatkan pertumbuhan. Tabungan RT tumbuh hingga 3,68% (yoy) pada triwulan II 2026, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 0,58% (yoy). Di sisi lain komponen giro dan deposito menjadi penahan laju pertumbuhan DPK RT yang masing-masing terkontraksi sebesar -27,37% (yoy) dan -8,48% (yoy).

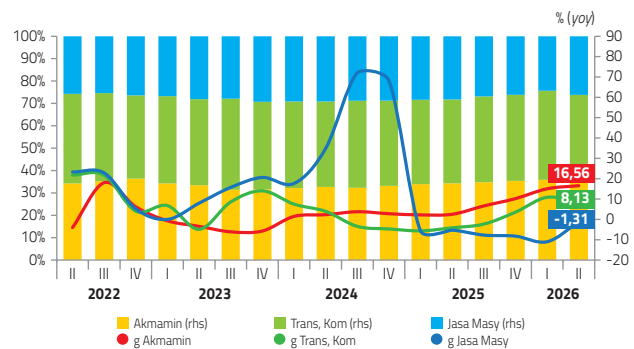
3.4 AKSES KEUANGAN UMKM

Penyaluran kredit UMKM di Papua dan DOB pada triwulan II 2026 tumbuh melambat. Penyaluran kredit UMKM di Papua dan DOB pada triwulan II 2026 mencapai Rp13,17 triliun, tumbuh sebesar 0,36% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,91% (yoy). Secara spasial, pertumbuhan kredit UMKM tertinggi tercatat di Provinsi Papua Tengah sebesar 6,39% (yoy), diikuti Provinsi Papua Selatan sebesar 4,03% (yoy). Di sisi lain, Provinsi Papua mengalami kontraksi senilai -2,94% (yoy), diikuti Provinsi Papua Pegunungan senilai -6,09% (yoy).



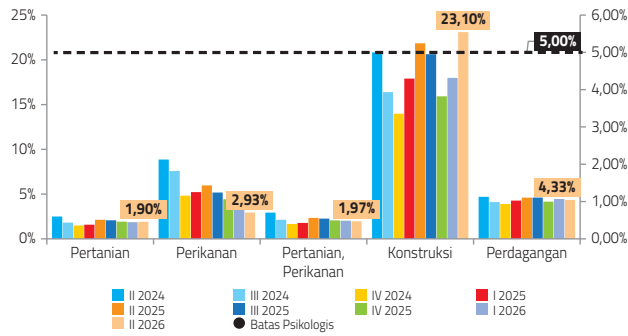
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.28a Kredit UMKM Berdasarkan Sektor



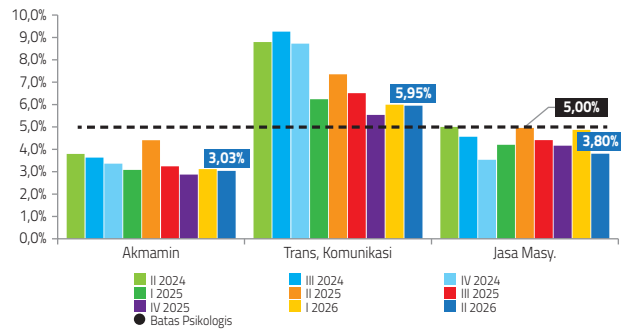
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.28b Kredit UMKM Berdasarkan Sektor



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.29a NPL Kredit Berdasarkan Sektor



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.29b NPL Kredit UMKM Berdasarkan Sektor

Komponen Kredit Investasi (KI) tercatat mengalami pertumbuhan 5,21% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,59% (yoy). Sementara itu, Kredit modal kerja mengalami kontraksi sebesar -6,84% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar -6,51% (yoy).

Melambatnya kredit UMKM pada triwulan II 2026 utamanya disebabkan oleh kontraksi kredit UMKM LU Perdagangan Besar dan Eceran dengan pangsa 47,73% serta kredit UMKM LU Konstruksi (pangsa 5,00%). Sementara itu, UMKM LU Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi yang memiliki pangsa 7,22% mengalami perlambatan (Grafik 3.28a).

Penyaluran kredit UMKM perlu terus didorong untuk memperkuat struktur perekonomian serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Komitmen Bank Indonesia untuk mendorong akses perbankan UMKM sebagai salah satu roda penggerak perekonomian terus dilakukan melalui kegiatan kurasi UMKM potensial untuk memperoleh pembiayaan dari

perbankan serta meningkatkan kapasitas dan kualitas UMKM lokal melalui *business matching*.

Kualitas penyaluran kredit UMKM di Papua dan DOB pada triwulan II 2026 berada di dalam batas aman yang ditetapkan oleh OJK. NPL pada triwulan II tercatat sebesar 4,87% sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,86% disebabkan utamanya oleh LU Konstruksi yang pada triwulan II 2026 memiliki rasio NPL sebesar 23,10%, meningkat dibandingkan triwulan I 2026 sebesar 17,99%. Masih tingginya NPL LU Konstruksi perlu menjadi perhatian institusi keuangan serta pelaku usaha sektor konstruksi. Secara spasial, rasio NPL tertinggi terdapat pada Provinsi Papua Pegunungan dengan nilai 8,31%, diikuti oleh Provinsi Papua Tengah dengan nilai 5,91%, Provinsi Papua dengan nilai 5,21%, serta Provinsi Papua Selatan sebesar 1,69%.

Kualitas kredit UMKM yang kembali berada di dalam batas aman yang ditetapkan oleh OJK 5% ini perlu terus dipertahankan oleh seluruh pelaku UMKM agar kualitas kredit dapat terus terjaga sehingga membentuk ekosistem pembiayaan yang sehat.

Boks 3 : PERKEMBANGAN KREDIT PRODUKTIF PAPUA DAN DOB DITOPANG LAPANGAN USAHA (LU) PERTANIAN

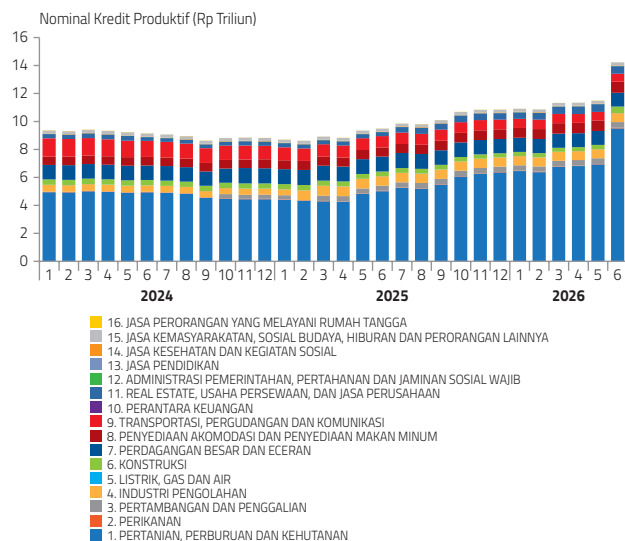
Stabilitas sistem keuangan daerah dipantau salah satunya melalui perkembangan kredit produktif. Di Papua dan DOB, tercatat bahwa pertumbuhan total kredit produktif tumbuh positif 13,73% (yoy) dan tertinggi sejak 2024.

Apabila diidentifikasi per komponen kredit produktif, pertumbuhan tertinggi terjadi pada kredit investasi yang tumbuh 50% (yoy) dari Rp9,49 Triliun pada Juni 2025 menjadi Rp14,23 Triliun pada Juni 2026. Hal ini yang berkontribusi signifikan dalam menggerakkan perekonomian Papua dan DOB pada Triwulan II 2026.

Kredit investasi Lapangan Usaha (LU) Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan tumbuh sebesar 89,62% (yoy), atau setara dengan Rp9,5 Triliun pada Juni 2026. LU ini berkontribusi 54,21% dari total kredit investasi Juni 2026, menjadikannya sebagai kontributor terbesar kredit investasi.

Berdasarkan nominal kredit tiap LU yang menyusun ekonomi Papua dan DOB, terlihat bahwa kredit investasi didominasi oleh LU Pertanian (Grafik 2).

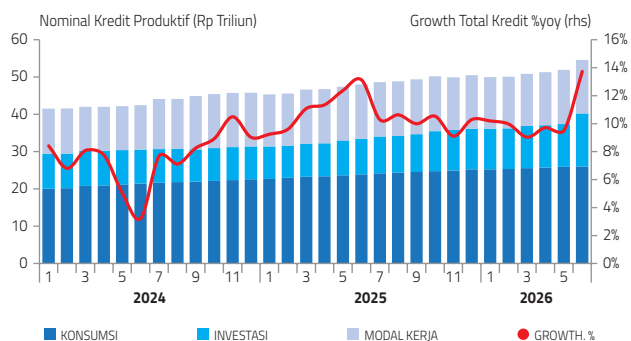
Selanjutnya, NPL kredit LU Pertanian cenderung bergejolak dan relatif berisiko pada 2024-2025. Namun demikian, di 2026 relatif stabil dan di bawah batas aman 5%. Hal ini



Sumber: LBUT, diolah

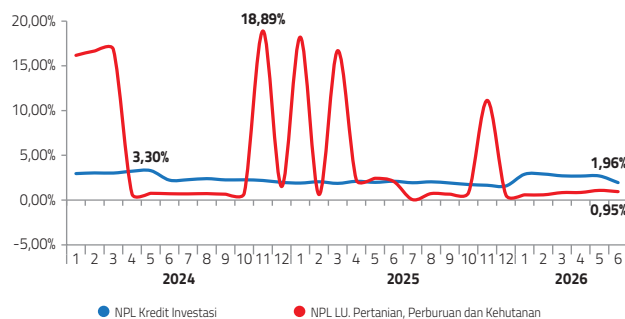
Grafik 2. Pangsa Kredit Produktif per LU

menunjukkan bahwa penggunaan kredit investasi pada LU Pertanian lebih produktif dengan tingkat kelancaran pembayaran yang lebih baik. Hal ini relevan dengan berkembangnya investasi di Kawasan Sentra Produksi Pangan Papua Selatan sebagai lumbung pangan.



Sumber: LBUT, diolah

Grafik 1. Perkembangan Kredit Produktif Papua dan DOB



Sumber: LBUT, diolah

Grafik 3. Perkembangan NPL Kredit Investasi dan NPL Lapangan Usaha (LU) Pertanian





BAB IV

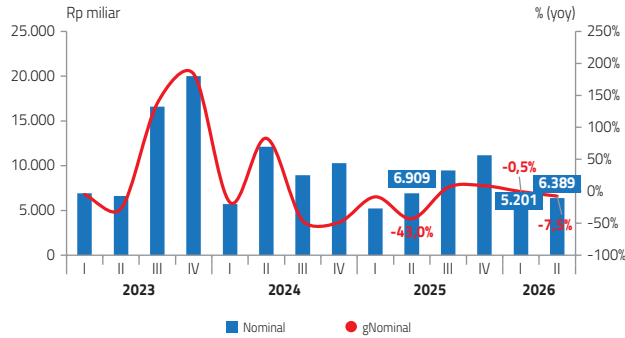
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Transaksi BI-RTGS di Papua dan DOB pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp6,4 triliun atau berkontraksi -7,52% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar -0,45% (yoy). Sedangkan transaksi SKNBI tercatat sebesar Rp1,83 triliun atau tumbuh sebesar 0,95% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,19% (yoy).

Penggunaan kartu debit di Papua dan DOB pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp19,13 triliun atau tumbuh 2,44% (yoy), berbalik arah dibandingkan dengan angka triwulan sebelumnya yang berkontraksi -1,68% (yoy). Selain itu, penggunaan kartu kredit tercatat sebesar Rp157 miliar atau tumbuh sebesar 11,42% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan angka triwulan sebelumnya yang tumbuh 50,22% (yoy).

Transaksi *e-commerce* di Papua dan DOB pada triwulan II 2026 tercatat Rp228,91 miliar atau tumbuh sebesar 5,00% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 33,86% (yoy). Sedangkan transaksi QRIS tercatat sebesar Rp1,35 triliun atau tumbuh 6,76% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,03% (yoy). Hal ini sejalan dengan jumlah merchant QRIS dan jumlah total pengguna QRIS yang tumbuh masing-masing sebesar 12,98% (yoy) dan 10,77% (yoy).

Aliran uang kartal melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua triwulan II 2026 menunjukkan posisi net inflow sebesar Rp129 miliar, di mana pada triwulan sebelumnya mengalami net inflow sebesar Rp4,21 triliun. Hal ini sejalan dengan normalisasi permintaan uang kartal pada triwulan II 2026 pasca periode HBKN Idul Fitri di triwulan I 2026.



Sumber: Bank Indonesia.

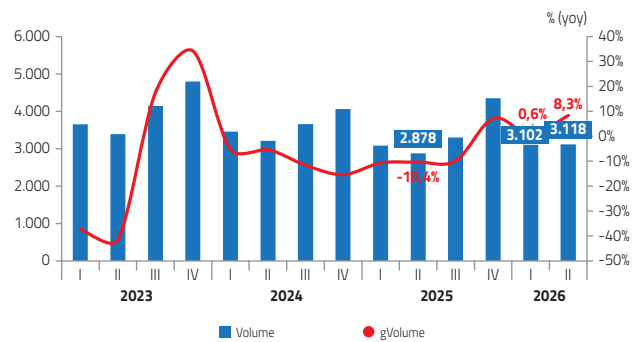
Grafik 4.1 Perkembangan Nilai Transaksi BI-RTGS

4.1 SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI

Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)

Nominal transaksi nilai besar dari BI-RTGS di Papua dan DOB pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp6,4 triliun atau terkontraksi -7,5% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -0,5% (yoy) (Grafik 4.1). Secara spasial, pertumbuhan nominal transaksi BI-RTGS terbesar terjadi di Provinsi Papua Tengah sebesar 89,5% (yoy), diikuti Provinsi Papua Pegunungan sebesar 62,9% (yoy), Provinsi Papua Selatan sebesar -3,7% (yoy), dan Provinsi Papua sebesar -14,3% (yoy).

Volume transaksi tercatat sebesar 3,1 ribu transaksi atau tumbuh sebesar 8,3% (yoy), meningkat dibandingkan angka triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,6% (yoy) (Grafik 4.2). Secara spasial, pertumbuhan volume transaksi BI-RTGS terbesar terjadi di Provinsi Papua Tengah sebesar



Sumber: Bank Indonesia.

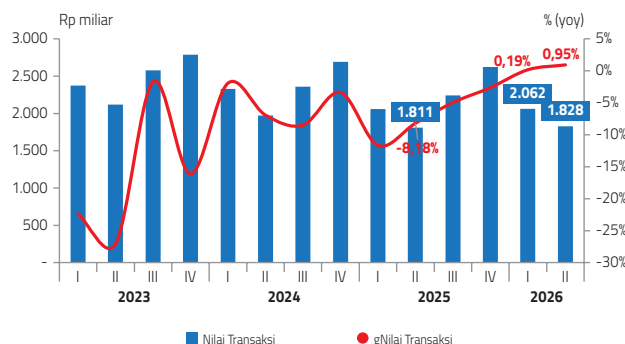
Grafik 4.2 Perkembangan Volume Transaksi BI-RTGS

89,6% (yoy), diikuti Provinsi Papua Pegunungan sebesar 55,6% (yoy), Provinsi Papua Selatan sebesar 8,5% (yoy), dan Provinsi Papua sebesar -0,5% (yoy).

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

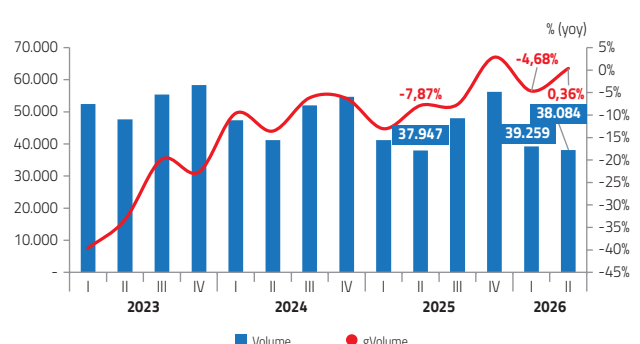
Nominal transaksi nilai kecil dari SKNBI di Papua dan DOB pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp1,83 triliun atau tumbuh sebesar 0,95% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,19% (yoy) (Grafik 4.3). Secara spasial, pertumbuhan nominal transaksi SKNBI terbesar terjadi di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 139,07% (yoy), diikuti Provinsi Papua Selatan sebesar 13,28% (yoy), Provinsi Papua Tengah sebesar 10,09% (yoy), dan Provinsi Papua sebesar -4,14% (yoy).

Volume transaksi SKNBI tercatat sebesar 38 ribu transaksi atau tumbuh sebesar 0,36% (yoy), berbalik arah dibandingkan triwulan



Sumber: Bank Indonesia.

Grafik 4.3 Perkembangan Nilai Transaksi SKNBI



Sumber: Bank Indonesia.

Grafik 4.4 Perkembangan Volume Transaksi SKNBI

sebelumnya yang terkontraksi sebesar -4,68% (yoy) (Grafik 4.4). Secara spasial, pertumbuhan volume transaksi SKNBI terbesar terjadi di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 74,96% (yoy), diikuti Provinsi Papua Tengah sebesar 1,93% (yoy), Provinsi Papua sebesar -0,51% (yoy), dan Provinsi Papua Selatan sebesar -8,68% (yoy).

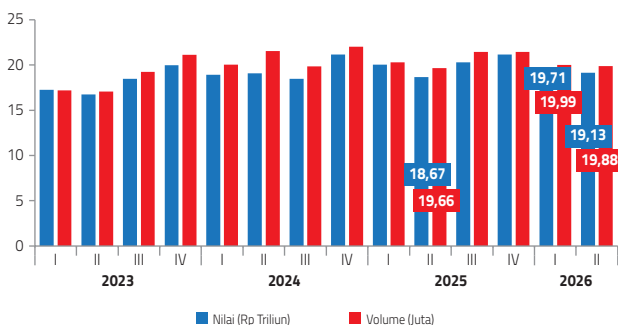
Perlambatan transaksi SKNBI di Papua dan DOB kembali melanjutkan tren kontraksinya sejak triwulan III 2022. Hal ini sejalan dengan adanya pilihan kanal pembayaran nilai kecil lainnya yaitu BI-FAST yang memiliki keunggulan keamanan, *real-time* dan murah sehingga dipertimbangkan sebagai opsi pembayaran baru.

4.2 ALAT PEMBAYARAN MENGGUNAKAN KARTU (APMK)

ATM/Debit

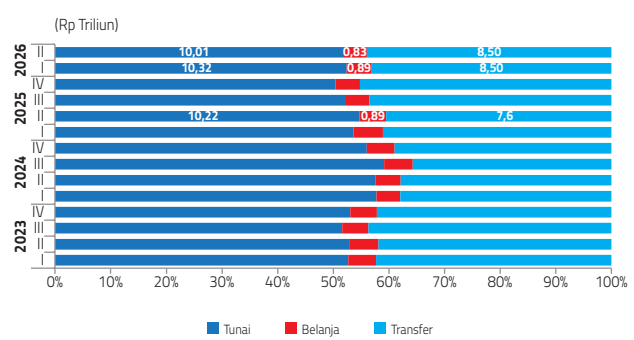
Nominal transaksi dengan menggunakan ATM/Debit pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp19,13 triliun atau meningkat 2,44% (yoy), berbalik arah dibandingkan dengan angka triwulan sebelumnya yang terkontraksi -1,68% (yoy) (Grafik 4.5). Secara spasial, pertumbuhan nominal transaksi ATM/Debit terbesar terjadi di Provinsi Papua sebesar 8,96% (yoy), diikuti Provinsi Papua Tengah sebesar 5,75% (yoy), Provinsi Papua Selatan sebesar 2,56% (yoy), dan Provinsi Papua Pegunungan sebesar -1,86% (yoy).

Hal ini sejalan dengan transaksi tunai menggunakan ATM/Debit yang terkontraksi sebesar -2,04% (yoy), meski melandai dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -4,01% (yoy). Adapun transaksi



Sumber: Bank Indonesia.

Grafik 4.5 Perkembangan Transaksi ATM/Debit



Sumber: Bank Indonesia.

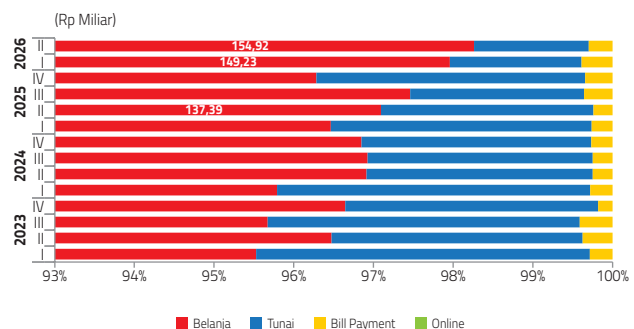
Grafik 4.6 Proporsi Transaksi ATM/Debit

tunai menggunakan ATM/Debit memiliki pangsa sebesar 51,76%, tertinggi di antara jenis transaksi ATM/Debit lainnya (Grafik 4.6).

Di sisi lain, kontraksi terjadi pada jenis transaksi belanja sebesar -7,02% (yoy) pada triwulan II 2026, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -16,29% (yoy). Total pangsa jenis transaksi belanja sebesar 4,30% dari keseluruhan transaksi menggunakan ATM/Debit, terkecil di antara transaksi lainnya.

Mesin ATM

Rasio ketersediaan layanan keuangan per area 1.000 km², pada triwulan II 2026 berada pada level 2,80. Indikator ini menunjukkan bahwa terdapat layanan sekitar 2 mesin ATM dalam area 1000 km² (Grafik 4.7). Secara spasial, persebaran Mesin ATM terbanyak terdapat di Provinsi Papua sebanyak 501, diikuti Provinsi Papua Tengah



Sumber: Bank Indonesia.

Grafik 4.7 Jumlah Mesin ATM

sebanyak 210, Provinsi Papua Selatan sebanyak 128, dan Provinsi Papua Pegunungan sebanyak 53.

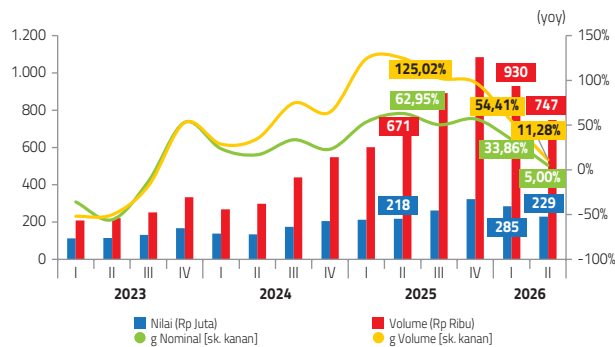
Rasio tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan rasio pada triwulan sebelumnya yang berada pada level 2,82. Jumlah mesin ATM pada triwulan II 2026 mencapai 894 mesin, sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebanyak 900.

Kartu Kredit

Nominal transaksi kartu kredit pada triwulan II 2026 sebesar Rp157 miliar atau tumbuh sebesar 11,42% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan angka triwulan sebelumnya yang tumbuh 50,22% (yoy). Secara spasial, pertumbuhan nominal transaksi kartu kredit terbesar terjadi di Provinsi Papua Selatan sebesar 29,13% (yoy), diikuti Provinsi Papua sebesar 14,71% (yoy), Provinsi Papua Tengah sebesar 14,28% (yoy), dan Provinsi Papua Pegunungan sebesar -9,49% (yoy).

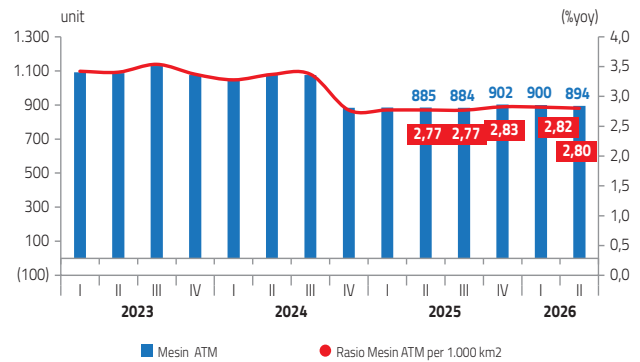
Di sisi lain, volume transaksi pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 30% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 47% (yoy) (Grafik 4.8). Secara spasial, pertumbuhan volume transaksi kartu kredit terbesar terjadi di Provinsi Papua Selatan sebesar 52,98% (yoy), diikuti Provinsi Papua sebesar 34,68% (yoy), Provinsi Papua Tengah sebesar 30,52% (yoy), dan Provinsi Papua Pegunungan sebesar 19,68% (yoy).

Sementara itu, jumlah kartu kredit yang beredar di Papua dan DOB pada triwulan II 2026 mencapai 50,79



Sumber: Bank Indonesia.

Grafik 4.8 Perkembangan Transaksi Kartu Kredit



Sumber: Bank Indonesia.

Grafik 4.9 Pangsa Jenis Transaksi Kartu Kredit

ribu, lebih sedikit dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 52,74 ribu atau menurun sebesar -0,55% (yoy). Secara spasial, pertumbuhan jumlah kartu kredit terbesar terjadi di Provinsi Papua Selatan sebesar 8,29% (yoy), diikuti Provinsi Papua sebesar 1,90% (yoy), Provinsi Papua Tengah sebesar -5,78% (yoy), dan Provinsi Papua Pegunungan sebesar -12,79% (yoy).

Berdasarkan jenisnya, transaksi kartu kredit terdiri dari transaksi tunai, belanja dan pembayaran tagihan. Berdasarkan nominal transaksinya, jenis transaksi yang umum digunakan adalah transaksi belanja dengan pangsa sebesar 98,26%, transaksi tunai dan pembayaran tagihan masing-masing memiliki pangsa sebesar 1,44% dan 0,30%. (Grafik 4.9). Transaksi tunai dan pembayaran tagihan tercatat terkontraksi sebesar -39,81% (yoy), sedangkan transaksi belanja dan transaksi kartu kredit untuk pembayaran tagihan masing masing tumbuh sebesar 12,76% (yoy) dan 39,31% (yoy).

Berdasarkan kualitas kreditnya, risiko kartu kredit bermasalah masih terkendali, tercermin dari relatif rendahnya rasio *Non Performing Loan* (NPL). Rasio NPL kartu kredit pada triwulan II 2026 sedikit meningkat ke angka 2,24%, dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,18%, di mana masih di bawah batas psikologis 5%.

Sinergi seluruh pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, BUMN, hingga korporasi diharapkan mampu meningkatkan penggunaan transaksi pembayaran nontunai. Salah satu faktor yang perlu ditingkatkan

adalah perluasan jangkauan layanan transaksi nontunai yang didukung dengan infrastruktur telekomunikasi yang memadai.

4.3 DIGITALISASI SISTEM PEMBAYARAN

E-Commerce

Nominal transaksi *e-commerce* di Papua dan DOB pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp228,91 miliar atau tumbuh sebesar 5,00% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatatkan transaksi sebesar Rp284,79 miliar atau tumbuh sebesar 33,86% (yoy) (Grafik 4.10). Secara spasial, pertumbuhan nominal transaksi *e-commerce* terbesar terjadi di Provinsi Papua Selatan sebesar 18,53% (yoy), diikuti Provinsi Papua sebesar 12,29% (yoy), Provinsi Papua Pegunungan sebesar -11,72% (yoy), dan Provinsi Papua Tengah sebesar -12,03% (yoy).

Namun demikian, pertumbuhan volume transaksi *e-commerce* yang tercatat sebesar 747,18 ribu transaksi atau tumbuh sebesar 11,28% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 54,41% (yoy). Secara spasial, pertumbuhan volume transaksi *e-commerce* terbesar terjadi di Provinsi Papua Selatan sebesar 21,17% (yoy), diikuti Provinsi Papua sebesar 13,51% (yoy), Provinsi Papua Pegunungan sebesar 9,68% (yoy), dan Provinsi Papua Tengah sebesar 0,85% (yoy).

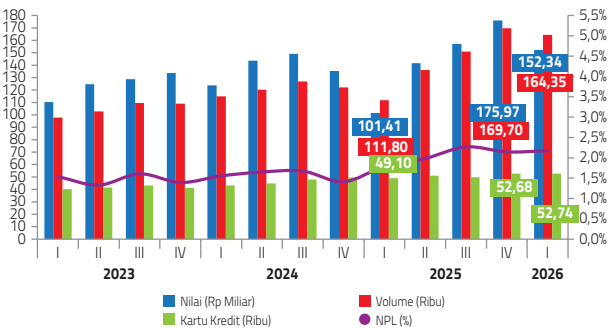
Berdasarkan metode pembayarannya, mayoritas transaksi *e-commerce* selama triwulan II 2026 menggunakan

pembayaran tunai dengan nilai sebesar Rp81,32 miliar atau 35,53% dari total transaksi (Grafik 4.11). Sementara itu, transaksi dengan menggunakan transfer dan *e-money* masing-masing memiliki pangsa sebesar 23,75% dan 8,52% (Grafik 4.11).

Metode pembayaran tunai tumbuh sebesar 59,66% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 92,28% (yoy). Normalisasi aktivitas belanja pasca periode HBKN Idul Fitri di awal tahun serta kecenderungan masyarakat untuk menabung, turut menurunkan aktivitas transaksi secara keseluruhan.

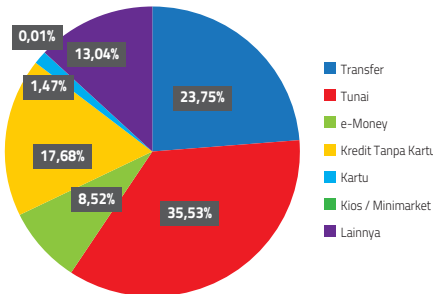
Sesuai dengan kondisi historisnya, transaksi *e-commerce* di Papua dan DOB didominasi oleh transaksi pembelian. Transaksi pembelian melalui *e-commerce* pada triwulan II 2026 mencapai 747,18 ribu transaksi sedangkan transaksi penjualan hanya dilakukan sebanyak 5.983 transaksi. Terbatasnya transaksi penjualan diperkirakan disebabkan oleh masih terbatasnya penjualan produk asal Papua dan DOB. Salah satu tantangan utama bagi pemasaran produk asal Papua ke daerah lain adalah terbatasnya daya saing produk akibat biaya pengiriman dan biaya produksi yang tinggi, dan terbatasnya variasi produk.

Mayoritas transaksi pembelian baik secara nominal maupun frekuensi dilakukan dari Kota Jayapura, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Merauke. Hal ini disebabkan oleh masih terpusatnya kegiatan ekonomi Papua dan DOB di ketiga daerah tersebut.



Sumber: Bank Indonesia.

Grafik 4.10 Nilai dan Volume Transaksi E-Commerce



Sumber: Bank Indonesia.

Grafik 4.11 Metode Pembayaran Transaksi E-Commerce

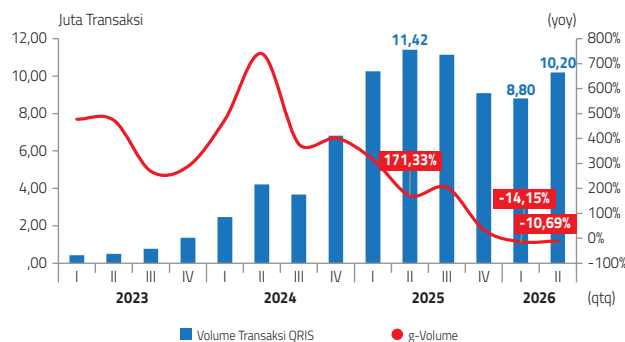
Quick Response Indonesian Standard (QRIS)

Digitalisasi yang semakin pesat dalam satu dekade terakhir turut berimplikasi terhadap cara masyarakat melakukan transaksi. Penggunaan uang tunai dalam transaksi ekonomi masyarakat mulai tergantikan dan beralih pada cara pembayaran yang lebih praktis melalui telepon pintar dan teknologi nirsentuh. Guna mengakselerasi digitalisasi alat pembayaran di Papua dan DOB, Bank Indonesia terus bersinergi bersama pemerintah daerah, perbankan dan korporasi dalam mendukung peningkatan penggunaan kanal pembayaran digital melalui QRIS.

Keunggulan metode pembayaran menggunakan QRIS yaitu Cemumuah atau Cepat, Mudah, Murah, Aman dan Handal, mendorong penggunaan yang masif oleh masyarakat. Jumlah total pengguna QRIS di Papua dan DOB pada triwulan II 2026 telah mencapai 240,44 ribu pengguna dengan jumlah pengguna baru sebanyak 9,58 ribu pengguna. Jumlah pengguna mengalami pertumbuhan pada triwulan II 2026 sebesar 10,77% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,18% (yoy).

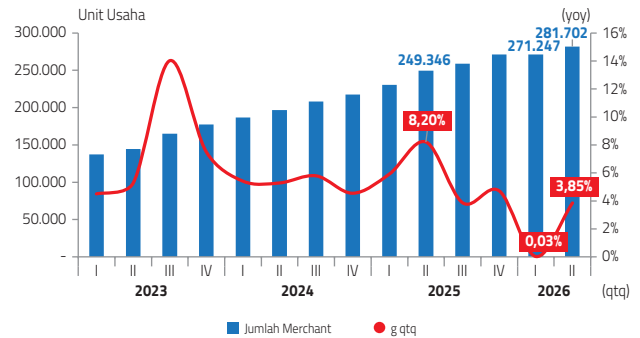
Nominal transaksi QRIS di Papua dan DOB di triwulan II 2026 juga mengalami peningkatan. Nominal transaksi menggunakan QRIS sepanjang Triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp1.41 triliun atau tumbuh sebesar 12,34% (yoy) dibandingkan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya.

Seiring tingkat adopsi yang semakin optimal, pertumbuhan jumlah pengguna QRIS mulai menunjukkan tren yang stabil (Grafik 4.14).



Sumber: Bank Indonesia.

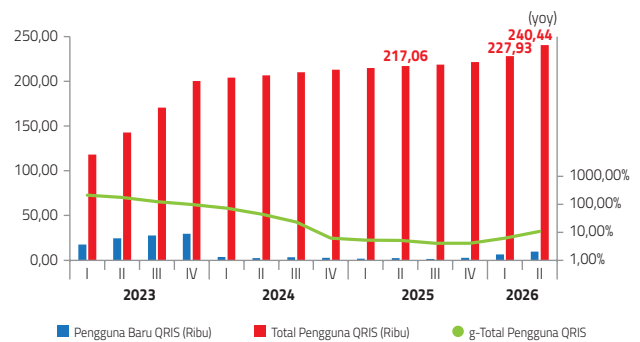
Grafik 4.12 Perkembangan Volume Transaksi QRIS



Sumber: Bank Indonesia.

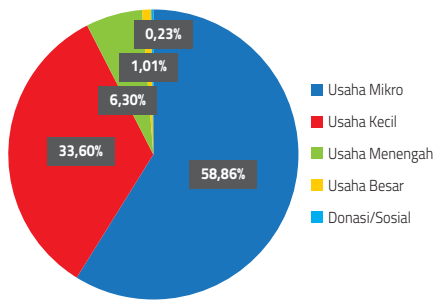
Grafik 4.13 Perkembangan Merchant QRIS

Selain itu, terdapat berbagai keuntungan bagi pelaku usaha termasuk UMKM yang menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran. Salah satu keuntungan penggunaan QRIS adalah peningkatan *credit profile* untuk memperluas akses pinjaman berdasarkan riwayat pencatatan transaksi. Transaksi yang dilakukan oleh pelaku UMKM otomatis tercatat ke rekening sehingga mudah dimonitor. Penggunaan QRIS juga dapat mengantisipasi risiko pencurian dan risiko uang palsu. Peningkatan frekuensi penjualan produk UMKM diharapkan lebih mudah tercapai melalui transaksi yang lebih mudah dan cepat. Jumlah *merchant* QRIS di Wilayah Papua pada triwulan II 2026 mencapai 281,702 unit usaha atau tumbuh sebesar 12,98% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 17,71% (yoy) (Grafik 4.13). Secara spasial, pertumbuhan *merchant* QRIS terbesar tercatat di Provinsi Papua Selatan sebesar 25,68% (yoy), diikuti Provinsi Papua Tengah sebesar 22,72% (yoy), Provinsi



Sumber: Bank Indonesia.

Grafik 4.14 Perkembangan Pengguna QRIS



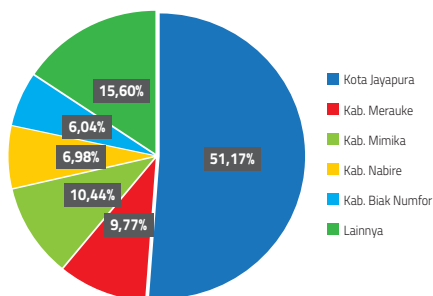
Sumber: Bank Indonesia.

Grafik 4.15 Pangsa Merchant QRIS

Papua Pegunungan sebesar 19,71% (yoy), dan Provinsi Papua sebesar 7,87% (yoy).

Merchant QRIS tersebut terdiri dari 58,84% usaha mikro; 33,59% usaha kecil; 6,30% usaha menengah; 1,01% usaha besar serta 0,23% lembaga donasi dan sosial (Grafik 4.15).

Berdasarkan lokasi merchant QRIS, terdapat 5 (lima) daerah dengan jumlah merchant pengguna QRIS terbanyak di Papua dan DOB pada triwulan II 2026. Daerah tersebut yaitu Kota Jayapura dengan jumlah merchant QRIS sebanyak 144.156 unit usaha (51,17%), Kabupaten Mimika sebanyak 29.417 unit usaha (10,44%), Kabupaten Merauke sebanyak 27.517 unit usaha (9,77%), Kabupaten Nabire sebanyak 19.652 unit usaha (6,98%), Kabupaten Biak Numfor sebanyak 17.012 unit (6,04%) dan sebanyak 43.948 unit (15,60%) merchant QRIS lainnya tersebar di 23 kabupaten/kota lainnya (Grafik 4.16). Kantor Perwakilan Bank Indonesia



Sumber: Bank Indonesia.

Grafik 4.16 Pangsa Merchant QRIS - Spasial

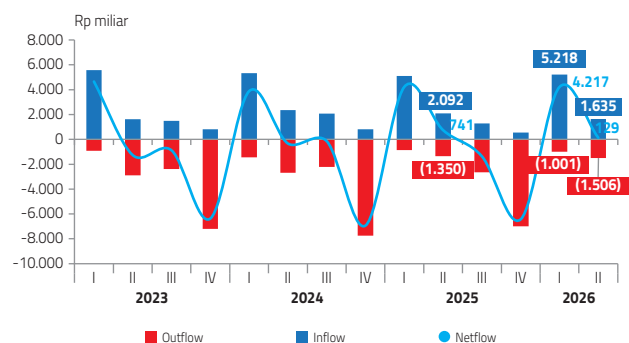
Papua terus mendukung penggunaan transaksi digital dan nirsentuh dalam melakukan transaksi ekonomi sehari-hari melalui berbagai program antara lain sosialisasi QRIS ke berbagai pihak mulai dari pemda, lembaga keagamaan, institusi, dan masyarakat umum.

4.4 PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Penyediaan Uang Layak Edar

Aliran uang kartal melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua pada triwulan II 2026 menunjukkan posisi *net inflow* sebesar Rp129 miliar, di mana pada triwulan sebelumnya mengalami *net inflow* sebesar Rp4,21 triliun. Posisi *net inflow* tersebut menunjukkan bahwa uang kartal yang masuk ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua lebih besar daripada uang yang keluar. Nominal uang yang masuk pada triwulan II 2026 mencapai Rp1,63 triliun, sementara uang yang keluar sebesar Rp1,5 triliun (Grafik 4.17). Hal ini sejalan dengan normalisasi permintaan uang kartal pada triwulan II 2026 pasca periode HBKN Idul Fitri di triwulan I 2026.

Distribusi uang layak edar juga dilakukan dalam bentuk kas titipan di luar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua. Hingga saat ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua memiliki 7 (tujuh) lokasi kas titipan, yang tersebar di Sorong, Merauke, Mimika, Biak, Wamena, Kepulauan Yapen dan Nabire. Tujuan pembentukan kas titipan adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengedaran uang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan nominal dan denominasinya.



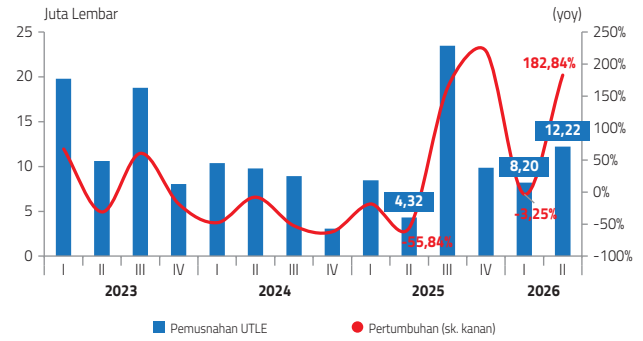
Sumber: Bank Indonesia.

Grafik 4.17 Aliran Uang Kartal di Wilayah Papua

Uang Tidak Layak Edar

Jumlah Uang Tidak Layak Edar (UTLE) yang dimusnahkan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua pada triwulan II 2026 sebanyak 12,22 juta lembar, atau tumbuh signifikan sebesar 182,84% (yoy), berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi -3,25% (yoy) (Grafik 4.18). Tingginya jumlah pemusnahan UTLE tersebut sejalan dengan semakin intensifnya pelaksanaan kegiatan Kas Keliling Luar Kota (KKLK). Melalui kegiatan KKLK yang menjangkau berbagai wilayah 3T, Bank Indonesia mampu menarik lebih banyak UTLE yang sebelumnya beredar cukup lama di masyarakat akibat keterbatasan akses perbankan dan tingginya penggunaan uang tunai.

Pemusnahan UTLE merupakan upaya Bank Indonesia untuk menjalankan *Clean Money Policy*, yaitu upaya untuk menjaga kualitas uang yang beredar di tengah masyarakat. Implementasi *Clean Money Policy* oleh Kantor



Sumber: Bank Indonesia.

Grafik 4.18 Perkembangan Pemusnahan UTLE

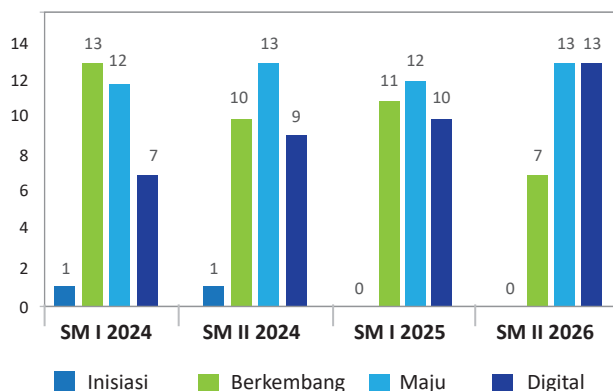
Perwakilan Bank Indonesia Papua didukung melalui kas keliling dalam kota di berbagai tempat di Kota Jayapura, serta kas keliling luar kota untuk menjangkau kebutuhan uang tunai yang layak edar di seluruh Papua dan DOB yang terdiri dari 29 Kota/Kabupaten.

Boks 4 : AKSELERASI ELEKTRONIFIKASI PEMERINTAH DAERAH MELALUI FORUM STRATEGIC ADVISORY TERPADU

Selaras dengan akselerasi dan inovasi pada ekonomi digital, pemerintah mendorong transformasi sistem pengelolaan keuangan daerah dengan kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). ETPD bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas transaksi keuangan pemerintah daerah. ETPD utamanya diukur melalui Indeks ETPD hingga ke tingkat kabupaten/kota yang terbagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu inisiasi, berkembang, maju, dan digital. Hingga Triwulan II Tahun 2025, wilayah Papua mengalami peningkatan pesat pada skor Indeks ETPD.

Pada tahun 2025, jumlah Pemda di seluruh kabupaten/kota pada wilayah Papua pada kategori digital perlahan mengalami peningkatan. Hal ini didukung dengan berbagai upaya akselerasi digitalisasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di wilayah Papua. Optimalisasi yang dilakukan utamanya pada perluasan kanal pembayaran retribusi dan pajak, penguatan program insentif dan sosialisasi, serta didukung dengan pendampingan intensif.

Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah pendampingan kepada Pemda melalui pelaksanaan *Refreshment, Capacity Building, Asistensi Pengisian Indeks ETPD Semester I Tahun 2026*. Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh Pemda di wilayah Papua tersebut diselenggarakan untuk memperkuat kompetensi teknis ETPD, asistensi pengisian Indeks ETPD,



Grafik 1. Perkembangan Indeks ETPD di Wilayah Papua

studi pembelajaran (*benchmarking*), serta peluncuran *Championship TP2DD Regional Papua*. Selain itu, Bank Indonesia Provinsi Papua juga mendiseminasikan *worksheet* prediktif skor Indeks ETPD Papua yang telah digunakan pada pengisian Indeks ETPD Semester I Tahun 2026. *Worksheet* tersebut juga dapat memberikan masukan strategis untuk memandu Pemda mencapai kategori Indeks ETPD digital.

Melalui kegiatan tersebut, terdapat 4 (empat) Pemerintah Daerah yang diproyeksikan naik dari kategori maju ke digital. Hal ini merupakan bentuk komitmen elektronifikasi transaksi oleh Pemda sebagai upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).



Gambar 1. Refreshment, Capacity Building, Asistensi Pengisian Indeks ETPD Wilayah Papua Semester I Tahun 2026



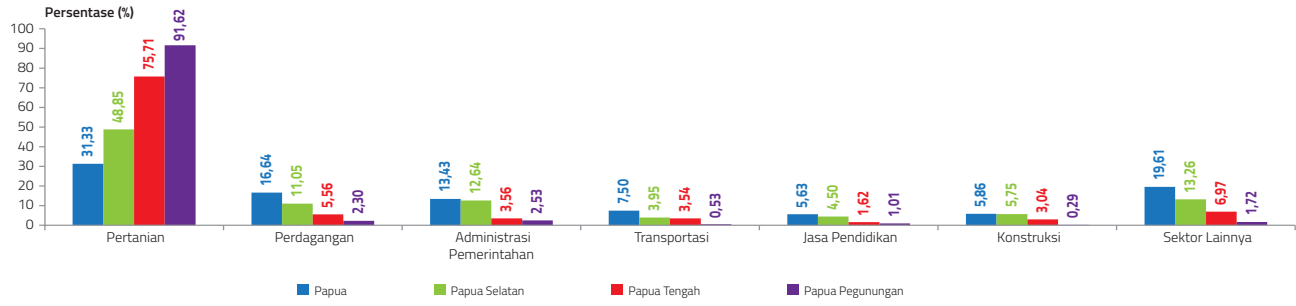


BAB V

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Ketenagakerjaan wilayah Papua pada Mei 2026 masih didominasi oleh Lapangan Usaha (LU) Pertanian, terutama di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah dengan porsi masing-masing sebesar 91,62% dan 75,71% dari total tenaga kerja. Tingginya ketergantungan pada sektor pertanian tersebut sejalan dengan dominasi pekerja informal, khususnya di Papua Pegunungan yang mencapai 94,75%. Meskipun demikian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Papua Pegunungan tercatat paling rendah sebesar 1,86%, jauh di bawah Provinsi Papua yang mencatat TPT tertinggi sebesar 7,08%. Rendahnya TPT di wilayah Papua Pegunungan belum sepenuhnya mencerminkan kualitas pasar kerja yang memadai, mengingat sebagian besar tenaga kerja masih bekerja pada sektor informal dengan produktivitas relatif rendah.

Berdasarkan data BPS Maret 2026, persentase penduduk miskin di wilayah Papua masih jauh lebih tinggi dibandingkan Nasional 8,07%. Provinsi Papua mencatat angka kemiskinan sebesar 18,39%, diikuti oleh Provinsi Papua Selatan dengan 18,54%, Provinsi Papua Pegunungan sebesar 26,24%, dan Provinsi Papua Tengah sebesar 30,41%. Rata-rata garis kemiskinan di provinsi Papua dan DOB berada relatif jauh di atas garis kemiskinan nasional, di mana garis kemiskinan makanan menjadi faktor pendorong utama



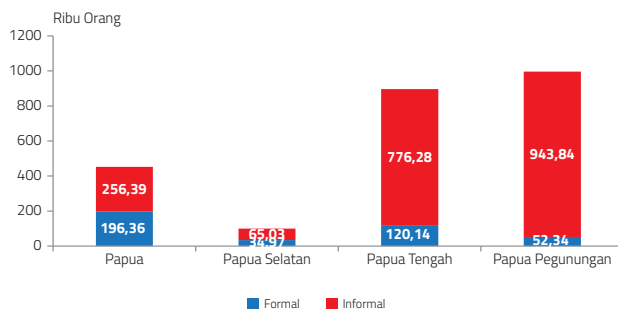
Sumber : BRS Ketenagakerjaan BPS Mei 2026, diolah.

Grafik 5.1 Persebaran Penyerapan Tenaga Kerja menurut Lapangan Usaha

5.1 KETENAGAKERJAAN

Pada Mei 2026, struktur penyerapan tenaga kerja di Papua dan DOB didominasi LU Pertanian yang tercatat sebesar 31,33% di Provinsi Papua; 48,85% di Papua Selatan; 75,71% di Papua Tengah; dan 91,62% di Papua Pegunungan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi kontributor utama terhadap penyerapan tenaga kerja di Papua dan DOB. Secara spesifik, meskipun Provinsi Papua Tengah memiliki aktivitas pertambangan yang cukup besar, penyerapan tenaga kerja di provinsi tersebut tetap didominasi oleh sektor pertanian.

Berdasarkan status pekerjaan, penduduk bekerja di Papua dan DOB masih didominasi oleh pekerja informal. Pada Mei 2026, persentase pekerja informal tercatat sebesar 56,63% di Provinsi Papua, 65,03% di Papua Selatan, 86,60% di Papua Tengah, dan 94,75% di Papua Pegunungan. Tingginya proporsi pekerja informal tersebut mencerminkan bahwa sebagian besar aktivitas ekonomi masyarakat masih bertumpu pada usaha berskala kecil dan sektor pertanian subsisten dengan produktivitas yang relatif terbatas.

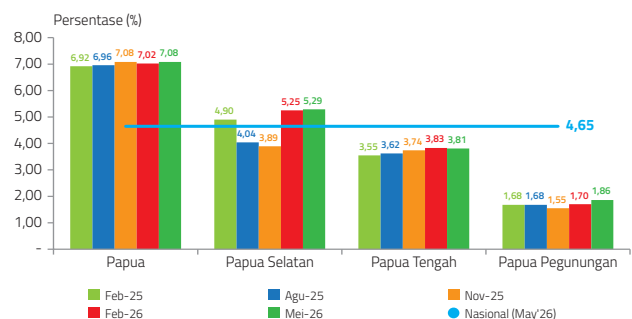


Sumber : BRS Ketenagakerjaan BPS, diolah.

Grafik 5.2 Klasifikasi Status Pekerjaan

Selanjutnya, ditinjau dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), kondisi ketenagakerjaan di Papua dan DOB menunjukkan perkembangan yang relatif bervariasi antarwilayah. Pada Mei 2026, TPT tercatat sebesar 7,08% di Provinsi Papua, 5,29% di Papua Selatan, 3,81% di Papua Tengah, dan 1,86% di Papua Pegunungan. Dibandingkan Agustus 2025, TPT Provinsi Papua dan Papua Selatan menunjukkan tren peningkatan, sementara Papua Tengah dan Papua Pegunungan mencatat TPT yang relatif rendah dan stabil. Secara nasional, TPT Mei 2026 tercatat sebesar 4,65%, lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Papua dan Papua Selatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan penyerapan tenaga kerja di Papua dan Papua Selatan masih relatif lebih besar dibandingkan wilayah lainnya. Tingginya TPT di Provinsi Papua mencerminkan tingginya persaingan dalam memperoleh pekerjaan, khususnya di wilayah perkotaan.

Pemerintah Provinsi Papua terus mendorong penurunan tingkat pengangguran melalui penguatan kompetensi dan keterampilan pencari kerja. Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui program pelatihan keterampilan



Sumber : BRS Ketenagakerjaan BPS, diolah.

Grafik 5.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

yang diselenggarakan melalui Balai Latihan Kerja (BLK), sekaligus mendorong pengembangan usaha mandiri sebagai alternatif penciptaan lapangan kerja. Program tersebut diharapkan dapat memperluas akses terhadap informasi dan kesempatan kerja, meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal, serta memperkuat keterkaitan antara pencari kerja dan dunia usaha.

Sementara itu, rendahnya TPT di Papua Tengah dan Papua Pegunungan belum sepenuhnya mencerminkan kualitas pasar kerja yang memadai, mengingat sebagian besar tenaga kerja masih bekerja pada sektor informal dan pertanian subsisten.

Selanjutnya, dari perspektif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Provinsi Papua dan Papua Selatan menunjukkan TPAK di bawah TPAK Nasional. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi oleh struktur demografi penduduk dengan proporsi usia sekolah yang relatif besar serta keterbatasan penciptaan lapangan kerja formal. Sementara itu, TPAK di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan tercatat berada di atas Nasional, yang mencerminkan tingginya keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi, terutama pada sektor pertanian dan kegiatan ekonomi berbasis rumah tangga. Namun demikian, tingginya partisipasi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas pekerjaan karena sebagian besar tenaga kerja masih bekerja pada sektor informal dan pertanian subsisten.

Secara keseluruhan, penguatan kinerja ketenagakerjaan di wilayah Papua perlu didukung oleh peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja yang sejalan dengan

pengembangan lapangan usaha yang lebih produktif. Upaya tersebut menjadi penting untuk mendorong penyerapan tenaga kerja, khususnya di Provinsi Papua yang masih menghadapi tingkat pengangguran relatif tinggi, serta mendukung transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

5.2 KESEJAHTERAAN

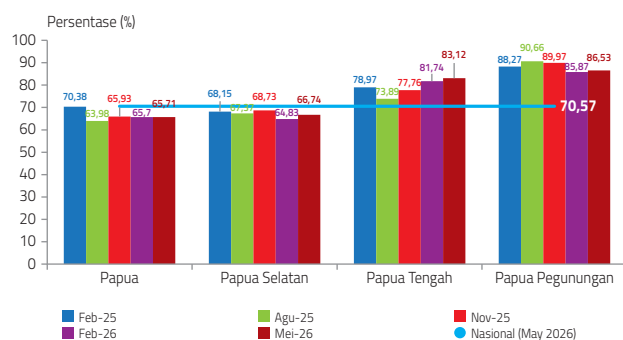
Sinergi pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua dan DOB. Salah satu upaya tersebut tercermin dari alokasi sekitar Rp1,3 triliun untuk mendukung pengembangan sektor pertanian di Papua Selatan melalui optimalisasi lahan, pembangunan dan rehabilitasi irigasi, penyediaan benih dan pupuk, serta modernisasi alat dan mesin pertanian (alsintan). Pengembangan sektor pertanian tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan, tetapi juga berpotensi memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di Papua Selatan.

5.2.1 Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan berdasarkan data BPS per Maret 2026 menunjukkan variasi antar provinsi di Papua dan DOB. Tercatat Provinsi Papua 0,398 dan Papua Selatan 0,405 berada di atas Nasional sebagai provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi. Sementara itu, Papua Tengah 0,315 dan Papua Pegunungan 0,301 mencatat tingkat ketimpangan relatif lebih rendah. (Grafik 5.5).

Secara umum, ketimpangan di wilayah Papua dan DOB masih berada pada kategori sedang. Tingkat ketimpangan yang lebih rendah di Papua Tengah dan Papua Pegunungan tidak selalu mencerminkan kondisi kesejahteraan yang lebih baik, tetapi terjadi karena tingkat pendapatan masyarakat yang relatif sama-sama rendah. Kondisi tersebut sejalan dengan demografi penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan informal dengan siklus perolehan pendapatan yang relatif terbatas.

Garis kemiskinan (GK) di seluruh provinsi Papua dan DOB lebih tinggi dibandingkan garis kemiskinan Nasional

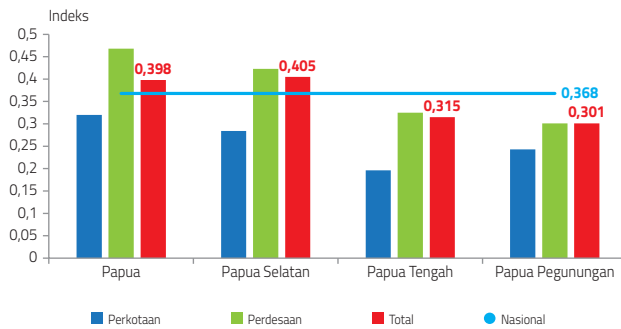


Sumber: BPS, diolah.

Grafik 5.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

(Grafik 5.6). Hal ini menunjukkan pentingnya sinergi dalam menjaga keterjangkauan harga kebutuhan bahan pokok dan penting.

Struktur GK di Papua dan DOB masih didominasi oleh komponen Garis Kemiskinan Makanan (GKM), baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Pada wilayah Papua komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar terhadap GK di daerah perkotaan adalah beras, rokok kretek filter, tongkol/tuna/cakalang, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Sementara itu, di daerah perdesaan komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar adalah beras, rokok kretek filter, tongkol/tuna/cakalang, gula pasir dan telur ayam ras. Stabilitas harga bahan pangan pokok yang masuk ke dalam komoditas dengan andil utama pada GK makanan dapat melindungi kelompok rentan serta melindungi kelompok masyarakat yang tergolong miskin.

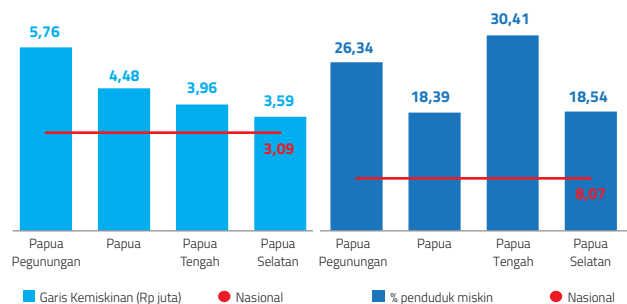


Sumber : BPS, diolah.

Grafik 5.5 Indeks Gini Wilayah Papua Maret 2026

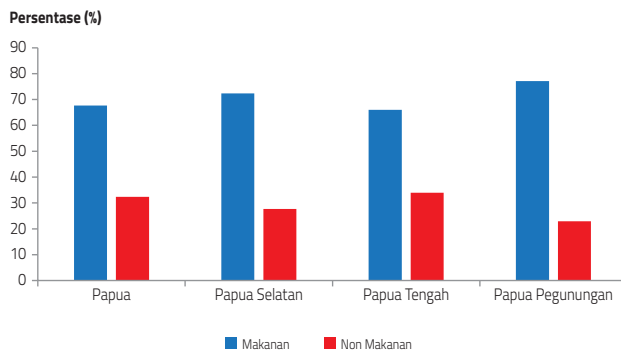
5.2.2 Kesejahteraan Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) di Papua dan DOB pada triwulan II tahun 2026 menunjukkan pergerakan yang beragam antar wilayah. NTP Provinsi Papua dan Papua Selatan masih berada di atas level 100 hingga Juli 2026, yang mengindikasikan relatif terjaganya daya beli petani. Sementara itu, NTP Papua Tengah cenderung melandai hingga berada di bawah level 100, sedangkan NTP Papua Pegunungan masih berada di bawah level 100. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya perbedaan kondisi daya beli petani antarwilayah yang dipengaruhi oleh dinamika harga komoditas pertanian dan biaya produksi. Secara umum, NTP Papua dan DOB masih berada di bawah NTP nasional, yang menunjukkan bahwa daya beli petani di wilayah Papua dan DOB masih menghadapi tantangan dibandingkan dengan kondisi nasional.



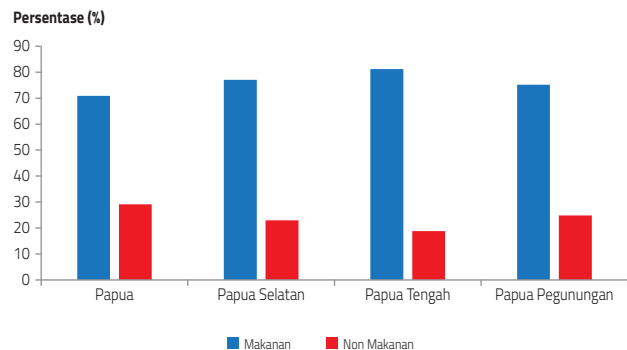
Sumber : BPS, diolah.

Grafik 5.6 Profil Kemiskinan Wilayah Papua Maret 2026



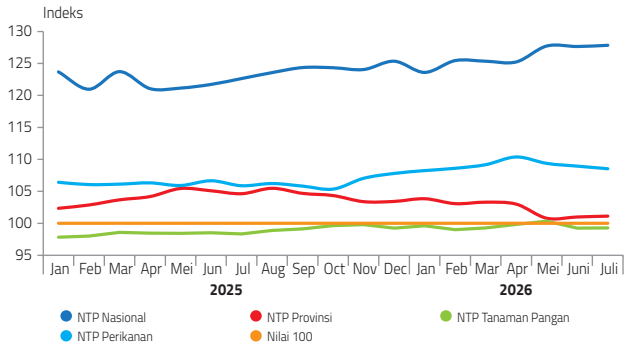
Sumber : BPS, diolah.

Grafik 5.7 GK Perkotaan berdasarkan Jenis Komoditas Maret 2026



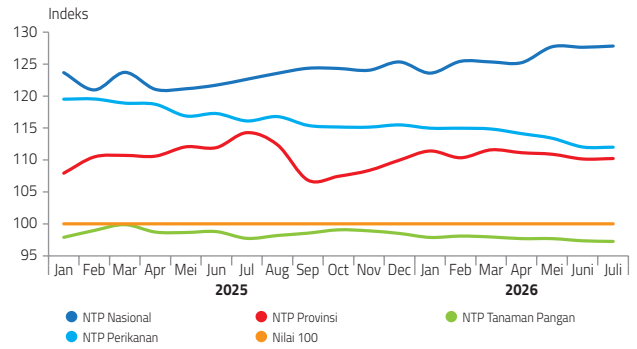
Sumber : BPS, diolah.

Grafik 5.8 GK Perdesaan berdasarkan Jenis Komoditas Maret 2026



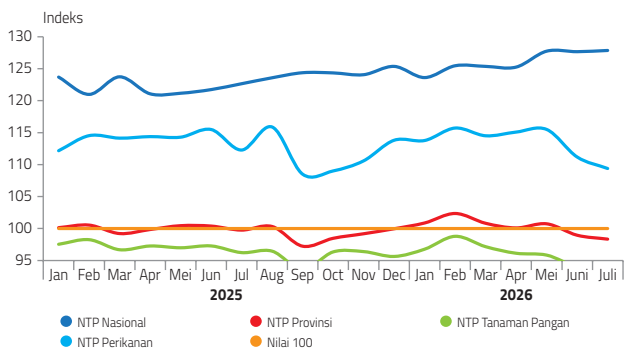
Sumber : BPS Papua, diolah.

Grafik 5.9 Perkembangan NTP Provinsi Papua



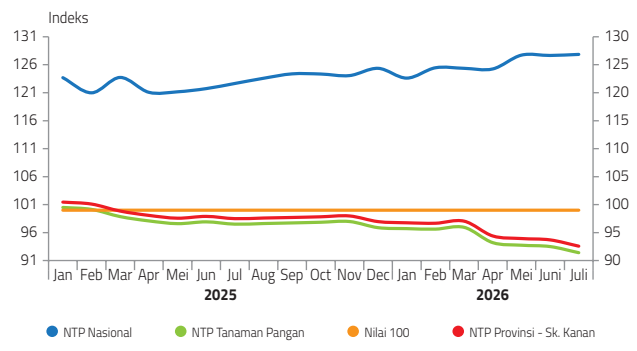
Sumber : BPS Papua, diolah.

Grafik 5.10 Perkembangan NTP Provinsi Papua Selatan



Sumber : BPS Papua, diolah.

Grafik 5.11 Perkembangan NTP Provinsi Papua Tengah

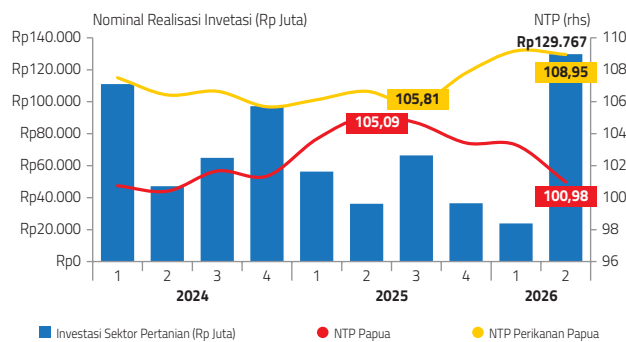


Sumber : BPS Papua, diolah.

Grafik 5.12 Perkembangan NTP Provinsi Papua Pegunungan

Boks 5 : DAMPAK PERKEMBANGAN INVESTASI LU PERTANIAN TERHADAP INDEKS NILAI TUKAR PETANI (NTP) DI PROVINSI PAPUA

Perkembangan realisasi investasi Lapangan Usaha (LU) Pertanian Provinsi Papua belum berdampak langsung terhadap perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Papua (Grafik 1).



Sumber: BKPM dan BPS, diolah

Grafik 1. Korelasi Investasi Terhadap NTP Papua dan NTP Perikanan Papua

Hal ini menunjukkan bahwa NTP belum bersifat *investment-driven* dan cenderung terpengaruh oleh inflasi daerah yang dapat menurunkan daya beli petani. Hal ini mengindikasikan bahwa petani di Papua masih bergantung pada komoditas mentah dan belum mampu menghasilkan produk turunan serta hilirisasinya.



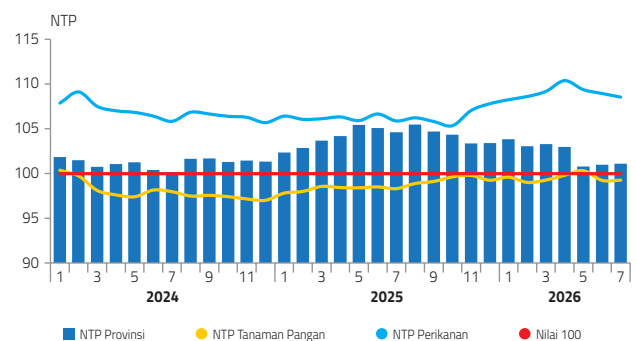
Sumber: BKPM, diolah

Grafik 2. Disagregasi Realisasi Investasi LU Pertanian Provinsi Papua

Berdasarkan Grafik 2, investasi LU Pertanian di Papua didominasi oleh sub-LU (1) Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan, serta (2) Perikanan. Pada Triwulan II 2026, realisasi investasi sub-LU Perikanan kembali menjadi kontributor terbesar sepanjang periode 2024-2026.

Hal ini berdampak pada NTP Perikanan yang cenderung meningkat. Selanjutnya pada semester-II 2026 ini, fenomena El Nino yang menyebabkan *upwelling* dapat meningkatkan pergerakan ikan mendekati permukaan air laut seiring adanya peningkatan suhu permukaan air laut yang membuat plankton bergerak menuju suhu air laut yang lebih hangat (Garcia-Huidobro et al., 2025). Peristiwa ini diharapkan dapat meningkatkan hasil tangkapan ikan.

Melalui peningkatan realisasi investasi di sub-LU perikanan, diharapkan dapat mendorong optimalisasi produksi perikanan tangkap di Provinsi Papua sepanjang periode El Nino untuk menekan risiko inflasi aneka ikan, meningkatkan profitabilitas dan kesejahteraan nelayan.



Sumber: BPS, diolah

Grafik 3. Disagregasi NTP Papua



BAB VI

PROSPEK EKONOMI DAERAH

Perekonomian Papua dan DOB pada tahun 2026 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2025. Peningkatan kinerja perekonomian disebabkan oleh output sektor tambang yang diperkirakan lebih tinggi dibandingkan output tahun 2025, sejalan dengan perbaikan perekonomian Papua Tengah yang diperkirakan pada kisaran -3,4 s.d. -2,6% (yoy) membaik dibandingkan tahun 2025 yang mengalami kontraksi sebesar -21,80% (yoy). Pada tahun 2026, Provinsi Papua dan Papua Selatan juga diperkirakan akan tumbuh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sejalan dengan hal tersebut, pertumbuhan sektor nontambang juga diperkirakan menyumbang pertumbuhan pada perekonomian.

Pada sisi pengeluaran, ekspor Papua dan DOB diperkirakan masih tertahan seiring belum optimalnya salah satu blok tambang yang terdampak bencana. Aktivitas ekonomi masyarakat juga diperkirakan akan tumbuh seiring dengan diperolehnya stimulus melalui peningkatan UMP pada tahun 2026 sebagai salah satu faktor yang menopang konsumsi masyarakat.

Perkembangan inflasi secara agregat di Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan pada tahun 2026 diperkirakan berada pada sasaran inflasi nasional yaitu $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Hal ini didorong oleh peningkatan produktivitas petani lokal seiring dengan semakin kuatnya sinergi dan intensitas pelaksanaan pengendalian inflasi melalui TPID dan GPIPS.

6.1. PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI

Prospek Pertumbuhan Ekonomi 2026

Perekonomian Papua dan DOB pada tahun 2026 diperkirakan mengalami kinerja lebih tinggi dibandingkan tahun 2025. Secara spasial, perekonomian Provinsi Papua pada tahun 2026 diproyeksikan berada pada kisaran 4,0 s.d. 4,8% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun 2025. Perekonomian Provinsi Papua Selatan pada tahun 2026 diproyeksikan berada pada kisaran 4,8 s.d. 5,6% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun 2025. Perekonomian Provinsi Papua Tengah pada tahun 2026 diproyeksikan berada pada kisaran -3,4 s.d. -2,6% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun 2025. Perekonomian Provinsi Papua Pegunungan pada tahun 2026 diproyeksikan berada pada kisaran 3,0 s.d. 3,8% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2025.

Secara agregat, peningkatan kinerja perekonomian disebabkan oleh *output* sektor tambang yang diperkirakan lebih tinggi dibandingkan *output* tahun 2025. Sektor nontambang diperkirakan melanjutkan pertumbuhan dan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini seiring dengan pembangunan dan proyek-proyek strategis pemerintah. Pada sisi pengeluaran, prospek ekspor – utamanya ekspor antar daerah – diperkirakan lebih baik seiring dengan mulai berproduksinya blok tambang utama yang terdampak *wet mud rush* pada akhir tahun 2025.

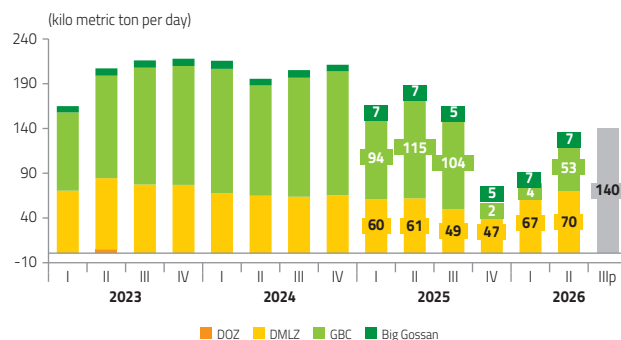
LU pertambangan dan penggalian yang menjadi komponen penyusun terbesar perekonomian Papua dan DOB, utamanya Papua Tengah diperkirakan

mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Perbaikan kinerja LU pertambangan dan penggalian pada tahun 2026 sejalan dengan perbaikan bertahap salah satu blok tambang utama yang mulai berproduksi sehingga meningkatkan perkiraan produksi tembaga dan emas sebagai komoditas utama sektor pertambangan di Papua dan DOB, khususnya Papua Tengah. Kapasitas penggilingan bijih tembaga yang diekstrak pada tahun 2025 mencapai 138,3 ribu metrik ton per hari, kapasitas ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 sebesar 208,4 ribu ton. Perkiraan kapasitas penggilingan bijih yang diekstrak selama tahun 2026 berada pada level yang sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2025 (Grafik 6.1). Selain itu, terdapat tren kadar bijih tembaga dan emas yang cenderung menurun menambah risiko ketidakpastian jumlah produk akhir.

Output sektor nontambang Papua dan DOB pada tahun 2026 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. LU sektor nontambang pada 2026 diperkirakan mengalami peningkatan laju pertumbuhan, berbagai proyek dan pembangunan proyek strategis pemerintah akan berdampak positif terhadap kinerja sektor nontambang.

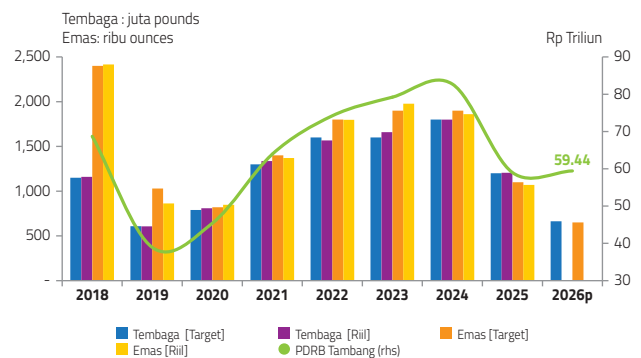
Sejalan dengan hal tersebut, perbaikan optimisme masyarakat terhadap perekonomian meningkatkan minat konsumen untuk berbelanja dan menjadi faktor penahan perlambatan sektor non tambang lebih jauh.

Kinerja LU pertanian, kehutanan, dan perikanan diperkirakan tumbuh melambat pada tahun 2026.



Sumber: News Release – fcx.com, *Proyeksi Bank Indonesia

Grafik 6.1 Produksi Bijih yang Digiling per Hari



Sumber: News Release – fcx.com, *Proyeksi Bank Indonesia

Grafik 6.2 Perkembangan Penjualan Pertambangan

Perlambatan terutama dipengaruhi oleh sub LU pertanian seiring risiko penurunan produktivitas akibat kondisi iklim yang lebih kering serta fenomena El Nino yang berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, khususnya pada periode musim kemarau. Kondisi tersebut berpotensi menekan produktivitas tanaman pangan dan berdampak pada produksi pertanian. Prospek produksi padi juga cenderung lebih rendah, tercermin dari perkembangan luas panen berdasarkan KSA BPS, di mana potensi panen pada Triwulan III 2026 diperkirakan menurun dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Perlambatan kinerja sub LU pertanian menjadi perhatian mengingat sektor tersebut masih menjadi salah satu fokus pengembangan sumber ekonomi baru Papua dan DOB melalui program optimalisasi lahan, pengembangan kawasan sentra produksi pangan di Provinsi Papua Selatan, serta pembukaan lahan tebu untuk mendukung program swasembada gula. Sementara itu, sub LU perikanan masih berpotensi memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan LU, namun peningkatannya diperkirakan belum mampu sepenuhnya mengompensasi perlambatan pada sub LU pertanian. Meskipun berbagai program peningkatan produksi dan produktivitas pertanian tetap berjalan, faktor cuaca yang kurang mendukung dan indikasi penurunan potensi panen padi pada Triwulan III 2026 menjadi faktor penahan utama kinerja LU pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2026.

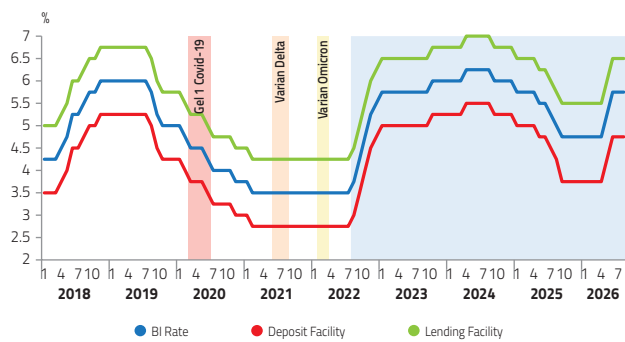
Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana penunjang bagi 3 DOB Papua diperkirakan terdampak kebijakan penurunan TKD oleh pemerintah. Pengembangan sarana pendukung di DOB Papua untuk mempercepat dan mengoptimalkan pelayanan administrasi pemerintahan telah dilaksanakan sejak 2024, namun proyek besar seperti pembangunan gedung kepala daerah untuk provinsi hasil pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) diperkirakan mengalami hambatan. Hal ini tercermin pada pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di tahun 2026 untuk Wilayah Papua yang mengalami penurunan sebesar -64,40% (yoy). Penggunaan DAK Fisik ditujukan untuk penyediaan infrastruktur publik dan berbagai kegiatan yang berorientasi pada layanan publik. Saat ini, pemerintah Papua Tengah dan Papua Pegunungan masih dalam proses pembangunan pusat pemerintahan baru,

sedangkan untuk Provinsi Papua Selatan sudah selesai. Di sisi lain, kegiatan pengembangan pertambangan bawah tanah pada tahun 2026 yang masih terus berlanjut menjadi faktor pendorong kinerja LU konstruksi di Papua dan DOB, khususnya Papua Tengah.

Tetap tingginya aktivitas ekonomi masyarakat pada tahun 2026 diperkirakan mendorong pertumbuhan kinerja LU perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Secara agregat, pertumbuhan LU perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor pada triwulan II 2026 lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Kinerja perdagangan diperkirakan akan tetap tertahan sejalan dengan ekspektasi konsumen yang masih terbatas. Survei Penjualan Eceran (SPE) Bank Indonesia periode Mei 2026 menunjukkan bahwa 86,11% responden di Wilayah Papua memprakirakan total penjualan pada 3 bulan mendatang akan mengalami peningkatan dan 81,94% responden memprakirakan total penjualan pada 6 bulan mendatang akan mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan proyeksi kinerja yang akan mengalami peningkatan bagi LU perdagangan besar dan eceran.

Dari sisi permintaan, kinerja konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh melambat. Perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh masih tingginya ketidakpastian perekonomian global dan nasional yang mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam melakukan konsumsi. Ketidakpastian terkait prospek pertumbuhan ekonomi global, dinamika perdagangan internasional, serta kondisi pasar keuangan berpotensi memengaruhi keyakinan masyarakat dan dunia usaha. Di sisi domestik, penyesuaian konsumsi juga dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya kuat serta kecenderungan rumah tangga untuk meningkatkan tabungan dan menahan pengeluaran. Indeks keyakinan konsumen (IKK) pada Agustus 2026 berada di bawah area optimis 98,56 (di bawah 100), lebih rendah dibandingkan triwulan II 2026 sebesar 104,59.

Konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2025 sejalan dengan normalisasi aktivitas pasca kebijakan efisiensi. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP2OKP) dan berbagai proyek



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.3 Perkembangan BI Rate

pemerintah termasuk pembangunan KDMP dan KNMP diperkirakan akan mendukung konsumsi pemerintah serta meningkatkan belanja pemerintah untuk mendukung berbagai program unggulan lain seperti MBG dan SR. Di sisi lain, pengurangan TKD pada tahun 2026 diperkirakan akan menahan laju pertumbuhan lebih jauh.

Total ekspor Papua dan DOB pada tahun 2026 diperkirakan mengalami penurunan signifikan dan beralih fokus menjadi ekspor antar daerah. Penghentian ekspor konsentrat tembaga sejak triwulan IV 2025 dan dilanjutkan sepanjang tahun 2026, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang mewajibkan pengolahan dan pemurnian mineral dilakukan di dalam negeri serta melarang ekspor mineral mentah tanpa proses hilirisasi. Sejalan dengan kebijakan hilirisasi tersebut, konsentrat tembaga yang sebelumnya diekspor ke luar negeri saat ini seluruhnya dialihkan menjadi ekspor antar daerah untuk diproses dan dimurnikan di fasilitas smelter di Jawa Timur.

6.2. PROSPEK INFLASI TAHUN 2026

Prospek Inflasi Keseluruhan Tahun 2026

Agregat inflasi 4 provinsi meliputi Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan pada tahun 2026 optimis masih berada pada kisaran target inflasi nasional tahun 2026, yaitu $2,5 \pm 1\%$ (yoy).

Prakiraan tersebut seiring dengan efektivitas program pengendalian inflasi komoditas pangan dan peningkatan produktivitas lokal. Secara umum, inflasi pada tahun 2026 dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

- Ketidakpastian dari gejolak geopolitik global berisiko mengganggu kestabilan harga dan alur pasokan komoditas global, terutama pangan dan energi. Di samping itu, kekhawatiran terhadap ekonomi global turut mendorong permintaan dan tekanan harga pada komoditas emas sebagai bentruk alokasi investasi yang aman.
- Kebijakan restriksi impor pangan terutama beras, garam, jagung, dan gula berisiko menimbulkan ketidakstabilan pasokan di tengah defisit neraca pangan Provinsi Papua dan DOB.
- Perubahan kondisi cuaca yang dipengaruhi oleh fenomena El Niño dengan intensitas kuat yang dapat berdampak negatif pada produksi tanaman pangan seperti beras dan jagung seiring berkurangnya curah hujan dan menurunnya ketersediaan air. Di sisi lain, fenomena El Niño juga memiliki dampak positif terhadap produksi hortikultura dan perikanan tangkap pada semester II tahun 2026.

Prospek Inflasi Provinsi Papua 2026

Tingkat inflasi di Provinsi Papua pada 2026 diperkirakan berada pada kisaran 1,31% (yoy) s.d. 2,11% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2025 dan berada dalam target inflasi nasional. Hal ini didukung melalui penguatan sinergi pengendalian inflasi oleh TPID. Selain itu, adanya peningkatan produktivitas pertanian turut menekan inflasi terutama produksi hortikultura lokal selama El Nino.

Prospek Inflasi Provinsi Papua Selatan 2026

Tingkat inflasi di Provinsi Papua Selatan 2026 diperkirakan berada pada kisaran 1,76% s.d. 2,56% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2025 dan berada dalam target inflasi nasional. Hal ini didukung oleh peningkatan produktivitas petani lokal pada kawasan optimalisasi lahan dan cetak sawah yang mulai berproduksi lebih optimal dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, ENSO

iklim El Nino diperkirakan mengurangi risiko banjir di tanah rawa Kabupaten Merauke yang sangat bergantung pada cuaca.

Prospek Inflasi Provinsi Papua Tengah 2026

Tingkat inflasi di Provinsi Papua Tengah tahun 2026 diperkirakan berada pada kisaran 1,61 s.d. 2,41% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2025 dan berada di bawah target inflasi nasional. Hal ini didukung utamanya oleh peningkatan produksi hortikultura lokal saat fenomena El Nino. Selain itu, peningkatan pasokan daging babi turut mendukung penurunan risiko inflasi Papua Tengah.

Prospek Inflasi Provinsi Papua Pegunungan 2026

Tingkat inflasi di Provinsi Papua Pegunungan pada tahun 2026 diperkirakan berada pada kisaran 6,75 s.d. 7,55% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun 2025 dan berada di atas target inflasi nasional. Hal ini disebabkan *lowbase effect* inflasi tahun 2025 dan masih tingginya inflasi pangan selama 2026 seiring kenaikan harga logistik akibat peningkatan harga energi dunia.



Daftar Istilah

Base Effect

efek kenaikan/penurunan nilai pertumbuhan yang cukup besar sebagai akibat dari nilai level variabel yang dijadikan dasar perhitungan/perbandingan mempunyai nilai yang rendah/tinggi.

Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)

sistem transfer dana elektronik yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika. BI-RTGS termasuk dalam kategori *Systemically Important Payment System* (SIPS).

BI 7-day (Reverse) Repo Rate

Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan mengimplementasikan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru yaitu BI 7-Day (Reverse) Repo Rate, yang berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016, menggantikan BI Rate. Instrumen BI 7-Day (Reverse) Repo Rate digunakan sebagai suku bunga kebijakan baru karena dapat secara cepat memengaruhi pasar uang, perbankan dan sektor riil. Instrumen BI 7-Day (Reverse) Repo Rate sebagai acuan yang baru memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang, sifatnya transaksional atau diperdagangkan di pasar, dan mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya penggunaan instrumen repo.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

adalah simpanan pihak ketiga bukan bank yang terdiri dari giro, tabungan dan simpanan berjangka.

Debt to Service Ratio (DSR)

rasio utang terhadap pendapatan yang mencerminkan kemampuan individu/korporasi/negara untuk menyelesaikan kewajiban membayar hutang.

Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)

mencakup keyakinan konsumen mengenai ekspektasi konsumen terhadap kondisi perekonomian 6 bulan yang akan datang dibanding saat ini, meliputi ekspektasi penghasilan, kondisi (dunia usaha) ekonomi Indonesia secara umum dan ketersediaan lapangan kerja.

Indeks Kondisi Ekonomi Saat ini (IKE)

mencakup keyakinan konsumen mengenai penghasilan saat ini, ketepatan waktu untuk melakukan pembelian barang tahan lama (*durable goods*), dan ketersediaan lapangan kerja, dengan membandingkan antara kondisi saat ini dan 6 bulan yang lalu.

Inflasi IHK

perubahan harga barang dan jasa dalam satu periode, yang diukur dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Inflow

adalah aliran masuk uang kartal ke Bank Indonesia.

Kontraksi

kondisi di mana pertumbuhan bernilai negatif.

Kredit Lokasi Bank (Lokbank)

penyaluran kredit oleh perbankan yang berkedudukan di Provinsi Papua kepada debitur yang berada di dalam maupun luar Provinsi Papua.

Kredit Lokasi Proyek (Lokpro)

penyaluran kredit oleh perbankan dari dalam maupun luar Provinsi Papua yang diberikan kepada debitur yang berada di Provinsi Papua.

Liaison

kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung/tidak langsung kepada pelaku usaha/institusi lainnya mengenai perkembangan dan arah kegiatan usaha dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan dan *likert scale*.

Likert Scale

alat statistik untuk menilai variabel/indikator dengan skala -5 hingga 5. Metode ini disusun dengan mengacu pada pelaksanaan di *Reserve Bank of Australia* (RBA).

Likuiditas

posisi uang atau kas perusahaan yang mencerminkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban tepat pada waktunya.

Loan at Risk (LaR)

rasio kredit bermasalah atau NPL serta kredit bermasalah yang telah direstrukturisasi dibandingkan dengan total kredit *outstanding*.

Loan to Value (LTV)

rasio antara nilai kredit/pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank terhadap nilai agunan berupa properti pada saat pemberian kredit/pembiayaan berdasarkan harga penilaian terakhir.

Month to month (mtm)

perubahan nilai pada bulan bersangkutan dibandingkan bulan sebelumnya.

Net Inflow

uang yang diedarkan *inflow* lebih besar dari *outflow*.

Non Performing Loan (NPL)

rasio pembiayaan atau kredit macet terhadap total penyaluran pembiayaan atau kredit oleh bank, baik dalam rupiah dan valas. Kriteria NPL adalah (a) kurang lancar, (b) diragukan, dan (c) macet.

Outflow

adalah aliran keluar uang kartal dari Bank Indonesia.

Pasar Uang Antar Bank (PUAB)

kegiatan pinjam meminjam dana jangka pendek (dalam satuan malam) antar bank yang dilakukan melalui jaringan komunikasi elektronik.

Quarter to Quarter (qtq)

perubahan nilai pada triwulan bersangkutan dibandingkan triwulan sebelumnya.

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)

penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan menggunakan QR Code Pembayaran wajib menerapkan QRIS.

Rentabilitas

kemampuan dari suatu perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan aset/modal.

Repo

transaksi penjualan instrumen keuangan antara dua belah pihak dengan perjanjian dimana pada tanggal yang telah ditentukan akan dilaksanakan pembelian kembali atas instrumen yang sama dengan harga tertentu.

Saldo Bersih Tertimbang (SBT) Kegiatan Dunia Usaha

merupakan indikator dini (*leading indicator*) yang dihasilkan dari Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU). SBT Kegiatan Dunia Usaha mengindikasikan kondisi perkembangan kegiatan ekonomi di sektor riil secara triwulanan dengan memperhitungkan selisih jumlah jawaban "Positif" dengan jawaban "Negatif" dari tiap sektor. Selisih tersebut kemudian dikalikan bobot tiap sektor.

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

sistem transfer dana elektronik yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaiannya dilakukan secara nasional.

Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)

merupakan survei triwulanan yang bertujuan untuk mendapatkan indikator pertumbuhan ekonomi dari sisi penawaran secara triwulanan.

Survei Konsumen (SK)

merupakan survei bulanan untuk mengetahui keyakinan konsumen mengenai kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi terhadap kondisi 6 bulan mendatang.

Year on Year (yoy)

sering disebut perubahan tahunan, adalah perubahan nilai pada bulan bersangkutan dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya.

Year to Date (ytd)

sering disebut perubahan kumulatif, adalah perubahan nilai pada bulan bersangkutan dibandingkan bulan Desember tahun sebelumnya.





LAMPIRAN TABEL

Tabel 1. Impor Luar Negeri Nonmigas Papua

Tabel 2. Ekspor Luar Negeri Nonmigas Papua

Tabel 1. Impor Luar Negeri Nonmigas Papua

RINCIAN	2023				2024				2025				2026	
	I	III	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
IMPOR														
Nilai Impor Non Migas (Juta USD)	86,64	62,54	57,77	41,96	65,49	88,77	93,15	71,50	33,00	46,37	58,03	51,26	49,79	66,73
Nilai Impor Konsumsi	0,99	0,84	1,19	3,37	0,59	0,99	0,31	0,22	0,26	0,70	1,08	0,71	0,63	0,49
Nilai Impor Bahan Baku dan Penolong	63,24	41,03	46,80	32,88	58,09	81,21	82,69	59,44	23,95	38,97	45,50	40,75	39,16	28,24
Nilai Impor Barang Modal	22,41	20,68	9,79	5,71	6,80	6,58	10,16	11,85	8,79	10,71	11,46	9,79	10,00	38,01
Nilai Impor Non Migas (Ribu Ton)	14,70	7,57	10,46	7,74	8,92	19,15	9,98	5,78	3,12	10,90	8,14	4,29	3,82	7,76
Nilai Impor Konsumsi	0,03	0,03	0,13	4,03	0,15	0,02	0,04	0,04	0,01	0,02	0,04	0,02	0,02	0,02
Nilai Impor Bahan Baku dan Penolong	11,23	6,52	9,97	3,48	8,46	18,86	9,37	5,23	2,80	10,89	7,86	3,71	3,06	3,01
Nilai Impor Barang Modal	3,44	1,01	0,36	0,24	0,31	0,27	0,57	0,50	0,30	0,37	0,24	0,55	0,74	4,74

Sumber: Bea dan Cukai

Tabel 2. Ekspor Luar Negeri Nonmigas Papua

RINCIAN	2023				2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
EKSPOR														
Total Komoditas (juta USD)														
Kayu, Barang dari Kayu	17,33	9,32	15,72	20,83	21,13	12,17	25,01	23,51	14,31	19,90	25,55	26,90	11,70	15,89
Bijih Tembaga	929,81	1.790,66	1.742,22	1.840,12	1.798,45	990,10	1.513,42	1.156,67	572,93	2.019,57	1.758,65	-	-	-
Negara Tujuan Utama (juta USD)														
Amerika Serikat														
Kayu, Barang dari Kayu	0,04	0,06	0,01	7,59	9,10	0,66	8,13	8,61	0,00	10,30	8,69	8,51	-	-
Bijih Tembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Filipina														
Kayu, Barang dari Kayu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bijih Tembaga	93,70	63,64	90,67	144,43	62,97	0,00	0,00	131,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
India														
Kayu, Barang dari Kayu	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Bijih Tembaga	89,21	106,27	148,99	140,17	185,60	34,07	137,92	29,85	39,73	115,49	177,00	-	-	-
Jepang														
Kayu, Barang dari Kayu	0,43	0,14	0,30	0,21	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bijih Tembaga	152,73	432,60	424,99	340,67	528,29	438,55	282,34	101,52	0,00	331,85	309,42	-	-	-
Tiongkok														
Kayu, Barang dari Kayu	0,01	0,00	0,02	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,61	0,45	0,48
Bijih Tembaga	146,33	319,09	481,46	521,18	451,35	126,81	641,50	552,00	414,55	1312,33	1.166,09	-	-	-
Arab Saudi														
Kayu, Barang dari Kayu	1,80	0,00	1,62	0,04	1,35	0,00	1,27	0,07	2,39	0,03	0,24	0,24	0,14	0,53
Bijih Tembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Korea Selatan														
Kayu, Barang dari Kayu	4,09	2,79	2,12	3,02	1,61	1,64	1,54	1,98	1,79	1,38	2,21	2,04	1,88	2,29
Bijih Tembaga	89,33	182,46	241,41	259,66	164,43	94,07	96,84	170,82	40,88	182,77	34,70	-	-	-
Bulgaria														
Kayu, Barang dari Kayu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bijih Tembaga	0,00	97,18	149,79	117,70	91,31	127,92	95,81	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Jerman														
Kayu, Barang dari Kayu	0,16	0,21	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bijih Tembaga	85,87	212,08	118,41	117,28	60,97	67,27	33,74	0,00	38,89	77,13	34,44	0,00	0,00	0,00
Australia														
Kayu, Barang dari Kayu	8,01	4,88	10,94	9,63	8,11	8,69	12,55	11,48	8,85	7,38	13,03	15,42	9,23	12,59
Bijih Tembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spanyol														
Kayu, Barang dari Kayu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bijih Tembaga	184,68	212,16	58,72	185,62	191,02	84,82	128,18	171,25	0,00	0,00	-	-	-	-
Taiwan														
Kayu, Barang dari Kayu	0,54	0,00	0,04	0,04	0,02	0,00	0,20	0,00	0,09	0,09	0,08	0,09	0,00	0,00
Bijih Tembaga	15,30	104,35	27,79	13,40	32,17	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99	0,00	0,00	0,00
Belanda														
Kayu, Barang dari Kayu	1,08	0,68	0,59	0,26	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Bijih Tembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Bea dan Cukai



**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI PAPUA**

Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 9 Jayapura
Telp. (0967) 534581 - Fax (0967) 535201
http: <https://www.bi.go.id>

